

Katalog: 3205008.33

DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN Jawa Tengah 2011-2015



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

DATA DAN INFORMASI
KEMISKINAN
Jawa Tengah 2011-2015



DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN JAWA TENGAH 2011-2015

ISSN : 2407-3369
No. Publikasi : 33520.1702
Katalog : 3205008.33

Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm
Jumlah Halaman : xiv + 101 halaman

Naskah:

Bidang Statistik Sosial

Penyunting:

Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit:

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Dicetak oleh:

CV. Pelita

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

KATA PENGANTAR

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang dihadapi oleh negara-negara berkembang di dunia. Di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, persoalan yang sama juga menjadi fokus perhatian pemerintah dan masyarakat. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Badan Pusat Statistik setiap tahunnya berusaha menyajikan data dan informasi kemiskinan berdasarkan hasil survei.

Publikasi ini berisi tentang data dan informasi mengenai kemiskinan dan indikator serta variabel lain yang terkait dengan masalah kemiskinan untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Untuk tingkat provinsi merupakan hasil penghitungan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Triwulan I dan Triwulan III. Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota merupakan hasil penghitungan Susenas Triwulan I – IV (tahun 2011-2014) dan Susenas Maret tahun 2015.

Diharapkan publikasi ini dapat memberikan informasi yang memadai bagi semua pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Semarang, April 2017
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Jawa Tengah



Dr. Margo Yuwono, S.Si, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Tujuan Penulisan.....	4
1.3. Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II METODOLOGI PENGHITUNGAN KEMISKINAN.....	7
2.1. Metodologi Penghitungan Kemiskinan	7
2.1.1. Konsep.....	7
2.1.2. Sumber Data	7
2.1.3. Metode.....	9
2.1.4. Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi	10
2.1.5. Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan Tingkat Kabupaten/Kota.....	12
2.2. Indikator Kemiskinan.....	14
2.3. Beberapa Konsep dan Definisi	15
2.3.1. Pendidikan	15
2.3.2. Ketenagakerjaan	16
2.3.3. Kesehatan	16
2.3.4. Pengeluaran Perkapita	16
2.3.5. Fasilitas Perumahan.....	17
2.3.6. Program Pemerintah	17
2.3.7. Inflasi	17
BAB III KONDISI KEMISKINAN JAWA TENGAH.....	19
3.1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan.....	19
3.1.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin	19
3.1.2. Garis Kemiskinan.....	22
3.1.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan.....	23

3.1.4. Indeks Keparahan Kemiskinan.....	24
3.2. Karakteristik Penduduk Miskin.....	25
3.2.1. Pendidikan.....	25
3.2.2. Ketenagakerjaan.....	28
3.2.3. Kesehatan.....	30
3.2.4. Pengeluaran per Kapita per Bulan.....	32
3.2.5. Fasilitas Perumahan.....	33
3.3. Program Penanggulangan Kemiskinan.....	35
BAB IV PENUTUP.....	39
DAFTAR PUSTAKA.....	41
LAMPIRAN.....	43

<https://jateng.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Wilayah, Maret 2011 – September 2015 45
Tabel 2	Jumlah dan Distribusi Persentase Penduduk Miskin menurut Wilayah, Maret 2011 – September 2015 45
Tabel 3	Garis Kemiskinan menurut Wilayah, Maret 2011 – September 2015 (Rupiah/Kapita/Bulan) 46
Tabel 4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurut Wilayah, Maret 2011 – September 2015 46
Tabel 5	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota, September 2011 47
Tabel 6	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota, September 2012 ¹⁾ 48
Tabel 7	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota, September 2013 ¹⁾ 49
Tabel 8	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota, September 2014 50
Tabel 9	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota, Maret 2015 51
Tabel 10	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, September 2011 52
Tabel 11	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, September 2012 53
Tabel 12	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, September 2013 54
Tabel 13	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, September 2014 55

DAFTAR TABEL (LANJUTAN)

	Halaman
Tabel 14	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Maret 2015..... 56
Tabel 15	Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota dan Golongan Umur, September 2011..... 57
Tabel 16	Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota dan Golongan Umur, September 2012..... 58
Tabel 17	Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota dan Golongan Umur, September 2013..... 59
Tabel 18	Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota dan Golongan Umur, September 2014..... 60
Tabel 19	Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota dan Golongan Umur, Maret 2015..... 61
Tabel 20	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Sektor Bekerja, September 2011..... 62
Tabel 21	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Sektor Bekerja, September 2012..... 63
Tabel 22	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Sektor Bekerja, September 2013..... 64
Tabel 23	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Sektor Bekerja, September 2014..... 65
Tabel 24	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Sektor Bekerja, Maret 2015..... 66
Tabel 25	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Status Bekerja, September 2011..... 67
Tabel 26	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Status Bekerja, September 2012..... 68
Tabel 27	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Status Bekerja, September 2013..... 69

DAFTAR TABEL (LANJUTAN)

	Halaman
Tabel 28	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Status Bekerja, September 2014..... 70
Tabel 29	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Status Bekerja, Maret 2015 71
Tabel 30	Persentase Balita (Bawah Lima Tahun) di Rumah Tangga Miskin yang Telah Diimunisasi menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Imunisasi, September 2011 72
Tabel 31	Persentase Balita (Bawah Lima Tahun) di Rumah Tangga Miskin yang Telah Diimunisasi menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Imunisasi, September 2012 73
Tabel 32	Persentase Balita (Bawah Lima Tahun) di Rumah Tangga Miskin yang Telah Diimunisasi menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Imunisasi, September 2013 74
Tabel 33	Persentase Balita (Bawah Lima Tahun) di Rumah Tangga Miskin yang Telah Diimunisasi menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Imunisasi, September 2014 75
Tabel 34	Persentase Balita (Bawah Lima Tahun) di Rumah Tangga Miskin yang Telah Diimunisasi menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Imunisasi, Maret 2015 76
Tabel 35	Persentase Pengeluaran per Kapita per Bulan untuk Makanan menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, September 2011 77
Tabel 36	Persentase Pengeluaran per Kapita per Bulan untuk Makanan menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, September 2012 78
Tabel 37	Persentase Pengeluaran per Kapita per Bulan untuk Makanan menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, September 2013 79
Tabel 38	Persentase Pengeluaran Per Kapita per Bulan untuk Makanan menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, September 2014 80
Tabel 39	Persentase Pengeluaran Per Kapita per Bulan untuk Makanan menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, Maret 2015 81
Tabel 40	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, September 2011 82
Tabel 41	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, September 2012 83
Tabel 42	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, September 2013 84

DAFTAR TABEL (LANJUTAN)

	Halaman
Tabel 43	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, September 2014..... 85
Tabel 44	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, Maret 2015 86
Tabel 45	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, September 2011 87
Tabel 46	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, September 2012 88
Tabel 47	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, September 2013 89
Tabel 48	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, September 2014 90
Tabel 49	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, Maret 2015 91
Tabel 50	Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Kabupaten/Kota dan Luas Lantai Perkapita, September 2011 92
Tabel 51	Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Kabupaten/Kota dan Luas Lantai Perkapita, September 2012 93
Tabel 52	Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Kabupaten/Kota dan Luas Lantai Perkapita, September 2013 94
Tabel 53	Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Kabupaten/Kota dan Luas Lantai Perkapita, September 2014 95
Tabel 54	Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Kabupaten/Kota dan Luas Lantai Perkapita, Maret 2015 96
Tabel 55	Persentase Rumah Tangga yang Pernah Membeli Beras Raskin, Rata-Rata Jumlah Beras Raskin dan Harga yang Dibeli oleh Rumah Tangga pada Quantile 1 menurut Kabupaten/Kota, September 2011 97

DAFTAR TABEL (LANJUTAN)

	Halaman	
Tabel 56	Persentase Rumah Tangga yang Pernah Membeli Beras Raskin, Rata-Rata Jumlah Beras Raskin dan Harga yang Dibeli oleh Rumah Tangga pada Quantile 1 menurut Kabupaten/Kota, September 2012.....	98
Tabel 57	Persentase Rumah Tangga yang Pernah Membeli Beras Raskin, Rata-Rata Jumlah Beras Raskin dan Harga yang Dibeli oleh Rumah Tangga pada Quantile 1 menurut Kabupaten/Kota, September 2013.....	99
Tabel 58	Persentase Rumah Tangga yang Pernah Membeli Beras Raskin, Rata-Rata Jumlah Beras Raskin dan Harga yang Dibeli oleh Rumah Tangga pada Quantile 1 menurut Kabupaten/Kota, September 2014.....	100
Tabel 59	Persentase Rumah Tangga yang Pernah Membeli Beras Raskin, Rata-Rata Jumlah Beras Raskin dan Harga yang Dibeli oleh Rumah Tangga pada Quantile 1 menurut Kabupaten/Kota, Maret 2015	101

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1	Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2011 – September 2015..... 19
Gambar 2	Persentase Penduduk Miskin menurut Wilayah, Maret 2011 – September 2015..... 20
Gambar 3	Distribusi Penduduk Miskin menurut Wilayah, Maret 2011 – September 2015..... 21
Gambar 4	Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota, September 2015..... 21
Gambar 5	Perkembangan Garis Kemiskinan, , Maret 2011 – September 2015 23
Gambar 6	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), , Maret 2011 – September 2015..... 23
Gambar 7	Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2, Maret 2011 – September 2015..... 25
Gambar 8	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, September 2011-Maret 2015 27
Gambar 9	Angka Melek Huruf Penduduk Miskin, September 2011-Maret 2015 27
Gambar 10	Angka Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin, September 2011-Maret 2015 28
Gambar 11	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Sektor Bekerja, September 2011-Maret 2015 29
Gambar 12	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Status Bekerja, September 2011-Maret 2015 30
Gambar 13	Persentase Balita (Bawah Lima Tahun) di Rumah Tangga Miskin yang Telah Diimuniasi menurut Jenis Imunisasi, September 2011-Maret 2015 31
Gambar 14	Persentase Pengeluaran per Kapita untuk Makanan di Rumah Tangga Miskin, September 2011-Maret 2015..... 32
Gambar 15	Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Bersih, yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama, September 2011-Maret 2015 33

DAFTAR GAMBAR (LANJUTAN)

	Halaman	
Gambar 16	Persentase Rumah Tangga Miskin dengan Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal ≤ 8 m ² , September 2011-Maret 2015.....	35
Gambar 17	Persentase Rumah Tangga pada Quantile 1 yang Pernah Membeli Beras Raskin, September 2011-Maret 2015	37
Gambar 18	Rata-rata Jumlah Beras Raskin yang Dibeli oleh Rumah Tangga pada Quantile 1, September 2011-Maret 2015.....	37
Gambar 19	Rata-rata Harga Beras Raskin yang Dibeli oleh Rumah Tangga pada Quantile 1, September 2011-Maret 2015.....	37

<https://jateng.bps.go.id>

POTRET KEMISKINAN DI JAWA TENGAH



JUMLAH PENDUDUK MISKIN

Pada Maret 2015, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah mencapai **4,577 juta jiwa**

13,58 persen



DI KABUPATEN MANAKAH PENDUDUK MISKIN TERBANYAK?

BREBES

merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbesar yakni **352 ribu** jiwa

WONOSOBO

merupakan kabupaten dengan persentase penduduk miskin terbesar yakni **21,45 %**

Tamat SD/SLTP
54,97

Persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan

< SD
35,47

Pada umumnya penduduk miskin berpendidikan rendah

SLTA +
9,56



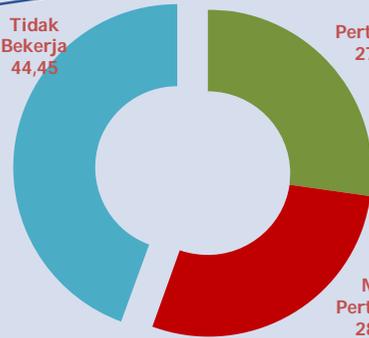
Pada umumnya penduduk miskin tidak bekerja

Persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas menurut sektor pekerjaan

Tidak Bekerja
44,45

Pertanian
27,26

Non Pertanian
28,28



74,29%

Rumah tangga miskin menggunakan jamban sendiri/bersama



7,97 %

Rumah tangga miskin hanya menempati luas rumah ≤ 8 meter persegi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan data modul konsumsi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Sejak tahun 1984, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan jumlah dan persentase penduduk miskin. Sampai dengan tahun 1987, informasi mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin hanya disajikan untuk tingkat nasional yang dipisahkan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Pada tahun 1990, informasi mengenai penduduk miskin sudah dapat disajikan sampai tingkat provinsi meskipun beberapa provinsi masih digabung. Provinsi-provinsi gabungan tersebut antara lain: Provinsi Jambi, Bengkulu, Timor Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua. Selanjutnya sejak tahun 1993, informasi mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin sudah dapat disajikan untuk seluruh provinsi. Sejak tahun 2002, BPS telah menyajikan data dan informasi kemiskinan sampai tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan data Susenas Kor (kecuali tahun 2008), pada tahun 2011 – 2014 menggunakan data gabungan Susenas Modul Konsumsi Triwulan I, II, III dan IV dan pada tahun 2015 menggunakan data Susenas Konsumsi Pengeluaran.

1.2. Tujuan Penulisan

Publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Gambaran tersebut mencakup :

- a. Untuk mengetahui jumlah dan persentase penduduk miskin menurut provinsi dan daerah (perkotaan - perdesaan) tahun 2011-2015.
- b. Untuk mengetahui karakteristik rumah tangga miskin menurut provinsi dan daerah (perkotaan-perdesaan) tahun 2011-2015.
- c. Untuk mengetahui jumlah dan persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota tahun 2011-2015.
- d. Untuk mengetahui karakteristik rumah tangga miskin menurut kabupaten/kota tahun 2011-2015.

1.3. Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan

Ruang lingkup publikasi ini mencakup tingkat kemiskinan secara provinsi menurut daerah perkotaan dan perdesaan serta tingkat kemiskinan secara kabupaten/kota. Tingkat kemiskinan secara provinsi merupakan kondisi Maret dan September sedangkan tingkat kemiskinan secara kabupaten/kota merupakan kondisi September (tahun 2011-2014) dan Maret 2015. Karakteristik rumah tangga miskin dan tidak miskin juga disajikan pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini adalah data Susenas. Tahun 2011 - 2014 menggunakan data Susenas Modul Konsumsi Gabungan Triwulan I-IV sedangkan tahun 2015 menggunakan data Susenas Konsumsi Pengeluaran Maret.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I menjelaskan latar belakang penulisan, tujuan penulisan, ruang lingkup dan data yang digunakan serta sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan tentang metodologi yang digunakan untuk penghitungan kemiskinan baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, indikator kemiskinan dan beberapa konsep dan definisi.

Bab III membahas tentang jumlah dan persentase penduduk miskin, kedalaman kemiskinan, keparahan kemiskinan, profil rumah tangga miskin menurut

kabupaten/kota serta program bantuan sosial yang telah dilaksanakan oleh pemerintah di Provinsi Jawa Tengah

Bab IV merupakan penutup yang menggaris-bawahi hal-hal penting yang diharapkan mampu memberikan gambaran umum tingkat kemiskinan dan indikator kemiskinan lainnya menurut kabupaten/kota.

<https://jateng.bps.go.id>

BAB II

METODOLOGI PENGHITUNGAN KEMISKINAN

2.1. Metodologi Penghitungan Kemiskinan

2.1.1. Konsep

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), yang diperoleh dari hasil Susenas.

2.1.2. Sumber Data

a. Tahun 2011 - 2014

Sumber data yang digunakan untuk menghitung kemiskinan di tingkat kabupaten/kota adalah data Susenas Modul Konsumsi Triwulan I, II, III dan IV. Sedangkan khusus untuk tahun 2014 data yang digunakan adalah Susenas Modul Konsumsi Triwulan I, II, III (tahun 2014) dan Triwulan IV tahun 2013. Keempat set data (Susenas triwulan I, II, III dan IV) dilakukan penggabungan sehingga jumlah sampel sekitar 300.000 rumah tangga. Data Susenas gabungan tersebut dipergunakan untuk estimasi kemiskinan tingkat kabupaten/kota.

Data Susenas modul konsumsi gabungan diolah menjadi data yang mewakili kondisi bulan September (triwulan III). Pengolahan dilakukan dengan melakukan normalisasi nilai pengeluaran konsumsi ke kondisi bulan September. Normalisasi dengan melakukan inflate/deflate (inflasi implisit) terhadap nilai pengeluaran konsumsi yang dibedakan konsumsi makanan dan bukan makanan. Tahapan normalisasi sebagai berikut :

- 1) Menentukan nilai rata-rata pengeluaran perkapita/bulan menurut basket dan non basket tiap ruta :

$$w_{ki} = \frac{1}{n_{ki}} \sum v_{jki}$$

dimana :

w_{ki} = rata-rata pengeluaran perkapita kelompok komoditi k di ruta i

n_{ki} = banyaknya jenis komoditi, kelompok komoditi k yang dikonsumsi oleh ruta i

v_{jki} = pengeluaran perkapita komoditi j di kelompok komoditi k yang dikonsumsi oleh rumah tangga i

k = kelompok komoditi (basket dan non basket)

i = rumahtangga i

j = komoditi j

- 2) Menentukan nilai rata-rata pengeluaran perkapita menurut triwulan, provinsi, daerah kota-desa dan kelompok komoditi :

$$x_{kpd t} = \frac{1}{m_{pdt}} \sum w_{kpdtr}$$

dimana:

$x_{kpd t}$ = rata-rata pengeluaran perkapita kelompok komoditi k di provinsi p daerah d triwulan t

m_{pdt} = banyaknya rumah tangga di provinsi p daerah d triwulan t

w_{kpdtr} = pengeluaran perkapita ruta r untuk kelompok komoditi k di provinsi p daerah d triwulan t

k = kelompok komoditi (basket dan non basket)

r = rumah tangga r

- 3) Menentukan faktor koreksi (*inflasi implicit*) terhadap triwulan 3 menurut provinsi, daerah kota-desa, dan basket komoditi :

$$inf_{kpd t} = \frac{x_{kpd t}}{x_{kpd 3}}$$

di mana:

$inf_{kpd t}$ = faktor inflasi implisit kelompok k di provinsi p daerah d triwulan t

- $x_{kpd\text{t}}$ = rata-rata pengeluaran perkapita kelompok komoditi k di provinsi p daerah d triwulan t
- x_{kpd3} = rata-rata pengeluaran perkapita kelompok komoditi k di provinsi p daerah d triwulan 3

- 4) *Inflate/deflate* pengeluaran konsumsi (kondisi September) tiap komoditi menurut provinsi, kota-desa, dan kelompok komoditi dan periode :

$$v'_{jikpdt} = v_{jikpdt} \times inf_{kpd\text{t}}$$

di mana:

v_{jikpdt} = nilai pengeluaran perkapita komoditi j di ruta i

v'_{jikpdt} = nilai penyesuaian pengeluaran perkapita komoditi j di ruta i

Keterangan :

ruta = rumah tangga

b. Tahun 2015

Sumber data yang digunakan untuk menghitung kemiskinan di tingkat kabupaten/kota adalah data Susenas Konsumsi Pengeluaran Maret 2015. Penimbang yang digunakan menggunakan hasil proyeksi penduduk dari data Sensus Penduduk 2010.

2.1.3. Metode

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), secara formula adalah sebagai berikut :

$$GK = GKM + GKNM$$

Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaaan.

2.1.4. Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi

Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (*reference population*) yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marjinal. GKS dihitung berdasarkan GK periode sebelumnya yang di-*inflate* dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Garis kemiskinan makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah :

$$GKM_j = \sum_{k=1}^{52} P_{jk} \cdot Q_{jk} = \sum_{k=1}^{52} V_{jk}$$

Keterangan :

- GKM_j = Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2.100 kilokalori)
- P_{jk} = Harga komoditi k di daerah j
- Q_{jk} = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j
- V_{jk} = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j
- j = Daerah (perkotaan atau perdesaaan)

Selanjutnya GKM_j tersebut disetarakan dengan 2.100 kilokalori dengan mengalikan 2.100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga :

$$\overline{HK}_j = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jk}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jk}}$$

Keterangan :

K_{jk} = Kalori dari komoditi k di daerah j

\overline{HK}_j = Harga rata-rata kalori di daerah j

$$F_j = \overline{HK}_j \times 2100$$

Keterangan :

F_j = Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di perdesaan. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di perdesaan.

Nilai kebutuhan minimum per komoditi/sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKD 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non makanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas modul konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$NF_p = \sum_{i=1}^n r_i \times V_i$$

Keterangan :

- NF_p = Pengeluaran minimum non makanan atau garis kemiskinan non makanan daerah p ($GKNM_p$)
- V_i = Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan i di daerah p (dari Susenas Modul Konsumsi)
- r_i = Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan i menurut daerah (hasil SPKKD 2004)
- i = Jenis komoditi non makanan terpilih di daerah p
- p = Daerah (perkotaan atau perdesaaan)

Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non-Makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

2.1.5. Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan Tingkat Kabupaten/Kota

- 1) Menentukan penduduk referensi yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). GKS adalah GK periode lalu yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
- 2) GKM adalah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita per hari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung GKM adalah :

$$GKM_j = \sum_{k=1}^{52} P_{jk} \cdot Q_{jk} = \sum_{k=1}^{52} V_k$$

di mana:

GKM_j = GKM daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori).

P_{jk} = harga komoditi k di daerah j.

Q_{jk} = rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j.

V_{jk} = nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j.

J = daerah (perkotaan atau perdesaaan).

- 3) GKM disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2.100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga :

$$\overline{HK}_j = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jk}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jk}}$$

di mana:

K_{jk} = kalori dari komoditi k di daerah j.

\overline{HK}_j = harga rata-rata kalori di daerah j.

$$GKM_j = \overline{HK}_j \times 2100$$

di mana:

GKM = kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2100 kilokalori/kapita/hari atau GKM.

j = daerah (perkotaan/perdesaan).

- 4) GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/sub kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Dasar 2004 (SPKKD 2004) yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non makanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas modul konsumsi.
- 5) Nilai kebutuhan minimum non makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$GKNM_p = \sum_{i=1}^n r_i v_i$$

di mana:

$GKNM_p$ = pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non-makanan daerah p

V_i = nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah p (dari Susenas modul konsumsi).

r_i = rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan menurut daerah (hasil SPKKD 2004).

- i = jenis komoditi non-makanan terpilih di daerah p .
 p = daerah (perkotaan/perdesaan).

- 6) GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin.
- 7) Selanjutnya dihitung jumlah penduduk di bawah GK untuk tingkat kabupaten/kota.
- 8) Melakukan *prorate* jumlah penduduk miskin kabupaten/kota yang diperoleh pada langkah sebelumnya, terhadap jumlah penduduk miskin provinsi.
- 9) Dari jumlah penduduk miskin yang diperoleh dari hasil *prorate*, maka dihitung persentase penduduk miskin dan Garis Kemiskinan (GK) dari seluruh kabupaten/kota. Penghitungan GK kabupaten/kota dilakukan sebagai dasar dalam penghitungan indeks kedalaman kemiskinan/*poverty gap index* (P_1).

2.2. Indikator Kemiskinan

Head Count Index (HCI - P_0) yaitu persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* P_1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index* P_2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Foster-Greer-Thorbecke/FGT (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Keterangan:

- α = 0, 1, 2
 z = garis kemiskinan
 y_i = rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$
 q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
 n = jumlah penduduk

Jika $\alpha = 0$ maka diperoleh *Head Count Index* (P_0); jika $\alpha = 1$ diperoleh Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* P_1) dan $\alpha = 2$ adalah Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index* P_2).

2.3. Beberapa Konsep dan Definisi

2.3.1. Pendidikan

- Pendidikan yang ditamatkan** adalah proporsi seluruh kepala rumah tangga berumur 15 tahun ke atas menurut ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki. Publikasi ini mengelompokkan ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki menjadi tiga, yaitu tidak mempunyai ijazah, mempunyai ijazah SD atau SLTP dan mempunyai ijazah minimal SLTA khusus untuk kepala rumah tangga miskin.
- Angka Melek Huruf (AMH)** adalah proporsi seluruh penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam aksara tertentu. Publikasi ini hanya menyajikan angka melek huruf penduduk miskin menurut kelompok umur 15 – 24 tahun dan 15 – 55 tahun. Melek huruf yang dimaksudkan di sini adalah melek huruf latin, atau huruf arab, atau huruf lainnya.
- Angka Partisipasi Sekolah (APS)** adalah proporsi dari seluruh penduduk miskin menurut berbagai kelompok umur tertentu (misalnya: 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun, dan 19-24 tahun) yang masih duduk di bangku sekolah. Publikasi ini hanya menyajikan angka partisipasi sekolah penduduk miskin pada kelompok umur 7 – 12 tahun dan 13 – 15 tahun yang dapat digunakan untuk melihat indikasi umum dari pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 tahun.

2.3.2. Ketenagakerjaan

- a. **Bekerja** adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu. Penduduk yang dicatat untuk publikasi ini khusus penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas.
- b. **Bekerja di sektor informal** adalah proporsi penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas yang mempunyai status/kedudukan dalam pekerjaan utama adalah berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, atau pekerja keluarga/tidak dibayar.
- c. **Bekerja di sektor formal** adalah proporsi penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas yang mempunyai status/kedudukan dalam pekerjaan utama adalah berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar atau buruh/karyawan/pegawai.
- d. **Bekerja di sektor pertanian** adalah proporsi penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian tanaman padi dan palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan pertanian lainnya.
- e. **Bekerja bukan di sektor pertanian** adalah proporsi penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selain di sektor pertanian.
- f. Kategori "**Tidak bekerja**" dalam publikasi ini termasuk pengangguran dan penduduk bukan angkatan kerja.

2.3.3. Kesehatan

Imunisasi atau vaksinasi adalah memasukkan kuman atau racun penyakit tertentu yang sudah dilemahkan (vaksin) ke dalam tubuh bayi di bawah lima tahun (balita) dengan cara disuntik atau diminum (diteteskan ke dalam mulut), dengan maksud agar terjadi kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu.

Persentase balita yang telah diimunisasi adalah proporsi balita di rumah tangga miskin yang sudah mendapatkan imunisasi. Jenis imunisasi yang dicakup dalam publikasi ini adalah Bacilus Calmette Guerin (BCG), Difteri Pertusis Tetanus (DPT), campak/morbili, dan hepatitis B.

2.3.4. Pengeluaran Perkapita

Persentase pengeluaran per kapita untuk makanan adalah proporsi pengeluaran perkapita/bulan untuk makanan dibagi dengan pengeluaran perkapita/bulan total (untuk makanan dan non makanan).

2.3.5. Fasilitas Perumahan

- a. **Rumah tangga pengguna air bersih** adalah persentase rumah tangga yang menggunakan air minum yang berasal dari air kemasan bermerk, air isi ulang, air leding/PAM, sumur bor/pompa, sumur terlindung atau mata air terlindung (dengan jarak ke penampungan limbah/kotoran/tinja lebih dari atau sama dengan 10 meter).
- b. **Rumah tangga pengguna jamban sendiri/bersama** adalah persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat pembuangan air besar yang digunakan oleh rumah tangga itu sendiri atau bersama dengan rumah tangga tertentu.
- c. **Luas lantai per kapita** adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap). Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam perhitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, lantai jemur (hamparan semen) dan ruangan khusus untuk usaha (misalnya warung). Untuk bangunan bertingkat, luas lantai adalah jumlah luas dari semua tingkat yang ditempati.
Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa sebuah rumah dikategorikan sebagai rumah sehat apabila luas lantai per kapita yang ditempati minimal sebesar 8 m². Sedangkan *World Health Organisation* (WHO) dan *American Public Health Association* (APHA) mensyaratkan luas lantai per kapita minimal 10 m². Kategori luas lantai per kapita yang digunakan dalam publikasi ini adalah kurang dari atau sama dengan 8 m², 9m² sampai 15 m², dan lebih dari 15 m².

2.3.6. Program Pemerintah

- a. **Raskin / Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin)** adalah salah satu program pemerintah untuk rakyat miskin yang diselenggarakan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) yaitu menjual beras dengan harga murah bersubsidi.

Rumah tangga Quantile 1 merupakan kelompok rumah tangga yang berada di bawah 20 persen kelompok pengeluaran terbawah.

2.3.7. Inflasi

- a. **Indeks Harga Konsumen (IHK)** merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang dan jasa yang dibayar oleh konsumen atau masyarakat, khususnya masyarakat perkotaan.

IHK mengukur perubahan pengeluaran/biaya barang dan jasa (paket komoditi) yang biasa dibeli oleh mayoritas rumah tangga dari waktu ke waktu. Dengan kualitas dan kuantitas paket komoditas yang dianggap konstan pada tahun dasar, indeks tersebut semata-mata mencerminkan perubahan harga dan didesain sebagai suatu ukuran dari dampak perubahan harga pada pembelian barang dan jasa. **Inflasi** dihitung dengan menggunakan metode "*point to point*" yaitu dengan membandingkan IHK dari periode sebelumnya.

- b. **Kelompok referensi** adalah kelompok rumah tangga sebanyak 20 persen dimana pengeluaran per kapita per bulan nya di atas garis kemiskinan sementara (merujuk pada metode penghitungan kemiskinan untuk bulan Maret Susenas Modul Konsumsi) dengan basket komoditi hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004. Kelompok rumah tangga ini diwakili oleh 20 persen kelompok terbawah penduduk tidak miskin.

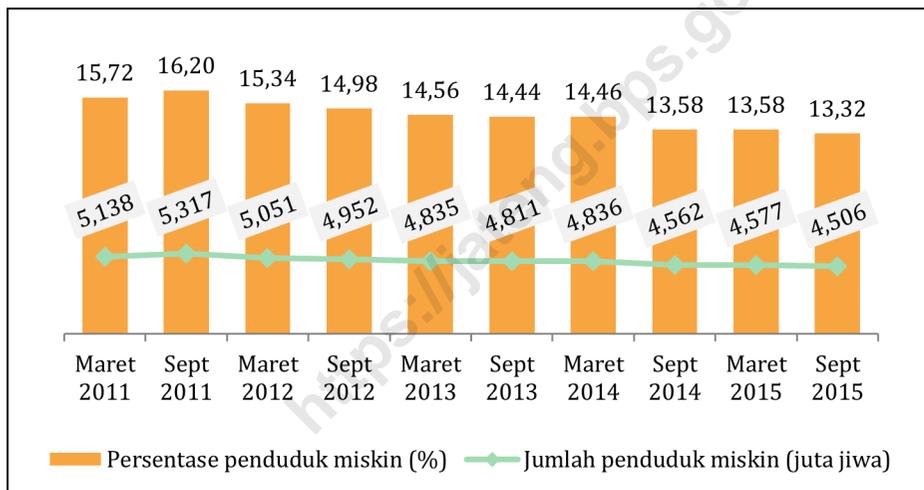
BAB III

KONDISI KEMISKINAN JAWA TENGAH

3.1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan

3.1.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 2011 – 2015 terlihat mempunyai kecenderungan menurun dari tahun ke tahun. Pada periode Maret – September 2011 mengalami sedikit kenaikan, namun terjadi penurunan kembali pada September 2011 –Maret 2015 (Gambar 1).

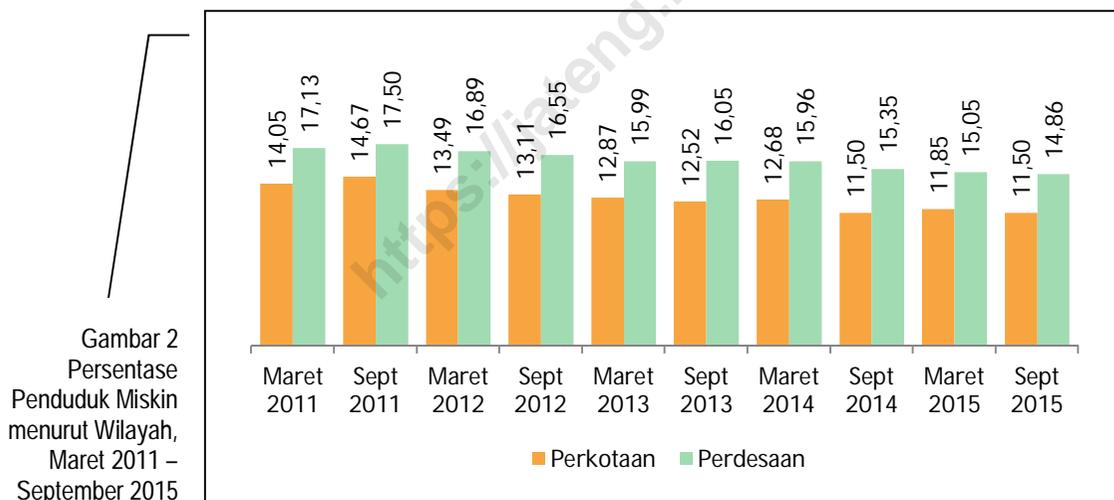


Gambar 1
Perkembangan
Jumlah dan
Persentase
Penduduk Miskin,
Maret 2011 –
September 2015

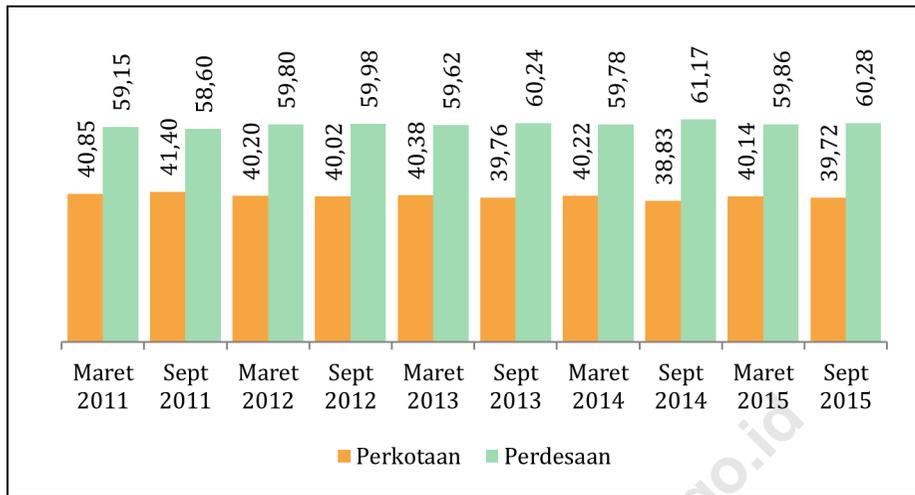
Pada periode Maret 2011 – September 2015 jumlah penduduk miskin menurun sebesar 631,9 ribu jiwa yaitu dari 5,138 juta jiwa pada Maret 2011 menjadi 4,506 juta jiwa pada September 2015. Sementara itu, persentase penduduk miskin menurun dari 15,72 persen menjadi 13,32 persen pada periode yang sama. Namun, pada periode Maret 2011 – September 2011 sempat terjadi pertambahan jumlah penduduk miskin sebesar 179,7 ribu jiwa, yaitu dari 5,138 juta jiwa pada Maret 2011 menjadi 5,317 juta jiwa pada September 2011. Akibatnya persentase penduduk miskin juga meningkat dari 15,72 persen menjadi 16,20 persen. Pada periode September 2011 – September 2013, jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami penurunan kembali yaitu dari 5,317 juta jiwa

(16,20 persen) pada September 2011 menjadi 4,811 juta jiwa (14,44 persen) pada September 2013. Peningkatan terjadi juga pada September 2013-Maret 2014 dari 14,44 persen menjadi 14,46 persen. Namun pada Maret 2014 - September 2015 kembali menunjukkan penurunan menjadi sebesar 13,32 persen (Lampiran Tabel 1 dan Gambar 1).

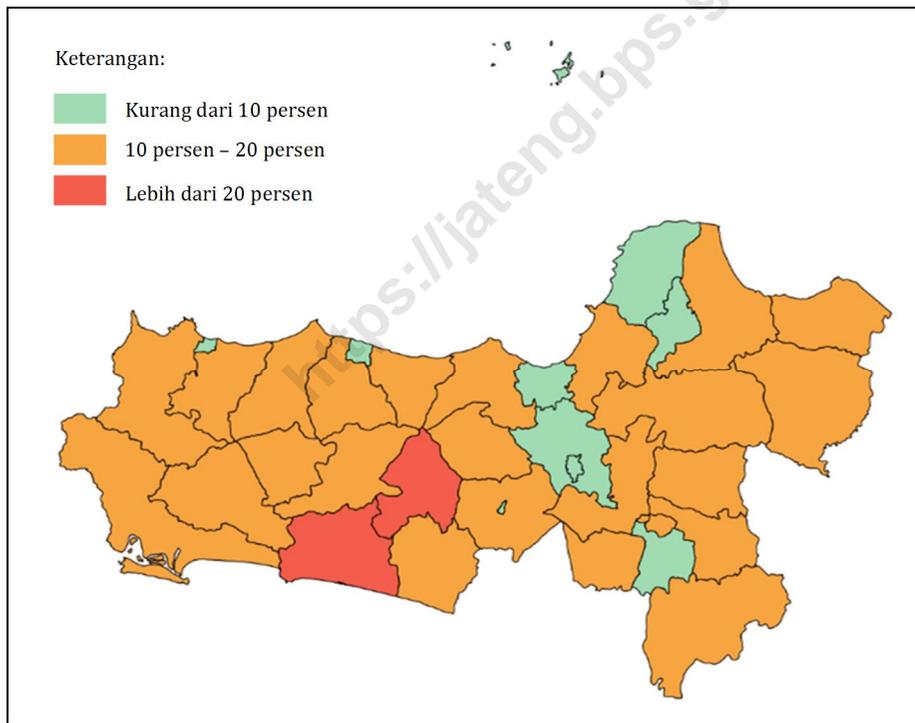
Bila dilihat menurut wilayah, secara umum terlihat bahwa pada kurun waktu antara Maret 2011 – September 2015, penduduk miskin di perdesaan selalu lebih besar dibandingkan dengan daerah perkotaan. Meskipun secara jumlah dan persentase sebenarnya mengalami penurunan (Gambar 2). Pada Maret 2011 persentase penduduk miskin di perdesaan mencapai 17,13 persen, sedangkan di perkotaan hanya sebesar 14,05 persen. Demikian juga pada September 2015 persentase penduduk miskin di perdesaan sebesar 14,86 persen sedangkan di perkotaan sebesar 11,50 persen (Lampiran Tabel 1).



Pada periode Maret 2011 – September 2015, sebagian besar penduduk miskin di Jawa Tengah tersebar di wilayah perdesaan yaitu sebesar 3,04 juta jiwa atau 59,15 persen pada Maret 2011 dan 2,72 juta jiwa atau 60,28 persen pada September 2015 (Lampiran Tabel 2 dan Gambar 3).



Gambar 3
Distribusi
Penduduk Miskin
menurut Wilayah,
Maret 2011 –
September 2015



Gambar 4
Persentase
Penduduk Miskin
menurut
Kabupaten/Kota,
Maret 2015

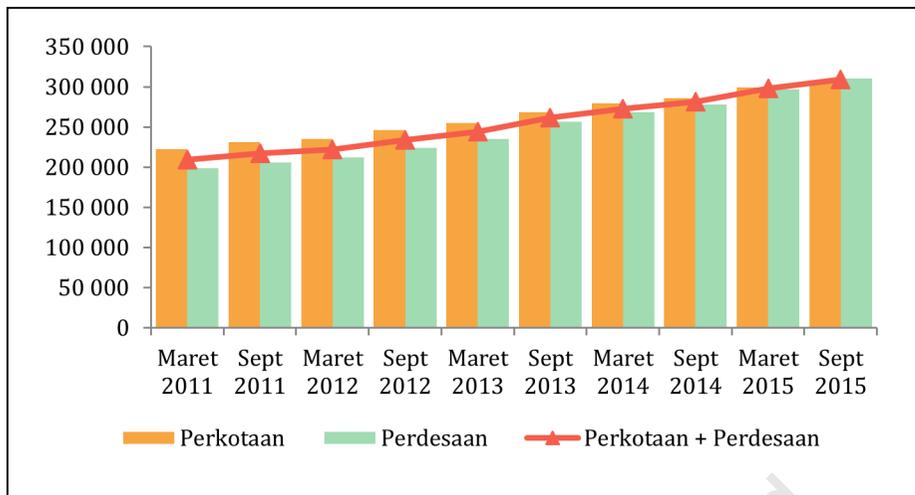
Pada September 2014, jumlah kabupaten/kota yang terkategori sebagai kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskinnya kurang dari 10 persen sejumlah 10 (sepuluh) kabupaten/kota. Sedangkan pada September 2015, jumlah kabupaten/kota yang terkategori sebagai

kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskinnya kurang dari 10 persen sejumlah 9 (sembilan) kabupaten/kota, yaitu Kota Semarang (4,97 persen), Kota Salatiga (5,80 persen), Kabupaten Kudus (7,73 persen), Kota Pekalongan (8,09 persen), Kabupaten Semarang (8,15 persen), Kota Tegal (8,26 persen), Kabupaten Jepara (8,50 persen), Kota Magelang (9,05 persen) dan Kabupaten Sukoharjo (9,26 persen) (Lampiran Tabel 8-9 dan Gambar 4).

3.1.2. Garis Kemiskinan

Perkembangan garis kemiskinan pada periode Maret 2011 – September 2015 terlihat mempunyai kecenderungan meningkat (Gambar 5). Pada periode Maret 2011 –September 2015 garis kemiskinan meningkat sebesar 99 ribu rupiah/kapita/bulan yaitu dari 209.611 rupiah/kapita/bulan pada Maret 2011 menjadi 309.314 rupiah/kapita/bulan pada September 2015 (Lampiran Tabel 3 dan Gambar 5). Pada periode Maret 2011 - September 2015 garis kemiskinan di daerah perkotaan lebih tinggi dari pada di daerah perdesaan.

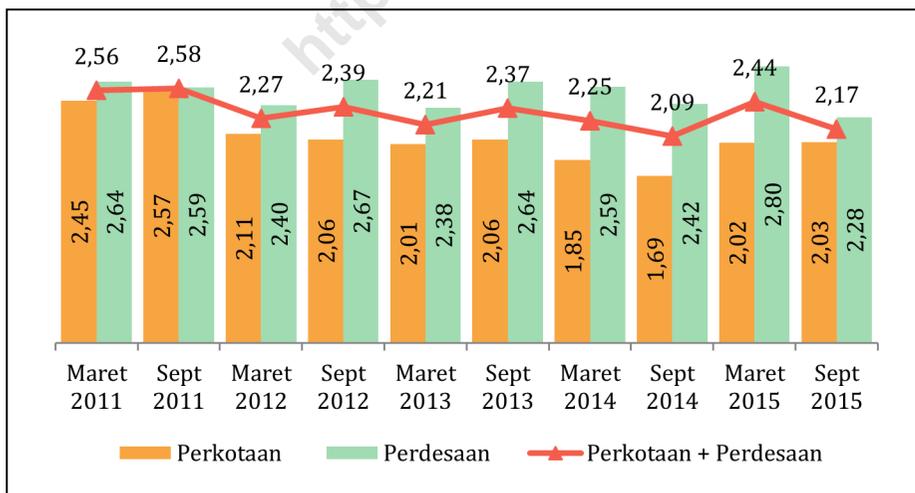
Pada September 2015, garis kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah terdapat di Kota Surakarta yaitu sebesar 406.840 rupiah/kapita/bulan, diikuti oleh Kota Magelang (405.228 rupiah/ kapita/bulan) dan Kota Tegal (371.528 rupiah/ kapita/ bulan). Sedangkan garis kemiskinan terendah terdapat di Kabupaten Batang sebesar 224.437 rupiah/kapita/bulan (Lampiran Tabel 9).



Gambar 5
Perkembangan
Garis
Kemiskinan,
Maret 2011 –
September 2015

3.1.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.



Gambar 6
Perkembangan
Indeks
Kedalaman
Kemiskinan (P1),
Maret 2011 –
September 2015

Secara umum indeks kedalaman kemiskinan pada periode Maret 2011 - September 2015 berfluktuasi. Dapat dilihat bahwa indeks

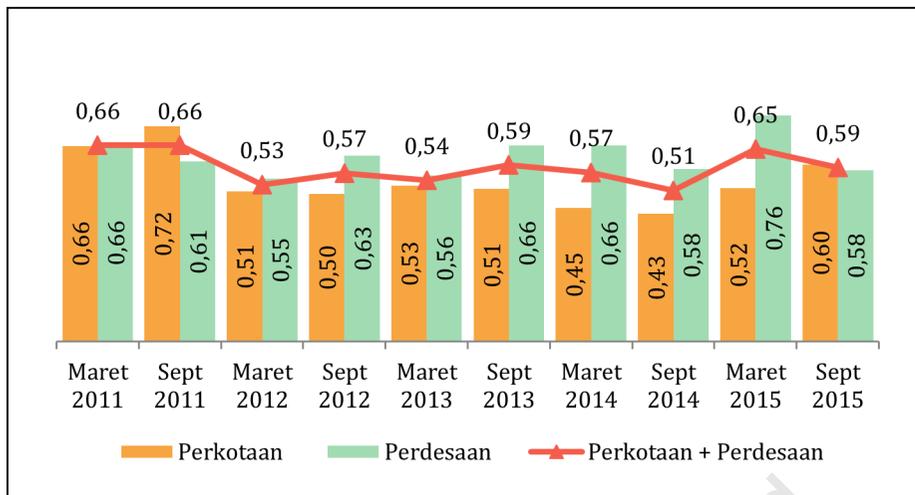
kedalaman kemiskinan cenderung menurun dari 2,56 pada Maret 2011 menjadi 2,17 pada September 2015. Akan tetapi patut dicatat terjadi peningkatan indeks kedalaman kemiskinan pada periode Maret 2010 - September 2011 (dari 2,49 menjadi 2,58), pada periode Maret - September 2012 (dari 2,27 menjadi 2,39), dan pada periode Maret-September 2013 (dari 2,21 menjadi 2,37).

Ditinjau menurut daerah, pada periode yang sama tampak bahwa indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan dan di perdesaan juga menunjukkan kecenderungan menurun. Indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan menurun dari 2,45 pada Maret 2011 menjadi 2,03 pada September 2015. Demikian pula di perdesaan menurun dari 2,64 pada Maret 2011 menjadi 2,28 pada September 2015 (Lampiran Tabel 4 dan Gambar 6).

Pada September 2015, kabupaten/kota dengan nilai indeks kedalaman kemiskinan tertinggi adalah di Kabupaten Wonosobo sebesar 4,74, diikuti Kabupaten Kebumen (4,08) dan Kabupaten Pemasang (3,93). Sedangkan kabupaten/kota dengan indeks kedalaman kemiskinan terendah adalah Kota Semarang yaitu sebesar 0,50, yang diikuti oleh Kota Pekalongan dan Kabupaten Kudus masing-masing sebesar 0,83 dan 0,90 (Lampiran Tabel 9).

3.1.4. Indeks Keparahan Kemiskinan

Secara umum indeks keparahan kemiskinan pada periode Maret 2011 - September 2015 berfluktuasi. Dapat dilihat bahwa indeks keparahan kemiskinan cenderung menurun dari 0,66 pada Maret 2011 menjadi 0,59 pada September 2015. Akan tetapi patut dicatat terjadi peningkatan indeks keparahan kemiskinan pada periode Maret 2010 - Maret 2011 (dari 0,60 menjadi 0,66), pada periode Maret 2012 - September 2012 (dari 0,53 menjadi 0,57) dan pada periode Maret 2013 - September 2013 (dari 0,54 menjadi 0,59).



Gambar 7
Perkembangan
Indeks
Keparahan
Kemiskinan (P2),
Maret 2011 –
September 2015

Ditinjau menurut daerah, pada periode yang sama tampak bahwa indeks keparahan kemiskinan di perkotaan dan di pedesaan juga menunjukkan kecenderungan menurun. Indeks keparahan kemiskinan di perkotaan menurun dari 0,66 pada Maret 2011 menjadi 0,60 pada September 2015. Demikian pula di pedesaan menurun dari 0,66 pada Maret 2011 menjadi 0,58 pada September 2015 (Gambar 7).

Pada Maret 2015, kabupaten/kota dengan nilai indeks keparahan kemiskinan tertinggi adalah di Kabupaten Wonosobo sebesar 1,60, diikuti Kabupaten Pemasang (1,24) dan Kabupaten Kebumen (1,19). Sedangkan kabupaten/kota dengan indeks keparahan kemiskinan terendah adalah Kota Semarang yaitu sebesar 0,09, yang diikuti oleh Kota Pekalongan dan Kudus masing-masing sebesar 0,15 dan 0,17 (Lampiran Tabel 9).

3.2. Karakteristik Penduduk Miskin

3.2.1. Pendidikan

Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat manusia. Mendidik dan memberikan pengetahuan berarti menggapai masa depan. Hal tersebut harusnya menjadi semangat untuk terus melakukan upaya mencerdaskan bangsa (Chriswardani Suryawati, 2005).

Pendidikan yang diukur dengan jumlah penduduk yang lulus pendidikan SMP, SMA, dan diploma memiliki pengaruh besar dan signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Ini mencerminkan bahwa pembangunan modal manusia (human capital) melalui pendidikan merupakan determinan penting untuk menurunkan jumlah penduduk miskin (Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, 2008).

Sejak tahun 1970-an pemerintah Indonesia mulai memperlihatkan perhatiannya secara lebih terencana terhadap bidang pendidikan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengembangkan pendidikan di Indonesia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Demikian pula partisipasi masyarakat dalam pendidikan terus meningkat. Kesemuanya itu berangkat dari kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

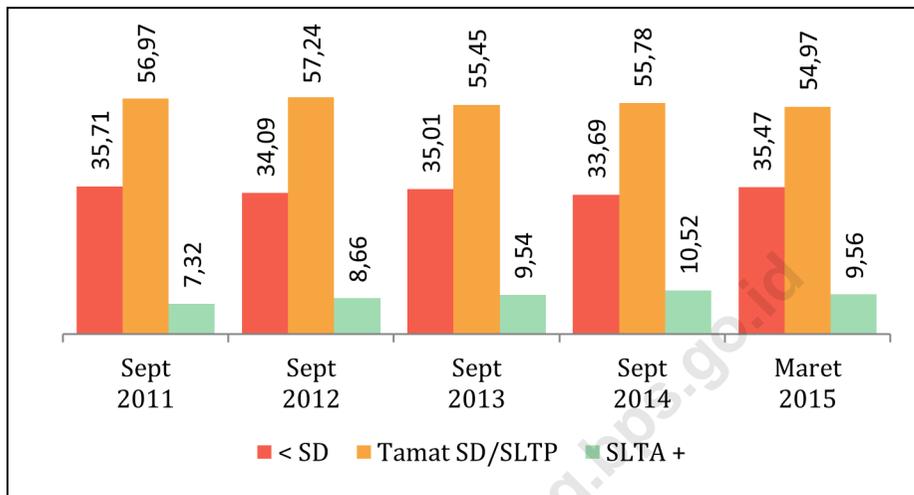
Bagi pemerintah keuntungan yang akan diperoleh dari investasi di bidang pendidikan antara lain bahwa pendidikan merupakan salah satu cara dalam rangka memerangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Sedangkan bagi masyarakat, pendidikan yang semakin baik merupakan modal dalam memperebutkan kesempatan kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan mereka.

Untuk memperoleh gambaran pembangunan pendidikan di Jawa Tengah, khususnya yang berkaitan dengan kesempatan pendidikan telah dirasakan oleh masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator pendidikan seperti pendidikan tertinggi yang ditamatkan, Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah. Beberapa indikator pendidikan untuk penduduk miskin disajikan pada Lampiran Tabel 10 – 19.

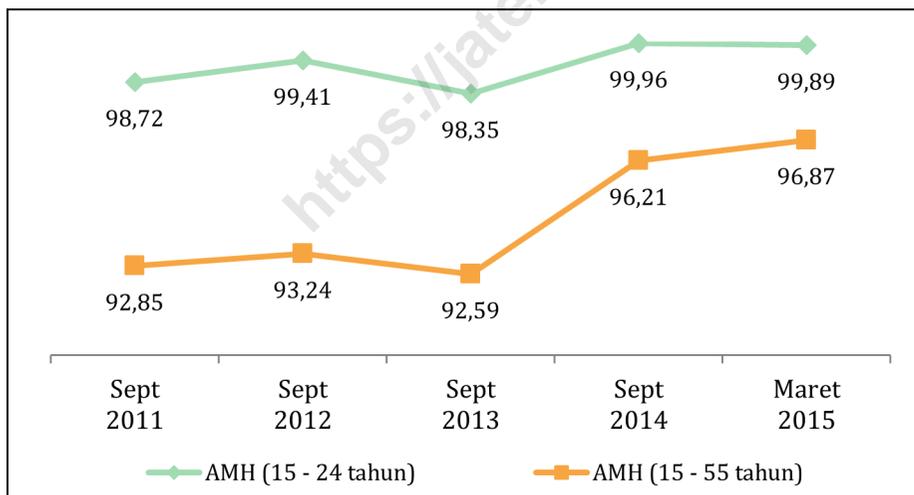
Pada September 2011–Maret 2015, pendidikan tertinggi sebagian besar penduduk miskin usia 15 tahun ke atas cenderung tamat SD/SLTP yaitu sebesar 56,97 persen pada September 2011 dan 54,97 persen pada Maret 2015. Sedangkan untuk pendidikan tertinggi SLTA ke atas mengalami peningkatan sebesar dari 7,32 persen pada September 2011 menjadi 9,56 persen pada Maret 2015 (Gambar 8).

Pada September 2011–Maret 2015, AMH penduduk miskin baik untuk kelompok usia 15-24 tahun maupun untuk kelompok usia 15-

55 tahun fluktuatif mengalami penurunan. AMH penduduk miskin untuk kelompok usia 15-24 tahun sebesar 98,72 pada September 2011 menjadi 99,86 pada Maret 2015. Sedangkan untuk kelompok usia 15-55 tahun dari 92,85 menjadi 96,87 pada periode yang sama (Gambar 9).



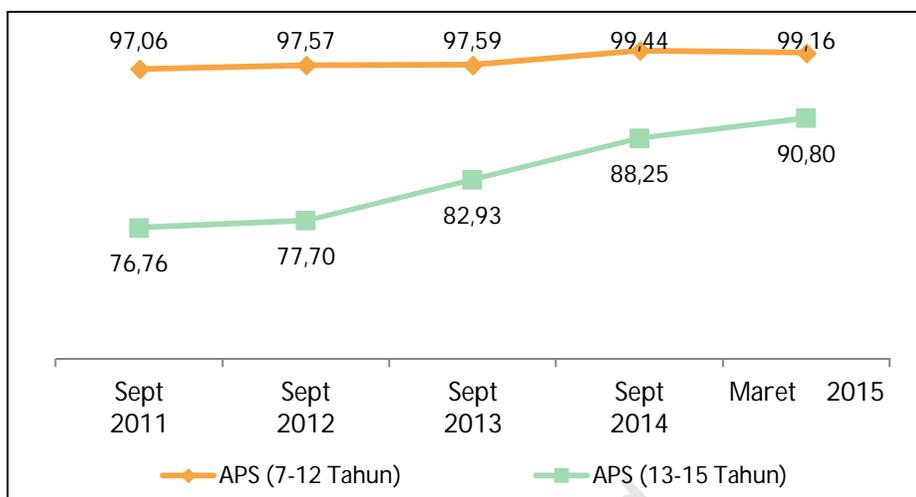
Gambar 8
Persentase
Penduduk Miskin
Usia 15 Tahun ke
Atas menurut
Pendidikan
Tertinggi yang
Ditamatkan,
September 2011 –
Maret 2015



Gambar 9
Angka Melek Huruf
Penduduk Miskin,
September 2011 –
Maret 2015

Dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo merupakan kabupaten/kota dengan AMH penduduk miskin kelompok usia 15 – 24 tahun yang paling rendah pada Maret 2015 yaitu sebesar 97,04 persen. Sedangkan Kabupaten Blora merupakan kabupaten dengan AMH penduduk miskin kelompok usia 15 – 55 tahun yang paling rendah yaitu sebesar 89,79 persen (Lampiran Tabel 19).

Gambar 10
Angka Angka
Partisipasi
Sekolah
Penduduk Miskin,
September 2011 –
Maret 2015

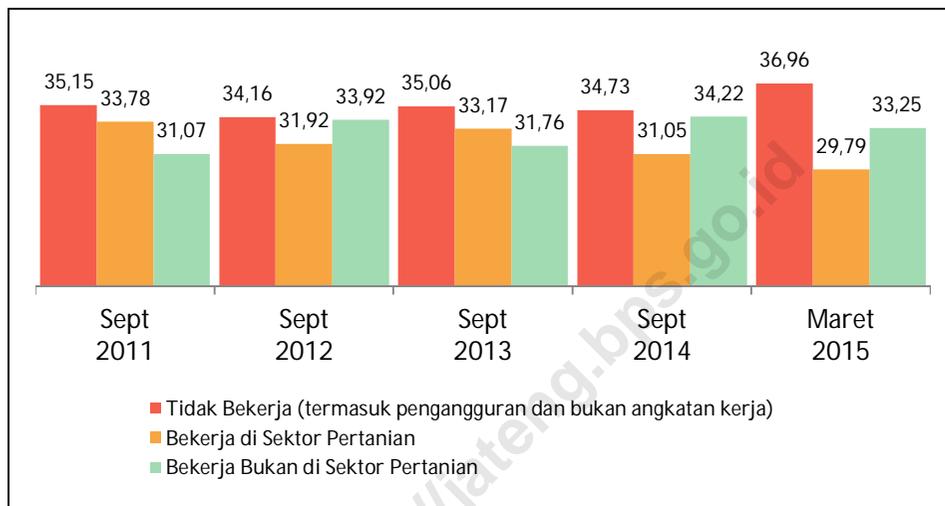


Indikator pendidikan lain adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). Pada periode September 2011–Maret 2015, APS penduduk miskin di Jawa Tengah untuk kelompok usia 7 – 12 cenderung stabil yaitu berkisar di angka 97,06 dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 99,16. Sedangkan APS penduduk miskin untuk kelompok usia 13-15 tahun mengalami peningkatan pada periode yang sama yaitu dari 76,76 menjadi 90,80. APS penduduk miskin pada kelompok usia 7 – 12 tahun relatif sudah cukup merata di seluruh kabupaten/kota yaitu sudah mencapai lebih dari 90 persen pada Maret 2015. Berbeda dengan kelompok usia 7 – 12 tahun, APS penduduk miskin pada kelompok usia 13 – 15 tahun terlihat cukup bervariasi antar kabupaten/kota. Sebagai contoh pada Maret 2015 tercatat APS penduduk miskin beberapa kabupaten/kota mencapai 100 dan yang terendah tercatat di Kabupaten Banyumas sebesar 63,72 (Lampiran Tabel 15-19 dan Gambar 10).

3.2.2. Ketenagakerjaan

Sumber penghasilan utama rumah tangga menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang diharapkan dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi suatu rumah tangga. Cerminan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat dari status miskin atau tidak miskin suatu rumah tangga yang ditentukan dari rata-rata pengeluaran per kapita per bulan suatu rumah tangga.

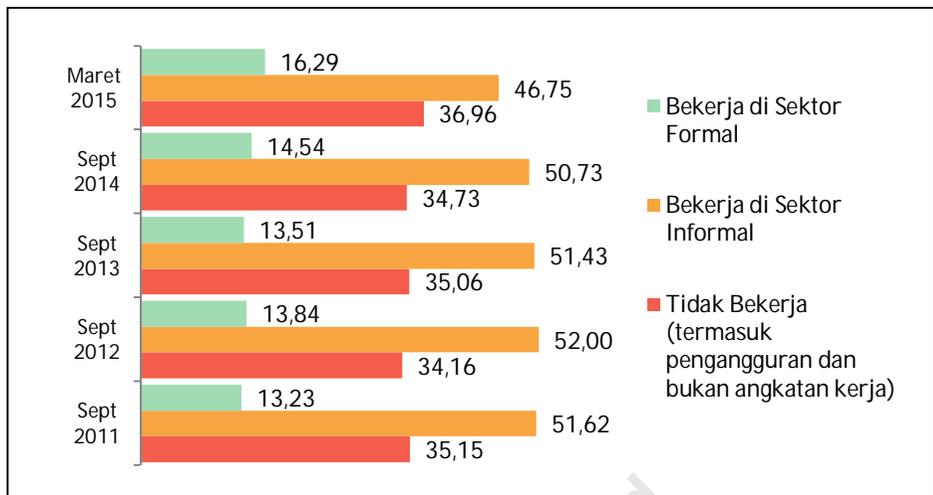
Salah satu karakteristik ketenagakerjaan yang dapat menggambarkan adanya perbedaan antara rumah tangga miskin dan tidak miskin adalah lapangan usaha atau sektor yang menjadi sumber penghasilan utama rumah tangga. Profil orang miskin seringkali melekat dengan mereka yang bekerja di sektor pertanian, seperti petani gurem, nelayan, buruh tani dan perkebunan, serta pencari kayu dan madu di hutan.



Gambar 11
Persentase
Penduduk Miskin
Usia 15 Tahun ke
Atas menurut
Sektor Bekerja,
September 2011 –
Maret 2015

Informasi mengenai penduduk yang bekerja disajikan pada Lampiran Tabel 20 – 29. Berdasarkan penghitungan dari data Susenas, persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja (termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja) mengalami peningkatan sebesar dari 35,15 persen pada September 2011 menjadi 36,96 persen pada Maret 2015 (Gambar 11). Sedangkan persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas pada Maret 2015 yang bekerja di sektor pertanian sebesar 29,79 persen dan yang bekerja bukan di sektor pertanian sebesar 33,25 persen. Persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja yang tertinggi adalah Kabupaten Tegal yaitu sebesar 50,09 persen. Persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian yang tertinggi terdapat di Kabupaten Wonogiri yaitu sebesar 58,86 persen sedangkan yang bekerja bukan di sektor pertanian yang tertinggi di Kota Surakarta yaitu sebesar 69,66 persen.

Gambar 12
 Persentase
 Penduduk Miskin
 Usia 15 Tahun ke
 Atas menurut
 Status Bekerja,
 September 2011 –
 Maret 2015



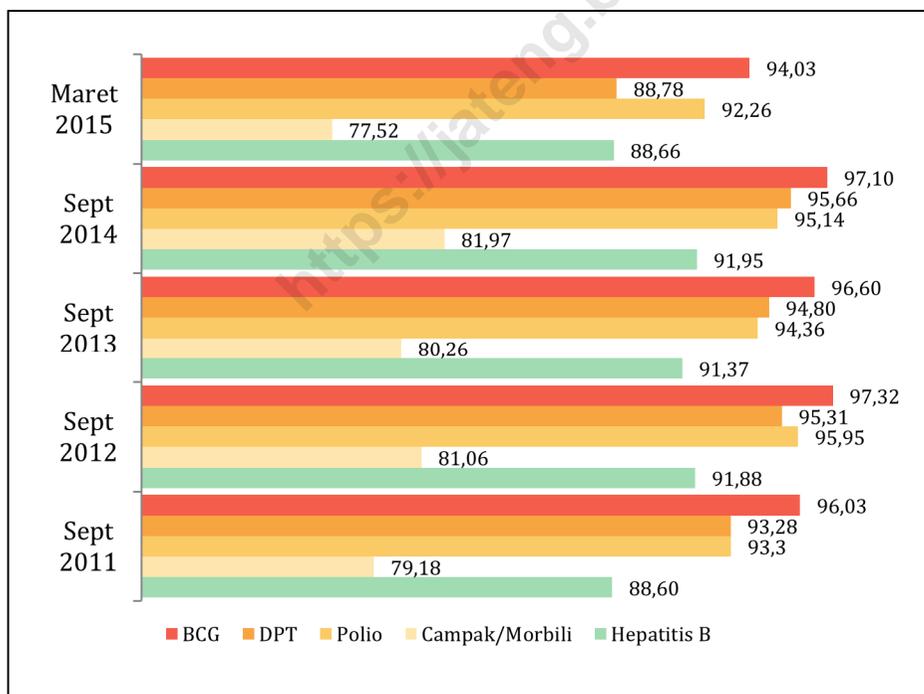
Pada September 2011, sebagian besar penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja adalah bekerja di sektor informal yaitu sebesar 51,62 persen. Sedangkan yang bekerja di sektor formal hanya sekitar 13,23 persen. Hal ini tidak berbeda jauh dengan kondisi Maret 2015, dimana penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor informal sebesar 46,75 persen dan yang bekerja di sektor formal sebesar 16,29 persen (Gambar 12). Persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor informal pada Maret 2015 yang tertinggi terdapat di Kabupaten Wonosobo yaitu sebesar 65,64 persen dan yang terendah di Kota Pekalongan yaitu sebesar 13,93 persen. Sedangkan yang bekerja di sektor formal yang tertinggi di Kota Pekalongan yaitu sebesar 47,75 persen dan yang terendah di Kabupaten Grobogan yaitu sebesar 5,42 persen (Lampiran Tabel 29).

3.2.3. Kesehatan

Salah satu aspek penting ukuran tingkat kesejahteraan rakyat adalah derajat kesehatan penduduk. Semakin baik derajat kesehatan ini dapat dilihat dari sisi individu, keluarga dan lingkungan. Beberapa indikator kesehatan di tingkat individu adalah seperti pemberian imunisasi pada balita, dan penolong persalinan oleh tenaga kesehatan.

Pada usia bayi terdapat beberapa penyakit infeksi yang dapat menimbulkan kematian atau kecacatan, yaitu poliomyelitis, campak, batuk rejan, tetanus, tuberkulosis (TB) dan Hepatitis B. Penyakit-penyakit tersebut dapat dicegah dengan imunisasi dan mempertahankan status gizi yang baik. Lampiran Tabel 30-34 dapat memberikan gambaran tentang beberapa indikator kesehatan di rumah tangga miskin menurut kabupaten/kota.

Jenis imunisasi yang telah diberikan kepada balita di rumah tangga miskin yang paling sedikit adalah campak/morbili yaitu hanya sebesar 79,18 persen balita di rumah tangga miskin yang telah diimunisasi campak/morbili pada September 2011 dan sebesar 77,52 persen pada Maret 2015 (Gambar 13). Pada Maret 2015, lebih dari 90 persen balita di rumah tangga miskin telah mendapatkan imunisasi BCG dan Polio yaitu masing-masing sebesar 94,03 persen dan 92,26 persen.

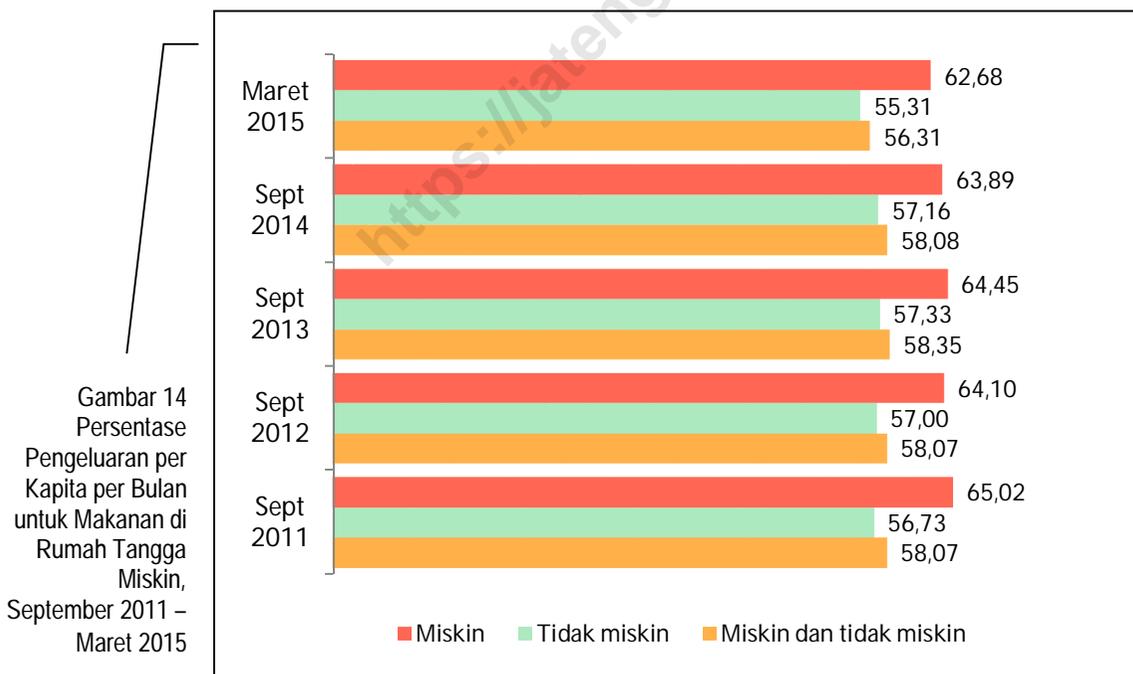


Gambar 13
Persentase Balita (Bawah Lima Tahun) di Rumah Tangga Miskin yang Telah Diimunisasi menurut Jenis Imunisasi, September 2011 – Maret 2015

3.2.4. Pengeluaran per Kapita per Bulan

Sumber penghasilan utama rumah tangga menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang diharapkan dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi suatu rumah tangga. Cerminan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat dari status miskin atau tidak miskin suatu rumah tangga yang ditentukan dari rata-rata pengeluaran per kapita per bulan suatu rumah tangga.

Pengeluaran penduduk dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pengeluaran untuk membiayai komoditi makanan dan pengeluaran untuk membiayai komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sebagian besar pengeluaran per kapita per bulan adalah untuk membiayai komoditi makanan. Hal ini disajikan pada Lampiran Tabel 35 - 39. Dapat dilihat pada Gambar 14, bahwa pengeluaran per kapita per bulan pada rumah tangga miskin maupun rumah tangga tidak miskin sebagian besar adalah untuk komoditi makanan.

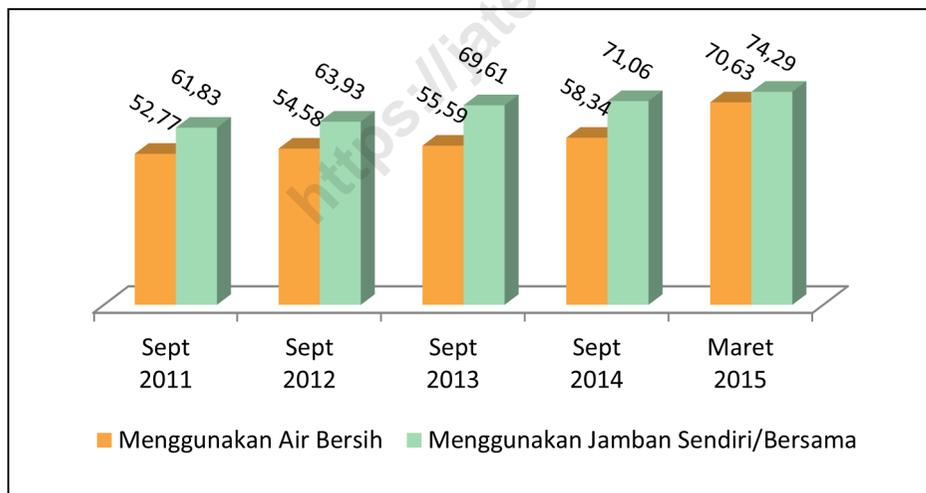


Pada periode September 2011 – Maret 2015, persentase pengeluaran per kapita per bulan untuk makanan untuk rumah tangga

miskin sekitar 63-65 persen. Pada Maret 2015 persentase pengeluaran per kapita per bulan untuk makanan di Provinsi Jawa Tengah sebesar 56,31 persen yaitu pada rumah tangga miskin sebesar 62,68 persen dan pada rumah tangga tidak miskin sebesar 55,31 persen. Pengeluaran per kapita per bulan untuk makanan paling kecil di Kota Semarang sebesar 45,35 persen, pada rumah tangga miskin sebesar 56,91 persen dan 44,75 persen pada rumah tangga tidak miskin (Lampiran Tabel 39).

3.2.5. Fasilitas Perumahan

Rumah yang sehat adalah rumah yang memenuhi persyaratan kesehatan. Rumah dan lingkungan yang sehat, tentunya akan berdampak langsung terhadap kesehatan dan kenyamanan seluruh anggota rumah tangga yang menempatinnya. Ada beberapa indikator perumahan yang menunjukkan rumah sehat antara lain : ketersediaan air bersih dan pemakaian jamban.



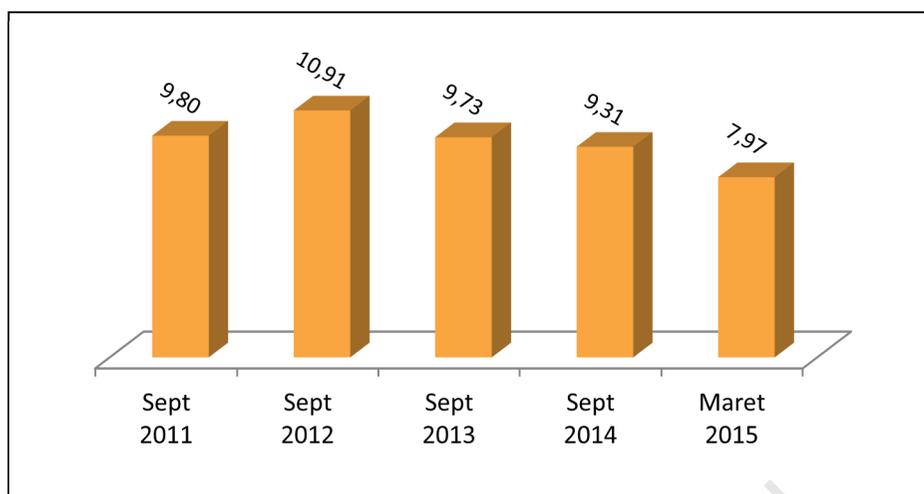
Gambar 15
Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Bersih, yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama, September 2011 – Maret 2015

Ketersediaan fasilitas air bersih sebagai sumber air minum untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga merupakan indikator perumahan yang juga dapat mencirikan sehat tidaknya suatu rumah. Ketersediaan air bersih di rumah tangga adalah salah satu indikasi dari kemiskinan. Dilihat dari persentase rumah tangga menurut ketersediaan air bersih tampak bahwa persentase rumah tangga miskin yang telah menikmati

ketersediaan ketersediaan air bersih sebagai sumber air minum pada Maret 2015 tercatat sebesar 70,63 persen, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan September 2011 yang tercatat sebesar 52,77 persen (Gambar 16). Pada Maret 2015 persentase rumah tangga miskin yang menggunakan air bersih paling banyak adalah Kabupaten Rembang yang mencapai 97,19 persen. Sedangkan persentase terendah berada di Kabupaten Banjarnegara yang hanya 54,53 persen (Lampiran Tabel 44).

Ketersediaan jamban menjadi salah satu fasilitas rumah sehat yang sangat penting dalam mendukung pola hidup sehat. Disamping ada tidaknya jamban, indikator penggunaan fasilitas jamban juga penting yang dibedakan atas jamban sendiri, jamban bersama dan jamban umum/tidak ada. Persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jamban sendiri/bersama dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Rumah tangga miskin yang menggunakan jamban sendiri/bersama di Jawa Tengah pada Maret 2015 ada sebanyak 74,29 persen (Gambar 15). Pada Maret 2015, persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jamban sendiri/bersama tertinggi di Jawa Tengah adalah di Kabupaten Wonogiri yang mencapai 94,94 persen. Sedangkan persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jamban sendiri/bersama yang terendah terdapat di Kabupaten Banjarnegara (45,39 persen) (Lampiran Tabel 49).

Salah satu indikator perumahan yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga adalah keleluasaan pribadi (*privacy*) dalam tempat tinggal. Keleluasaan pribadi tercermin dari luas lantai rumah per kapita (m^2). Menurut Departemen Kesehatan, salah satu syarat rumah dikatakan sehat adalah luas lantai rumah per kapitanya minimal 8 m^2 . Lampiran Tabel 50 – 54 menyajikan karakteristik rumah tangga miskin berdasarkan luas lantai per kapita.



Gambar 16
Persentase
Rumah Tangga
Miskin dengan
Luas Lantai
Bangunan Tempat
Tinggal $\leq 8 \text{ m}^2$,
September 2011 –
Maret 2015

Pada periode September 2011 – Maret 2015, persentase rumah tangga miskin dengan luas lantai bangunan tempat tinggal $\leq 8 \text{ m}^2$ cenderung mengalami penurunan, yaitu sebesar 9,80 persen pada September 2011 menjadi 7,97 persen pada Maret 2015 (Gambar 16). Pada Maret 2015, dilihat dari distribusi rumah tangga miskin menurut kategori luas lantai per kapita, tampak bahwa persentase rumah tangga miskin yang menempati luas lantai per kapita $\leq 8 \text{ m}^2$ (7,97 persen) lebih rendah dibandingkan dengan rumah tangga miskin yang menempati luas lantai per kapita lebih besar 8 sampai kurang dari atau sama dengan 15 m^2 (33,39 persen). Sedangkan yang rumah tangga miskin yang menempati luas lantai per kapita lebih dari 15 m^2 sebesar 58,64 persen. Di Kota Surakarta dan Kota Pekalongan lebih dari 30 persen rumah tangga miskin menempati tempat tinggal dengan luas lantai per kapitanya kurang dari atau sama dengan 8 m^2 (Lampiran Tabel 54).

3.3. Program Penanggulangan Kemiskinan

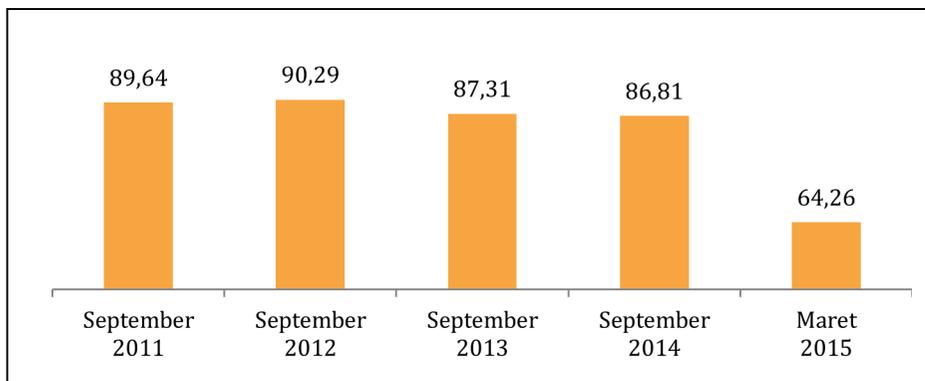
Dalam upaya menanggulangi kemiskinan, pemerintah melakukan berbagai langkah konsolidasi yang diwujudkan dalam 4 (empat) paket bantuan program untuk penduduk miskin dan hampir miskin. Paket bantuan program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Paket Bantuan Program I, yang berupa Bantuan dan Perlindungan Sosial yang ditujukan untuk perlindungan dan pemenuhan hak atas

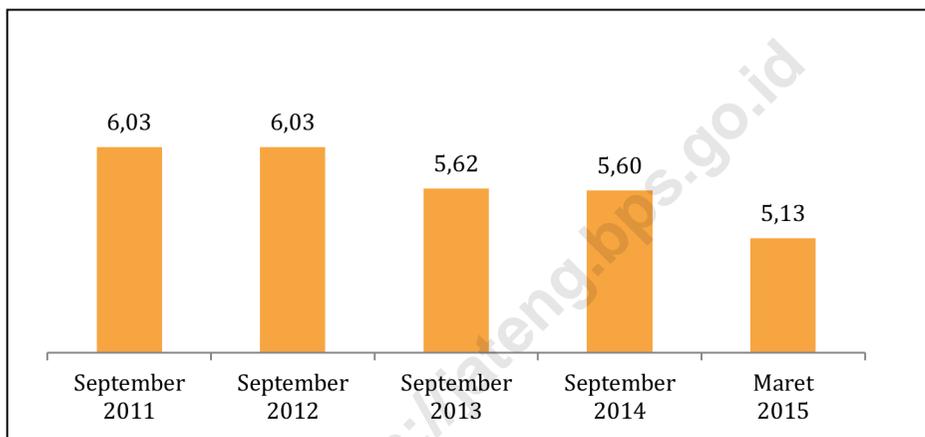
pendidikan, kesehatan, pangan, sanitasi dan air bersih. Paket ini diwujudkan dalam bentuk beras miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas yang dulunya disebut Askeskin), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

2. Paket Bantuan Program II, yang berupa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak atas berpartisipasi, kesempatan kerja dan berusaha, tanah, Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup (LH), dan perumahan.
3. Paket Bantuan Program III, yang berupa Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK-KUR) yang bertujuan untuk perlindungan dan pemenuhan hak atas kesempatan berusaha dan bekerja, dan SDA dan LH.
4. Paket Bantuan Program IV, yang meliputi perumahan, transportasi, air bersih, listrik untuk rakyat miskin, nelayan miskin dan kelompok rentan di perkotaan.

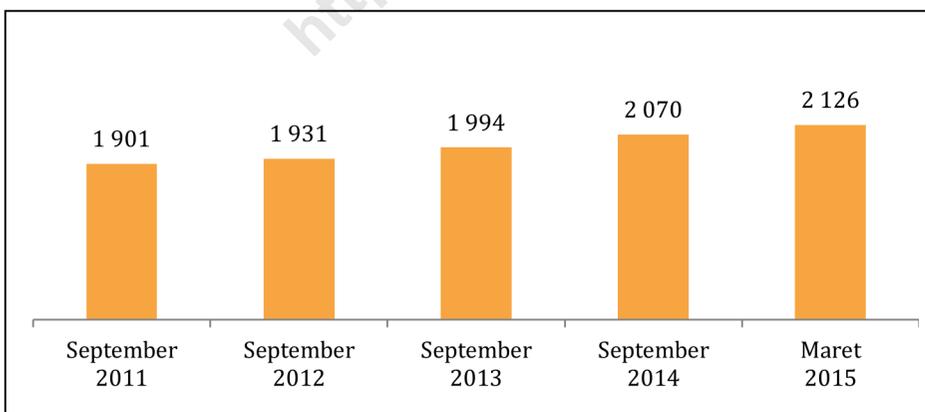
Persentase rumah tangga pada Quantile 1 yang pernah membeli Raskin disajikan pada Gambar 17-19 dan Lampiran Tabel 55-59. Pada Maret 2015 persentase rumah tangga pada Quantile 1 yang pernah membeli Raskin sebesar 64,26 persen. Persentase rumah tangga pada Quantile 1 yang pernah membeli Raskin paling banyak di Kabupaten Brebes sebesar 84,11 persen dan paling sedikit di Kota Pekalongan sebesar 19,42 persen (Lampiran Tabel 59). Rata-rata Raskin yang dibeli oleh rumah tangga pada Quantile 1 di Provinsi Jawa Tengah pada Maret 2015 sebanyak 5,13 kg dengan rata-rata harga sebesar Rp. 2.126,-per kg. Hal ini mengindikasikan bahwa raskin belum di distribusikan secara utuh kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat dan terdapat penambahan harga dalam penjualan pendistribusian raskin kepada rumah tangga.



Gambar 17
Persentase
Rumah Tangga
pada Quantile 1
yang Pernah
Membeli Beras
Raskin,
September 2011 –
Maret 2015



Gambar 18
Rata-rata Jumlah
Beras Raskin
yang Dibeli oleh
Rumah Tangga
pada Quantile 1,
September 2011 –
Maret 2015



Gambar 19
Rata-rata Harga
Beras Raskin
yang Dibeli oleh
Rumah Tangga
pada Quantile 1,
September 2011 –
Maret 2015

BAB IV

PENUTUP

Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 2011 – 2015 terlihat mempunyai kecenderungan menurun dari tahun ke tahun. Pada periode Maret – September 2011 mengalami sedikit kenaikan, namun terjadi penurunan kembali pada September 2011 –Maret 2015. Pada periode Maret 2011 –Maret 2015 jumlah penduduk miskin menurun sebesar 631,9 ribu jiwa yaitu dari 5,138 juta jiwa pada Maret 2011 menjadi 4,506 juta jiwa pada September 2015. Sementara itu, persentase penduduk miskin menurun dari 15,72 persen menjadi 13,32 persen pada periode yang sama. Namun, pada periode Maret 2011 –September 2011 sempat terjadi pertambahan jumlah penduduk miskin sebesar 179,7 ribu jiwa, yaitu dari 5,138 juta jiwa pada Maret 2011 menjadi 5,317 juta jiwa pada September 2011. Akibatnya persentase penduduk miskin juga meningkat dari 15,72 persen menjadi 16,20 persen. Pada periode September 2011 – September 2013, jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami penurunan kembali yaitu dari 5,317 juta jiwa (16,20 persen) pada September 2011 menjadi 4,811 juta jiwa (14,44 persen) pada September 2013. Peningkatan terjadi juga pada September 2013-Maret 2014 dari 14,44 persen menjadi 14,46 persen. Namun pada Maret-September 2015 kembali menunjukkan penurunan menjadi sebesar 13,32 persen.

Secara umum indeks kedalaman kemiskinan pada periode Maret 2011 - September 2015 berfluktuasi demikian pula indeks kedalaman kemiskinan. Dapat dilihat bahwa indeks kedalaman kemiskinan cenderung menurun dari 2,56 pada Maret 2011 menjadi 2,17 pada September 2015. Akan tetapi patut dicatat terjadi peningkatan indeks kedalaman kemiskinan pada periode Maret 2010 - September 2011 (dari 2,49 menjadi 2,58), pada periode Maret - September 2012 (dari 2,27 menjadi 2,39), dan pada periode Maret-September 2013 (dari 2,21 menjadi 2,37).

Sedangkan indeks keparahan kemiskinan cenderung menurun dari 0,66 pada Maret 2011 menjadi 0,59 pada September 2015. Akan tetapi patut dicatat terjadi peningkatan indeks keparahan kemiskinan pada periode Maret 2010 - Maret 2011 (dari 0,60 menjadi 0,66), pada periode Maret 2012 - September 2012 (dari 0,53 menjadi 0,57) dan pada periode Maret 2013 - September 2013 (dari 0,54 menjadi 0,59).

Profil rumah tangga miskin tahun 2015 yang memiliki keterkaitan erat dengan konsep kemiskinan secara konseptual, antara lain:

- a. Penduduk miskin usia 15 tahun ke atas sebagian besar adalah tamatan SD/SLTP yaitu sebesar 54,97 persen.
- b. AMH penduduk miskin kelompok usia 15-24 tahun lebih besar dari AMH kelompok usia 15-55 tahun, yaitu masing-masing sebesar 99,89 dan 96,87.
- c. APS penduduk miskin kelompok usia 7-12 tahun lebih besar dari APS kelompok usia 13-15 tahun, yaitu masing-masing sebesar 99,16 dan 90,80.
- d. Persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja (termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja) sebesar 36,96 persen.
- e. Lebih dari 90 persen balita di rumah tangga miskin telah mendapatkan imunisasi BCG dan Polio yaitu masing-masing sebesar 94,03 persen, dan 92,26 persen. Sedangkan balita di rumah tangga miskin yang telah mendapatkan imunisasi Campak/Morbili hanya sebesar 77,52 persen.
- f. Persentase pengeluaran penduduk miskin sebagian besar masih digunakan untuk konsumsi makanan yaitu sebesar 62,68 persen.
- g. Persentase rumah tangga miskin yang menggunakan air bersih sebesar 70,63 persen dan yang menggunakan jamban sendiri/bersama sebesar 74,29 persen.
- h. Persentase rumah tangga miskin dengan luas lantai bangunan tempat tinggal ≤ 8 m² sebesar 7,97persen.
- i. Persentase rumah tangga pada quantile 1 yang pernah membeli beras raskin sebesar 64,26 persen dengan jumlah rata-rata yang dibeli 5,13 kg dan harga rata-ratanya Rp. 2.126,-.

Informasi mengenai profil kemiskinan sangat dibutuhkan oleh pengambil kebijakan untuk penanganan masalah kemiskinan. Dengan mengetahui profil kemiskinan, pengambil kebijakan dapat lebih memfokuskan program penanggulangan kemiskinan sehingga dapat lebih sesuai dengan kebutuhan penduduk miskin tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). 2012. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2011*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2013. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2012*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2014. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2013*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2015. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2014*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2016. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2010. *Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Jawa Tengah Tahun 2009*. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2011. *Berita Resmi Statistik, Profil Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011*. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2012. *Berita Resmi Statistik, Profil Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Bulan September 2011*. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2012. *Berita Resmi Statistik, Profil Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Maret 2012*. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2013. *Berita Resmi Statistik, Profil Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah September 2012*. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2013. *Berita Resmi Statistik, Profil Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Maret 2013*. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2014. *Berita Resmi Statistik, Profil Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah September 2013*. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2014. *Berita Resmi Statistik, Profil Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Maret 2014*. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2015. *Berita Resmi Statistik, Profil Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah September 2014*. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2015. *Berita Resmi Statistik, Profil Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Maret 2015*. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2016. *Berita Resmi Statistik, Profil Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah September 2015*. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Siregar, Hermanto dan Wahyuniarti, Dwi. 2008. *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*. http://pustaka.blog.mb.ipb.ac.id/files/2010/06/dampak-ptbmbhn-ek_hermanto.pdf, 13 April 2016.
- Suryawati, Chriswardani. 2005. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. Jurnal Manajemen Pembangunan dan Kebijakan, Volume 08, No. 03, Edisi September (121-129).

<https://jateng.bps.go.id>

LAMPIRAN
(TABEL-TABEL)

Tabel 1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Wilayah,
Maret 2011 - September 2015

Tahun	Perkotaan (K)		Perdesaan (D)		Perkotaan (K) + Perdesaan (D)	
	Jumlah (000 jiwa)	%	Jumlah (000 jiwa)	%	Jumlah (000 jiwa)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Maret 2011 ¹⁾	2 098,56	14,05	3 039,12	17,13	5 137,68	15,72
September 2011 ¹⁾	2 201,22	14,67	3 116,17	17,50	5 317,39	16,20
Maret 2012 ¹⁾	2 030,88	13,49	3 020,49	16,89	5 051,37	15,34
September 2012 ¹⁾	1 981,99	13,11	2 970,07	16,55	4 952,06	14,98
Maret 2013 ¹⁾	1 952,41	12,87	2 882,54	15,99	4 834,95	14,56
September 2013 ¹⁾	1 913,08	12,52	2 898,26	16,05	4 811,34	14,44
Maret 2014	1 945,29	12,68	2 891,17	15,96	4 836,45	14,46
September 2014	1 771,53	11,50	2 790,29	15,35	4 561,83	13,58
Maret 2015	1 837,19	11,85	2 739,85	15,05	4 577,04	13,58
September 2015	1 789,57	11,50	2 716,21	14,86	4 505,78	13,32

Keterangan: ¹⁾ Backcasting dengan penimbang hasil proyeksi SP2010

Tabel 2
Jumlah dan Distribusi Persentase Penduduk Miskin menurut Wilayah,
Maret 2011 - September 2015

Tahun	Perkotaan (K)		Perdesaan (D)		Perkotaan (K) + Perdesaan (D)	
	Jumlah (000 jiwa)	%	Jumlah (000 jiwa)	%	Jumlah (000 jiwa)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Maret 2011 ¹⁾	2 098,56	40,85	3 039,12	59,15	5 137,68	100,00
September 2011 ¹⁾	2 201,22	41,40	3 116,17	58,60	5 317,39	100,00
Maret 2012 ¹⁾	2 030,88	40,20	3 020,49	59,80	5 051,37	100,00
September 2012 ¹⁾	1 981,99	40,02	2 970,07	59,98	4 952,06	100,00
Maret 2013 ¹⁾	1 952,41	40,38	2 882,54	59,62	4 834,95	100,00
September 2013 ¹⁾	1 913,08	39,76	2 898,26	60,24	4 811,34	100,00
Maret 2014	1 945,29	40,22	2 891,17	59,78	4 836,45	100,00
September 2014	1 771,53	38,83	2 790,29	61,17	4 561,83	100,00
Maret 2015	1 837,19	40,14	2 739,85	59,86	4 577,04	100,00
September 2015	1 789,57	39,72	2 716,21	60,28	4 505,78	100,00

Keterangan: ¹⁾ Backcasting dengan penimbang hasil proyeksi SP2010

Tabel 3
Garis Kemiskinan menurut Wilayah,
Maret 2011 - September 2015 (Rupiah/Kapita/Bulan)

Tahun	Perkotaan (K)	Perdesaan (D)	Perkotaan (K) + Perdesaan (D)
(1)	(4)	(7)	(10)
Maret 2011 ¹⁾	222 430	198 814	209 611
September 2011 ¹⁾	231 046	205 981	217 440
Maret 2012 ¹⁾	234 799	211 823	222 327
September 2012 ¹⁾	245 817	223 622	233 769
Maret 2013 ¹⁾	254 800	235 202	244 161
September 2013 ¹⁾	268 397	256 368	261 881
Maret 2014	279 036	267 991	273 056
September 2014	286 014	277 802	281 570
Maret 2015	299 011	296 864	297 851
September 2015	308 163	310 295	309 314

Keterangan: ¹⁾ Backcasting dengan penimbang hasil proyeksi SP2010

Tabel 4
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
menurut Wilayah, Maret 2011 - September 2015

Tahun	Perkotaan (K)		Perdesaan (D)		Perkotaan (K) + Perdesaan (D)	
	P1	P2	P1	P2	P1	P2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Maret 2011 ¹⁾	2,45	0,66	2,64	0,66	2,56	0,66
September 2011 ¹⁾	2,57	0,72	2,59	0,61	2,58	0,66
Maret 2012 ¹⁾	2,11	0,51	2,40	0,55	2,27	0,53
September 2012 ¹⁾	2,06	0,50	2,67	0,63	2,39	0,57
Maret 2013 ¹⁾	2,01	0,53	2,38	0,56	2,21	0,54
September 2013 ¹⁾	2,06	0,51	2,64	0,66	2,37	0,59
Maret 2014	1,85	0,45	2,59	0,66	2,25	0,57
September 2014	1,69	0,43	2,42	0,58	2,09	0,51
Maret 2015	2,02	0,52	2,80	0,76	2,44	0,65
September 2015	2,03	0,60	2,28	0,58	2,17	0,59

Keterangan: ¹⁾ Backcasting dengan penimbang hasil proyeksi SP2010

Tabel 5
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1),
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan
menurut Kabupaten/Kota, September 2011

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kab. Cilacap	282,0	17,15	2,59	0,60	224 530
2	Kab. Banyumas	328,5	21,11	3,69	0,99	249 807
3	Kab. Purbalingga	196,0	23,06	3,11	0,67	230 461
4	Kab. Banjarnegara	177,3	20,38	3,15	0,74	192 303
5	Kab. Kebumen	279,4	24,06	3,94	0,96	234 005
6	Kab. Purworejo	121,9	17,51	2,82	0,74	235 459
7	Kab. Wonosobo	183,0	24,21	4,52	1,25	226 827
8	Kab. Magelang	179,6	15,18	2,05	0,44	204 430
9	Kab. Boyolali	139,5	14,97	2,15	0,49	223 755
10	Kab. Klaten	203,1	17,95	3,43	0,99	275 002
11	Kab. Sukoharjo	92,0	11,13	1,68	0,35	240 711
12	Kab. Wonogiri	146,4	15,74	3,09	0,89	207 496
13	Kab. Karanganyar	124,5	15,29	1,98	0,41	236 093
14	Kab. Sragen	154,3	17,95	2,89	0,73	222 267
15	Kab. Grobogan	227,8	17,38	2,62	0,63	242 212
16	Kab. Blora	134,9	16,24	2,35	0,51	206 016
17	Kab. Rembang	140,4	23,71	2,86	0,58	240 859
18	Kab. Pati	175,1	14,69	2,07	0,47	264 372
19	Kab. Kudus	73,6	9,45	1,16	0,20	256 745
20	Kab. Jepara	113,3	10,32	1,30	0,25	242 963
21	Kab. Demak	192,5	18,21	3,12	0,75	254 441
22	Kab. Semarang	96,0	10,30	1,60	0,44	227 471
23	Kab. Temanggung	94,9	13,38	1,93	0,45	198 888
24	Kab. Kendal	128,6	14,26	2,21	0,59	234 475
25	Kab. Batang	95,3	13,47	2,07	0,50	184 592
26	Kab. Pekalongan	125,9	15,00	2,08	0,42	249 958
27	Kab. Pemasang	261,2	20,68	3,09	0,71	235 316
28	Kab. Tegal	161,1	11,54	1,89	0,46	222 700
29	Kab. Brebes	394,4	22,72	4,25	1,23	261 160
30	Kota Magelang	13,1	11,06	1,61	0,36	280 877
31	Kota Surakarta	64,5	12,90	1,89	0,46	326 233
32	Kota Salatiga	13,3	7,80	1,30	0,33	254 726
33	Kota Semarang	88,5	5,68	0,71	0,18	272 996
34	Kota Pekalongan	28,3	10,04	1,37	0,32	270 663
35	Kota Tegal	25,9	10,81	1,89	0,51	280 349
Provinsi Jawa Tengah		5 256,0	16,21	2,58	0,66	217 440

Tabel 6
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1),
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan
menurut Kabupaten/Kota, September 2012 ¹⁾

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kab. Cilacap	265,7	15,92	2,22	0,50	240 025
2	Kab. Banyumas	309,8	19,44	3,42	0,91	271 800
3	Kab. Purbalingga	184,9	21,19	3,72	0,96	247 508
4	Kab. Banjarnegara	167,0	18,87	3,39	0,94	205 369
5	Kab. Kebumen	262,8	22,40	3,35	0,75	250 413
6	Kab. Purworejo	114,8	16,32	2,78	0,65	254 314
7	Kab. Wonosobo	172,4	22,50	3,91	1,04	242 047
8	Kab. Magelang	169,4	13,97	2,09	0,48	218 950
9	Kab. Boyolali	131,5	13,88	2,14	0,51	235 399
10	Kab. Klaten	191,3	16,71	2,14	0,47	296 530
11	Kab. Sukoharjo	85,7	10,15	1,78	0,49	259 184
12	Kab. Wonogiri	137,9	14,67	1,76	0,33	221 019
13	Kab. Karanganyar	117,4	14,07	2,24	0,50	255 072
14	Kab. Sragen	145,3	16,72	2,38	0,55	234 254
15	Kab. Grobogan	214,6	16,13	2,55	0,61	260 435
16	Kab. Blora	127,1	15,10	2,19	0,47	221 088
17	Kab. Rembang	132,4	21,88	2,76	0,60	261 156
18	Kab. Pati	165,0	13,61	1,72	0,35	288 271
19	Kab. Kudus	69,3	8,63	0,92	0,19	276 317
20	Kab. Jepara	107,0	9,38	0,94	0,18	263 266
21	Kab. Demak	181,6	16,73	2,75	0,68	276 041
22	Kab. Semarang	90,6	9,40	1,57	0,38	244 762
23	Kab. Temanggung	89,5	12,32	1,85	0,41	212 487
24	Kab. Kendal	121,2	13,17	1,59	0,30	253 276
25	Kab. Batang	89,8	12,40	1,89	0,43	195 983
26	Kab. Pekalongan	118,6	13,85	1,49	0,24	270 026
27	Kab. Pemasang	245,9	19,27	2,51	0,50	251 986
28	Kab. Tegal	151,7	10,75	1,14	0,23	239 207
29	Kab. Brebes	371,4	21,12	3,07	0,77	281 601
30	Kota Magelang	12,3	10,31	1,48	0,33	313 250
31	Kota Surakarta	60,7	12,00	1,33	0,28	361 517
32	Kota Salatiga	12,6	7,11	0,77	0,13	277 039
33	Kota Semarang	83,3	5,13	0,80	0,19	297 848
34	Kota Pekalongan	27,3	9,47	1,09	0,19	294 586
35	Kota Tegal	24,4	10,04	0,95	0,15	305 818
Provinsi Jawa Tengah		4 952,1	14,98	2,39	0,57	233 769

Keterangan: ¹⁾ Backcasting dengan penimbang hasil proyeksi SP2010

Tabel 7
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1),
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan
menurut Kabupaten/Kota, September 2013 ¹⁾

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kab. Cilacap	255,7	15,24	2,06	0,45	256 615
2	Kab. Banyumas	296,8	18,44	3,24	0,83	295 742
3	Kab. Purbalingga	181,1	20,53	3,20	0,73	265 262
4	Kab. Banjarnegara	166,8	18,71	2,91	0,77	221 056
5	Kab. Kebumen	251,1	21,32	3,57	0,91	267 763
6	Kab. Purworejo	109,0	15,44	1,98	0,43	273 481
7	Kab. Wonosobo	170,1	22,08	4,26	1,25	258 522
8	Kab. Magelang	171,0	13,96	1,72	0,34	235 430
9	Kab. Boyolali	126,5	13,27	2,35	0,56	247 845
10	Kab. Klaten	179,5	15,60	2,37	0,55	315 566
11	Kab. Sukoharjo	84,1	9,87	0,91	0,14	279 400
12	Kab. Wonogiri	132,2	14,02	1,74	0,37	235 728
13	Kab. Karanganyar	114,4	13,58	2,36	0,61	275 865
14	Kab. Sragen	139,0	15,93	2,38	0,52	247 495
15	Kab. Grobogan	199,0	14,87	2,20	0,53	278 786
16	Kab. Blora	123,8	14,64	2,39	0,59	237 850
17	Kab. Rembang	128,0	20,97	3,40	0,88	284 160
18	Kab. Pati	157,9	12,94	1,83	0,41	314 609
19	Kab. Kudus	70,1	8,62	0,78	0,12	299 097
20	Kab. Jepara	106,9	9,23	1,12	0,25	285 287
21	Kab. Demak	172,5	15,72	2,19	0,47	299 773
22	Kab. Semarang	83,2	8,51	0,92	0,17	263 352
23	Kab. Temanggung	91,1	12,42	1,46	0,26	229 548
24	Kab. Kendal	117,7	12,68	1,95	0,46	275 016
25	Kab. Batang	87,5	11,96	1,93	0,49	208 671
26	Kab. Pekalongan	116,5	13,51	1,96	0,39	293 039
27	Kab. Pemasang	246,8	19,27	2,71	0,61	271 861
28	Kab. Tegal	149,8	10,58	1,68	0,42	258 366
29	Kab. Brebes	367,9	20,82	3,33	0,76	307 238
30	Kota Magelang	11,8	9,80	1,45	0,37	350 554
31	Kota Surakarta	59,7	11,74	1,63	0,34	371 918
32	Kota Salatiga	11,5	6,40	0,94	0,18	302 884
33	Kota Semarang	86,7	5,25	0,65	0,13	328 271
34	Kota Pekalongan	24,1	8,26	0,93	0,16	322 313
35	Kota Tegal	21,6	8,84	0,94	0,18	333 553
Provinsi Jawa Tengah		4 811,3	14,44	2,37	0,59	261 881

Keterangan: ¹⁾ Backcasting dengan penimbang hasil proyeksi SP2010

Tabel 8
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1),
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan
menurut Kabupaten/Kota, September 2014

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kab. Cilacap	239,8	14,21	2,37	0,61	265 714
2	Kab. Banyumas	283,5	17,45	2,48	0,56	309 106
3	Kab. Purbalingga	176,0	19,75	3,26	0,80	275 022
4	Kab. Banjarnegara	159,5	17,77	2,88	0,73	229 718
5	Kab. Kebumen	242,3	20,50	2,78	0,61	277 280
6	Kab. Purworejo	102,1	14,41	1,85	0,42	284 409
7	Kab. Wonosobo	165,8	21,42	3,91	1,09	267 548
8	Kab. Magelang	160,5	12,98	2,07	0,47	246 292
9	Kab. Boyolali	118,6	12,36	1,62	0,32	255 391
10	Kab. Klaten	168,2	14,56	2,02	0,45	327 231
11	Kab. Sukoharjo	78,9	9,18	0,76	0,14	291 949
12	Kab. Wonogiri	123,8	13,09	1,65	0,34	244 761
13	Kab. Karanganyar	107,3	12,62	2,02	0,48	288 814
14	Kab. Sragen	130,3	14,87	2,04	0,45	255 550
15	Kab. Grobogan	186,5	13,86	2,33	0,59	290 827
16	Kab. Blora	116,0	13,66	2,09	0,50	248 903
17	Kab. Rembang	120,0	19,50	2,90	0,65	299 503
18	Kab. Pati	148,1	12,06	1,54	0,32	332 228
19	Kab. Kudus	65,8	7,99	0,90	0,15	314 211
20	Kab. Jepara	100,5	8,55	1,17	0,23	299 914
21	Kab. Demak	162,0	14,60	1,90	0,40	315 570
22	Kab. Semarang	79,8	8,05	1,20	0,29	275 612
23	Kab. Temanggung	85,5	11,55	1,51	0,30	240 845
24	Kab. Kendal	110,5	11,80	1,76	0,41	289 486
25	Kab. Batang	82,1	11,13	1,43	0,29	216 952
26	Kab. Pekalongan	109,3	12,57	1,79	0,42	306 281
27	Kab. Pemasang	237,0	18,44	2,49	0,53	287 358
28	Kab. Tegal	140,3	9,87	1,33	0,32	271 875
29	Kab. Brebes	355,1	20,00	2,93	0,66	327 452
30	Kota Magelang	11,0	9,14	0,94	0,20	376 143
31	Kota Surakarta	55,9	10,95	1,48	0,30	385 467
32	Kota Salatiga	10,8	5,93	0,87	0,21	320 204
33	Kota Semarang	84,7	5,04	0,47	0,08	348 824
34	Kota Pekalongan	23,6	8,02	1,14	0,26	338 398
35	Kota Tegal	20,9	8,54	1,38	0,38	353 301
Provinsi Jawa Tengah		4 561,8	13,58	2,09	0,51	281 570

Tabel 9
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1),
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan
menurut Kabupaten/Kota, Maret 2015

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kab. Cilacap	243,5	14,39	2,71	0,76	273 828
2	Kab. Banyumas	285,9	17,52	2,91	0,71	320 585
3	Kab. Purbalingga	176,5	19,70	3,37	0,85	283 366
4	Kab. Banjarnegara	165,4	18,37	3,51	0,93	236 399
5	Kab. Kebumen	241,9	20,44	4,08	1,19	292 177
6	Kab. Purworejo	101,3	14,27	2,43	0,63	294 158
7	Kab. Wonosobo	166,4	21,45	4,74	1,60	275 180
8	Kab. Magelang	162,4	13,07	1,60	0,32	253 866
9	Kab. Boyolali	120,0	12,45	2,01	0,50	263 734
10	Kab. Klaten	172,3	14,89	2,72	0,72	340 484
11	Kab. Sukoharjo	79,9	9,26	1,09	0,25	303 030
12	Kab. Wonogiri	123,0	12,98	2,10	0,50	252 903
13	Kab. Karanganyar	106,4	12,46	1,82	0,40	303 056
14	Kab. Sragen	130,4	14,86	2,69	0,76	263 199
15	Kab. Grobogan	184,5	13,68	2,56	0,65	303 455
16	Kab. Blora	115,1	13,52	2,08	0,54	257 581
17	Kab. Rembang	119,1	19,28	3,47	0,99	314 596
18	Kab. Pati	147,1	11,95	2,02	0,55	347 575
19	Kab. Kudus	64,1	7,73	0,90	0,17	328 404
20	Kab. Jepara	100,6	8,50	1,28	0,28	314 422
21	Kab. Demak	160,9	14,44	2,32	0,60	328 529
22	Kab. Semarang	81,3	8,15	1,33	0,30	286 918
23	Kab. Temanggung	87,5	11,76	1,99	0,47	248 866
24	Kab. Kendal	109,3	11,62	2,17	0,57	301 449
25	Kab. Batang	83,5	11,27	1,80	0,43	224 437
26	Kab. Pekalongan	112,1	12,84	1,98	0,46	317 796
27	Kab. Pemasang	235,5	18,30	3,93	1,24	298 622
28	Kab. Tegal	143,5	10,09	1,50	0,36	282 861
29	Kab. Brebes	352,0	19,79	3,52	0,93	340 538
30	Kota Magelang	10,9	9,05	1,39	0,31	405 228
31	Kota Surakarta	55,7	10,89	1,74	0,40	406 840
32	Kota Salatiga	10,6	5,80	1,07	0,26	337 511
33	Kota Semarang	84,3	4,97	0,50	0,09	368 477
34	Kota Pekalongan	24,1	8,09	0,83	0,15	352 717
35	Kota Tegal	20,3	8,26	1,34	0,35	371 528
Provinsi Jawa Tengah		4 577,0	13,58	2,44	0,65	297 851

Tabel 10
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, September 2011

No	Kabupaten/Kota	Pendidikan			
		< SD	Tamat SD / SLTP	SLTA +	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	39,82	54,07	6,11	100,00
2	Kab. Banyumas	32,88	59,71	7,41	100,00
3	Kab. Purbalingga	42,93	54,69	2,38	100,00
4	Kab. Banjarnegara	39,44	58,72	1,84	100,00
5	Kab. Kebumen	32,12	57,18	10,70	100,00
6	Kab. Purworejo	27,36	61,08	11,56	100,00
7	Kab. Wonosobo	42,90	55,74	1,36	100,00
8	Kab. Magelang	25,31	68,19	6,50	100,00
9	Kab. Boyolali	33,25	56,98	9,77	100,00
10	Kab. Klaten	32,75	49,98	17,27	100,00
11	Kab. Sukoharjo	29,20	53,19	17,61	100,00
12	Kab. Wonogiri	37,63	57,00	5,37	100,00
13	Kab. Karanganyar	27,87	63,20	8,93	100,00
14	Kab. Sragen	36,93	50,86	12,21	100,00
15	Kab. Grobogan	32,18	63,66	4,16	100,00
16	Kab. Blora	39,05	56,45	4,50	100,00
17	Kab. Rembang	29,15	64,72	6,13	100,00
18	Kab. Pati	39,64	48,56	11,80	100,00
19	Kab. Kudus	37,34	51,80	10,86	100,00
20	Kab. Jepara	33,40	61,71	4,89	100,00
21	Kab. Demak	30,52	63,72	5,76	100,00
22	Kab. Semarang	37,61	56,45	5,94	100,00
23	Kab. Temanggung	35,27	60,57	4,16	100,00
24	Kab. Kendal	37,09	58,63	4,28	100,00
25	Kab. Batang	39,85	55,64	4,51	100,00
26	Kab. Pekalongan	31,14	62,94	5,92	100,00
27	Kab. Pemasang	36,99	59,55	3,46	100,00
28	Kab. Tegal	44,30	52,42	3,28	100,00
29	Kab. Brebes	47,61	49,50	2,89	100,00
30	Kota Magelang	22,80	54,03	23,17	100,00
31	Kota Surakarta	20,67	56,08	23,25	100,00
32	Kota Salatiga	32,80	50,51	16,69	100,00
33	Kota Semarang	26,85	46,33	26,82	100,00
34	Kota Pekalongan	33,39	58,14	8,47	100,00
35	Kota Tegal	39,03	49,97	11,00	100,00
Provinsi Jawa Tengah		35,71	56,97	7,32	100,00

Tabel 11
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, September 2012

No	Kabupaten/Kota	Pendidikan			
		< SD	Tamat SD / SLTP	SLTA +	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	39,49	54,39	6,12	100,00
2	Kab. Banyumas	31,57	57,72	10,71	100,00
3	Kab. Purbalingga	36,91	56,06	7,02	100,00
4	Kab. Banjarnegara	45,82	52,11	2,06	100,00
5	Kab. Kebumen	32,17	60,64	7,20	100,00
6	Kab. Purworejo	24,55	65,56	9,88	100,00
7	Kab. Wonosobo	41,73	54,47	3,80	100,00
8	Kab. Magelang	27,20	68,29	4,52	100,00
9	Kab. Boyolali	38,56	49,80	11,64	100,00
10	Kab. Klaten	32,14	47,15	20,71	100,00
11	Kab. Sukoharjo	32,05	55,61	12,34	100,00
12	Kab. Wonogiri	33,93	56,07	9,99	100,00
13	Kab. Karanganyar	25,69	60,36	13,95	100,00
14	Kab. Sragen	36,98	52,30	10,72	100,00
15	Kab. Grobogan	35,04	60,75	4,21	100,00
16	Kab. Blora	47,44	49,86	2,70	100,00
17	Kab. Rembang	27,45	61,96	10,59	100,00
18	Kab. Pati	32,63	55,90	11,47	100,00
19	Kab. Kudus	24,55	51,17	24,28	100,00
20	Kab. Jepara	29,44	64,29	6,27	100,00
21	Kab. Demak	26,31	62,68	11,01	100,00
22	Kab. Semarang	42,27	51,09	6,64	100,00
23	Kab. Temanggung	35,34	60,77	3,89	100,00
24	Kab. Kendal	38,83	56,74	4,44	100,00
25	Kab. Batang	37,95	60,39	1,66	100,00
26	Kab. Pekalongan	29,72	62,86	7,42	100,00
27	Kab. Pemasang	29,67	66,65	3,68	100,00
28	Kab. Tegal	40,85	54,23	4,92	100,00
29	Kab. Brebes	40,49	55,33	4,18	100,00
30	Kota Magelang	11,64	58,62	29,73	100,00
31	Kota Surakarta	14,45	52,76	32,79	100,00
32	Kota Salatiga	34,44	45,04	20,51	100,00
33	Kota Semarang	21,93	48,12	29,95	100,00
34	Kota Pekalongan	24,29	60,73	14,98	100,00
35	Kota Tegal	29,38	53,40	17,23	100,00
Provinsi Jawa Tengah		34,09	57,24	8,66	100,00

Tabel 12
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, September 2013

No	Kabupaten/Kota	Pendidikan			
		< SD	Tamat SD / SLTP	SLTA +	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	40,88	48,54	10,57	100,00
2	Kab. Banyumas	27,79	63,57	8,63	100,00
3	Kab. Purbalingga	41,07	52,50	6,43	100,00
4	Kab. Banjarnegara	42,61	55,38	2,00	100,00
5	Kab. Kebumen	34,36	60,08	5,56	100,00
6	Kab. Purworejo	23,83	58,97	17,20	100,00
7	Kab. Wonosobo	40,63	57,77	1,60	100,00
8	Kab. Magelang	34,94	59,34	5,72	100,00
9	Kab. Boyolali	37,80	53,95	8,25	100,00
10	Kab. Klaten	30,26	48,05	21,69	100,00
11	Kab. Sukoharjo	23,85	50,10	26,05	100,00
12	Kab. Wonogiri	39,30	56,53	4,17	100,00
13	Kab. Karanganyar	26,87	60,06	13,07	100,00
14	Kab. Sragen	34,02	50,48	15,51	100,00
15	Kab. Grobogan	35,13	61,59	3,28	100,00
16	Kab. Blora	50,54	42,69	6,76	100,00
17	Kab. Rembang	25,29	66,16	8,56	100,00
18	Kab. Pati	41,10	46,13	12,77	100,00
19	Kab. Kudus	24,17	57,80	18,03	100,00
20	Kab. Jepara	31,10	60,20	8,69	100,00
21	Kab. Demak	24,29	67,22	8,30	100,00
22	Kab. Semarang	38,01	46,38	15,62	100,00
23	Kab. Temanggung	41,26	52,86	5,88	100,00
24	Kab. Kendal	41,60	51,47	6,92	100,00
25	Kab. Batang	43,70	52,73	3,57	100,00
26	Kab. Pekalongan	35,16	59,92	4,91	100,00
27	Kab. Pemasang	37,14	52,95	9,92	100,00
28	Kab. Tegal	27,94	65,92	6,14	100,00
29	Kab. Brebes	44,88	50,53	4,59	100,00
30	Kota Magelang	9,25	54,32	36,43	100,00
31	Kota Surakarta	18,43	48,31	33,25	100,00
32	Kota Salatiga	23,62	46,77	29,61	100,00
33	Kota Semarang	10,11	53,32	36,57	100,00
34	Kota Pekalongan	24,18	56,62	19,21	100,00
35	Kota Tegal	33,11	58,00	8,89	100,00
Provinsi Jawa Tengah		35,01	55,45	9,54	100,00

Tabel 13
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, September 2014

No	Kabupaten/Kota	Pendidikan			
		< SD	Tamat SD / SLTP	SLTA +	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	36,81	58,01	5,18	100,00
2	Kab. Banyumas	28,30	59,11	12,59	100,00
3	Kab. Purbalingga	43,72	51,15	5,13	100,00
4	Kab. Banjarnegara	31,58	65,31	3,11	100,00
5	Kab. Kebumen	27,05	62,23	10,72	100,00
6	Kab. Purworejo	31,82	56,77	11,41	100,00
7	Kab. Wonosobo	46,79	47,55	5,66	100,00
8	Kab. Magelang	29,89	60,16	9,95	100,00
9	Kab. Boyolali	37,62	49,80	12,57	100,00
10	Kab. Klaten	32,55	42,80	24,66	100,00
11	Kab. Sukoharjo	25,14	52,27	22,59	100,00
12	Kab. Wonogiri	37,65	54,39	7,95	100,00
13	Kab. Karanganyar	30,42	59,84	9,74	100,00
14	Kab. Sragen	40,81	41,37	17,82	100,00
15	Kab. Grobogan	28,54	64,05	7,42	100,00
16	Kab. Blora	45,27	45,63	9,10	100,00
17	Kab. Rembang	24,16	64,64	11,20	100,00
18	Kab. Pati	40,15	51,38	8,47	100,00
19	Kab. Kudus	27,22	50,99	21,79	100,00
20	Kab. Jepara	28,30	60,02	11,68	100,00
21	Kab. Demak	27,74	59,85	12,41	100,00
22	Kab. Semarang	38,90	49,43	11,68	100,00
23	Kab. Temanggung	42,44	50,25	7,30	100,00
24	Kab. Kendal	36,48	55,97	7,55	100,00
25	Kab. Batang	44,16	54,11	1,72	100,00
26	Kab. Pekalongan	29,51	65,75	4,74	100,00
27	Kab. Pemasang	27,25	64,80	7,94	100,00
28	Kab. Tegal	38,41	54,03	7,56	100,00
29	Kab. Brebes	38,61	53,16	8,23	100,00
30	Kota Magelang	17,51	55,95	26,54	100,00
31	Kota Surakarta	20,27	50,06	29,67	100,00
32	Kota Salatiga	21,41	56,80	21,79	100,00
33	Kota Semarang	25,47	47,60	26,93	100,00
34	Kota Pekalongan	20,64	67,55	11,82	100,00
35	Kota Tegal	22,11	63,66	14,23	100,00
Provinsi Jawa Tengah		33,69	55,78	10,52	100,00

Tabel 14
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Maret 2015

No	Kabupaten/Kota	Pendidikan			
		< SD	Tamat SD / SLTP	SLTA +	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	34,27	59,49	6,23	100,00
2	Kab. Banyumas	37,89	54,69	7,41	100,00
3	Kab. Purbalingga	36,36	57,87	5,77	100,00
4	Kab. Banjarnegara	34,74	62,75	2,51	100,00
5	Kab. Kebumen	26,17	63,65	10,18	100,00
6	Kab. Purworejo	29,43	56,81	13,77	100,00
7	Kab. Wonosobo	40,34	59,03	0,62	100,00
8	Kab. Magelang	28,12	63,32	8,56	100,00
9	Kab. Boyolali	35,60	56,29	8,11	100,00
10	Kab. Klaten	36,43	44,41	19,16	100,00
11	Kab. Sukoharjo	27,96	51,18	20,86	100,00
12	Kab. Wonogiri	36,98	50,19	12,84	100,00
13	Kab. Karanganyar	35,21	50,74	14,05	100,00
14	Kab. Sragen	42,29	44,03	13,68	100,00
15	Kab. Grobogan	30,38	64,43	5,20	100,00
16	Kab. Blora	49,15	45,15	5,70	100,00
17	Kab. Rembang	31,88	57,94	10,18	100,00
18	Kab. Pati	36,42	48,67	14,91	100,00
19	Kab. Kudus	23,91	61,02	15,07	100,00
20	Kab. Jepara	44,06	42,30	13,64	100,00
21	Kab. Demak	33,22	58,13	8,65	100,00
22	Kab. Semarang	36,06	54,98	8,96	100,00
23	Kab. Temanggung	40,21	55,22	4,57	100,00
24	Kab. Kendal	41,98	52,79	5,23	100,00
25	Kab. Batang	39,17	54,63	6,20	100,00
26	Kab. Pekalongan	22,77	70,67	6,55	100,00
27	Kab. Pemaslang	43,44	50,27	6,30	100,00
28	Kab. Tegal	38,67	52,69	8,64	100,00
29	Kab. Brebes	42,24	53,20	4,56	100,00
30	Kota Magelang	14,44	54,04	31,52	100,00
31	Kota Surakarta	13,70	49,47	36,83	100,00
32	Kota Salatiga	9,38	59,51	31,11	100,00
33	Kota Semarang	22,73	41,06	36,21	100,00
34	Kota Pekalongan	24,02	60,04	15,94	100,00
35	Kota Tegal	33,95	50,04	16,01	100,00
Provinsi Jawa Tengah		35,47	54,97	9,56	100,00

Tabel 15
Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin
menurut Kabupaten/Kota dan Golongan Umur, September 2011

No	Kabupaten/Kota	Angka Melek Huruf		Angka Partisipasi Sekolah	
		15 - 24 Tahun	15 - 55 Tahun	7 - 12 Tahun	13 - 15 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	100,00	94,40	94,84	84,59
2	Kab. Banyumas	99,11	96,28	97,19	80,43
3	Kab. Purbalingga	100,00	94,73	97,55	66,22
4	Kab. Banjarnegara	100,00	88,83	90,96	39,23
5	Kab. Kebumen	96,39	92,91	96,95	85,22
6	Kab. Purworejo	96,77	94,62	96,98	79,98
7	Kab. Wonosobo	100,00	89,22	96,36	75,31
8	Kab. Magelang	98,84	95,70	98,38	79,33
9	Kab. Boyolali	100,00	92,29	95,12	62,37
10	Kab. Klaten	100,00	93,63	95,96	86,27
11	Kab. Sukoharjo	100,00	94,83	100,00	78,88
12	Kab. Wonogiri	100,00	88,42	94,10	85,18
13	Kab. Karanganyar	100,00	92,47	100,00	86,32
14	Kab. Sragen	98,02	84,90	100,00	81,33
15	Kab. Grobogan	96,00	92,00	97,54	76,58
16	Kab. Blora	100,00	88,17	100,00	77,63
17	Kab. Rembang	98,57	94,04	98,64	80,79
18	Kab. Pati	90,36	92,53	100,00	70,51
19	Kab. Kudus	100,00	93,39	100,00	50,53
20	Kab. Jepara	100,00	95,73	98,46	75,54
21	Kab. Demak	98,80	93,87	97,85	85,34
22	Kab. Semarang	100,00	95,35	97,90	89,94
23	Kab. Temanggung	100,00	96,12	100,00	47,51
24	Kab. Kendal	96,90	90,62	98,28	65,37
25	Kab. Batang	97,20	92,52	98,12	67,69
26	Kab. Pekalongan	100,00	95,88	92,52	70,72
27	Kab. Pemasang	99,29	94,87	92,99	81,78
28	Kab. Tegal	95,22	96,63	98,41	82,99
29	Kab. Brebes	100,00	89,23	97,90	74,88
30	Kota Magelang	100,00	98,33	100,00	87,57
31	Kota Surakarta	100,00	95,23	100,00	95,06
32	Kota Salatiga	100,00	91,85	100,00	100,00
33	Kota Semarang	100,00	94,11	100,00	88,77
34	Kota Pekalongan	97,59	93,91	95,33	70,54
35	Kota Tegal	100,00	91,59	93,62	73,42
Provinsi Jawa Tengah		98,72	92,85	97,06	76,76

Tabel 16
Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin
menurut Kabupaten/Kota dan Golongan Umur, September 2012

No	Kabupaten/Kota	Angka Melek Huruf		Angka Partisipasi Sekolah	
		15 - 24 Tahun	15 - 55 Tahun	7 - 12 Tahun	13 - 15 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	100,00	93,20	96,15	88,09
2	Kab. Banyumas	100,00	95,30	95,34	71,71
3	Kab. Purbalingga	100,00	97,27	94,42	74,75
4	Kab. Banjarnegara	95,98	88,80	95,10	65,87
5	Kab. Kebumen	98,27	93,11	98,36	93,11
6	Kab. Purworejo	100,00	97,27	100,00	76,33
7	Kab. Wonosobo	98,80	92,13	96,97	69,40
8	Kab. Magelang	100,00	96,49	100,00	62,93
9	Kab. Boyolali	100,00	90,58	100,00	68,31
10	Kab. Klaten	100,00	92,73	100,00	80,12
11	Kab. Sukoharjo	100,00	93,01	100,00	71,77
12	Kab. Wonogiri	100,00	96,25	100,00	74,76
13	Kab. Karanganyar	100,00	93,94	97,47	78,73
14	Kab. Sragen	100,00	86,57	100,00	100,00
15	Kab. Grobogan	100,00	95,51	98,41	77,29
16	Kab. Blora	96,84	87,13	96,41	84,04
17	Kab. Rembang	98,81	95,06	98,69	95,23
18	Kab. Pati	97,41	91,52	92,60	74,05
19	Kab. Kudus	100,00	93,91	95,06	100,00
20	Kab. Jepara	100,00	95,86	100,00	73,98
21	Kab. Demak	98,58	94,62	97,21	80,11
22	Kab. Semarang	100,00	92,10	100,00	75,49
23	Kab. Temanggung	100,00	94,50	97,16	83,81
24	Kab. Kendal	100,00	89,83	100,00	81,56
25	Kab. Batang	100,00	96,07	100,00	61,22
26	Kab. Pekalongan	100,00	96,17	98,38	87,54
27	Kab. Pemasang	100,00	96,64	98,88	82,22
28	Kab. Tegal	100,00	94,08	94,92	71,87
29	Kab. Brebes	99,37	88,64	97,42	67,86
30	Kota Magelang	93,88	98,10	100,00	84,25
31	Kota Surakarta	100,00	95,15	100,00	91,30
32	Kota Salatiga	100,00	85,11	100,00	75,60
33	Kota Semarang	100,00	96,46	100,00	71,33
34	Kota Pekalongan	100,00	91,80	91,34	63,53
35	Kota Tegal	100,00	93,56	83,36	71,50
Provinsi Jawa Tengah		99,41	93,24	97,57	77,70

Tabel 17
Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin
menurut Kabupaten/Kota dan Golongan Umur, September 2013

No	Kabupaten/Kota	Angka Melek Huruf		Angka Partisipasi Sekolah	
		15 - 24 Tahun	15 - 55 Tahun	7 - 12 Tahun	13 - 15 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	100,00	92,68	100,00	63,07
2	Kab. Banyumas	98,88	98,24	98,58	84,31
3	Kab. Purbalingga	100,00	91,59	97,94	68,54
4	Kab. Banjarnegara	98,12	84,24	100,00	60,68
5	Kab. Kebumen	97,15	95,31	97,27	89,50
6	Kab. Purworejo	100,00	94,49	97,28	90,82
7	Kab. Wonosobo	100,00	91,34	94,08	59,91
8	Kab. Magelang	100,00	96,04	98,06	69,75
9	Kab. Boyolali	96,91	89,84	97,77	100,00
10	Kab. Klaten	100,00	95,99	98,52	100,00
11	Kab. Sukoharjo	100,00	98,32	100,00	64,47
12	Kab. Wonogiri	88,18	87,58	95,91	71,94
13	Kab. Karanganyar	100,00	93,27	100,00	79,66
14	Kab. Sragen	100,00	91,94	100,00	96,85
15	Kab. Grobogan	93,71	89,04	89,44	89,02
16	Kab. Blora	96,16	84,45	99,08	100,00
17	Kab. Rembang	100,00	96,54	96,86	92,22
18	Kab. Pati	93,80	86,23	100,00	100,00
19	Kab. Kudus	100,00	95,29	100,00	81,10
20	Kab. Jepara	100,00	94,79	100,00	89,24
21	Kab. Demak	97,30	89,63	100,00	82,51
22	Kab. Semarang	96,47	91,88	100,00	70,03
23	Kab. Temanggung	100,00	90,00	100,00	86,61
24	Kab. Kendal	92,24	92,03	97,09	92,27
25	Kab. Batang	100,00	88,98	100,00	60,49
26	Kab. Pekalongan	100,00	94,02	97,89	75,16
27	Kab. Pemasang	97,30	93,39	92,64	80,11
28	Kab. Tegal	100,00	94,82	97,09	87,26
29	Kab. Brebes	99,56	92,20	96,23	79,86
30	Kota Magelang	97,05	98,50	100,00	88,11
31	Kota Surakarta	100,00	98,78	100,00	100,00
32	Kota Salatiga	86,30	87,45	100,00	100,00
33	Kota Semarang	100,00	97,57	100,00	100,00
34	Kota Pekalongan	100,00	96,68	100,00	97,81
35	Kota Tegal	100,00	94,29	97,21	100,00
Provinsi Jawa Tengah		98,35	92,59	97,59	82,93

Tabel 18
Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin
menurut Kabupaten/Kota dan Golongan Umur, September 2014

No	Kabupaten/Kota	Angka Melek Huruf		Angka Partisipasi Sekolah	
		15 - 24 Tahun	15 - 55 Tahun	7 - 12 Tahun	13 - 15 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	100,00	97,72	100,00	75,57
2	Kab. Banyumas	100,00	99,20	100,00	93,26
3	Kab. Purbalingga	100,00	95,53	100,00	90,69
4	Kab. Banjarnegara	100,00	95,99	100,00	66,21
5	Kab. Kebumen	100,00	98,18	100,00	96,12
6	Kab. Purworejo	100,00	98,41	100,00	87,38
7	Kab. Wonosobo	100,00	97,18	100,00	65,78
8	Kab. Magelang	100,00	97,61	100,00	83,32
9	Kab. Boyolali	100,00	96,21	100,00	92,41
10	Kab. Klaten	100,00	97,27	98,47	100,00
11	Kab. Sukoharjo	100,00	97,59	100,00	100,00
12	Kab. Wonogiri	100,00	94,66	100,00	100,00
13	Kab. Karanganyar	100,00	93,39	100,00	100,00
14	Kab. Sragen	100,00	93,84	96,41	96,11
15	Kab. Grobogan	100,00	97,03	100,00	94,79
16	Kab. Blora	98,23	92,74	100,00	95,36
17	Kab. Rembang	100,00	95,76	100,00	100,00
18	Kab. Pati	100,00	91,57	96,16	100,00
19	Kab. Kudus	100,00	96,81	100,00	100,00
20	Kab. Jepara	100,00	97,94	100,00	94,44
21	Kab. Demak	100,00	95,72	99,03	81,34
22	Kab. Semarang	100,00	97,05	100,00	89,52
23	Kab. Temanggung	100,00	96,56	100,00	65,57
24	Kab. Kendal	100,00	94,70	100,00	88,15
25	Kab. Batang	100,00	92,14	100,00	82,42
26	Kab. Pekalongan	100,00	97,80	100,00	85,00
27	Kab. Pemasang	100,00	93,77	100,00	83,42
28	Kab. Tegal	100,00	96,72	96,87	78,68
29	Kab. Brebes	100,00	94,64	98,25	88,15
30	Kota Magelang	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Kota Surakarta	100,00	99,44	100,00	94,17
32	Kota Salatiga	100,00	96,95	100,00	100,00
33	Kota Semarang	100,00	99,59	100,00	100,00
34	Kota Pekalongan	100,00	98,10	100,00	65,41
35	Kota Tegal	100,00	99,33	100,00	94,82
Provinsi Jawa Tengah		99,96	96,21	99,44	88,25

Tabel 19
Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin
menurut Kabupaten/Kota dan Golongan Umur, Maret 2015

No	Kabupaten/Kota	Angka Melek Huruf		Angka Partisipasi Sekolah	
		15 - 24 Tahun	15 - 55 Tahun	7 - 12 Tahun	13 - 15 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	100,00	97,65	100,00	95,45
2	Kab. Banyumas	100,00	99,71	96,31	63,72
3	Kab. Purbalingga	100,00	99,02	98,94	82,76
4	Kab. Banjarnegara	100,00	97,47	100,00	82,80
5	Kab. Kebumen	100,00	98,44	100,00	93,64
6	Kab. Purworejo	97,04	97,84	100,00	93,62
7	Kab. Wonosobo	100,00	97,20	100,00	79,24
8	Kab. Magelang	100,00	97,81	97,82	95,64
9	Kab. Boyolali	98,40	94,97	100,00	100,00
10	Kab. Klaten	100,00	96,66	100,00	100,00
11	Kab. Sukoharjo	100,00	97,04	100,00	100,00
12	Kab. Wonogiri	100,00	94,13	100,00	91,82
13	Kab. Karanganyar	100,00	94,78	96,31	100,00
14	Kab. Sragen	100,00	92,25	96,93	100,00
15	Kab. Grobogan	100,00	98,60	98,23	100,00
16	Kab. Blora	100,00	89,79	100,00	70,52
17	Kab. Rembang	100,00	97,29	100,00	96,67
18	Kab. Pati	100,00	96,58	100,00	93,39
19	Kab. Kudus	100,00	96,82	100,00	93,08
20	Kab. Jepara	100,00	96,80	97,60	100,00
21	Kab. Demak	100,00	95,67	100,00	100,00
22	Kab. Semarang	100,00	97,49	100,00	100,00
23	Kab. Temanggung	100,00	97,26	100,00	100,00
24	Kab. Kendal	100,00	93,86	100,00	86,79
25	Kab. Batang	100,00	95,88	100,00	93,00
26	Kab. Pekalongan	100,00	99,54	100,00	91,66
27	Kab. Pemaslang	100,00	97,26	100,00	81,32
28	Kab. Tegal	100,00	98,17	96,77	94,74
29	Kab. Brebes	100,00	94,27	99,32	88,20
30	Kota Magelang	100,00	99,00	93,80	100,00
31	Kota Surakarta	100,00	98,53	100,00	100,00
32	Kota Salatiga	100,00	100,00	100,00	100,00
33	Kota Semarang	100,00	98,56	100,00	97,92
34	Kota Pekalongan	100,00	100,00	94,13	100,00
35	Kota Tegal	100,00	97,71	100,00	92,19
Provinsi Jawa Tengah		99,89	96,87	99,16	90,80

Tabel 20
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas
menurut Kabupaten/Kota dan Sektor Bekerja, September 2011

No	Kabupaten/Kota	Tidak Bekerja *)	Sektor Bekerja		Total
			Bekerja di Sektor Pertanian	Bekerja Bukan di Sektor Pertanian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	44,77	25,29	29,94	100,00
2	Kab. Banyumas	43,17	16,09	40,74	100,00
3	Kab. Purbalingga	28,13	26,71	45,16	100,00
4	Kab. Banjarnegara	29,03	46,15	24,82	100,00
5	Kab. Kebumen	32,00	35,07	32,93	100,00
6	Kab. Purworejo	30,24	36,71	33,05	100,00
7	Kab. Wonosobo	31,14	43,99	24,87	100,00
8	Kab. Magelang	26,36	48,42	25,22	100,00
9	Kab. Boyolali	28,69	44,98	26,33	100,00
10	Kab. Klaten	30,66	25,71	43,63	100,00
11	Kab. Sukoharjo	32,76	22,16	45,08	100,00
12	Kab. Wonogiri	30,12	53,86	16,02	100,00
13	Kab. Karanganyar	30,92	37,83	31,25	100,00
14	Kab. Sragen	32,24	35,30	32,46	100,00
15	Kab. Grobogan	29,52	50,98	19,50	100,00
16	Kab. Blora	28,90	49,52	21,58	100,00
17	Kab. Rembang	38,50	37,44	24,06	100,00
18	Kab. Pati	41,14	39,04	19,82	100,00
19	Kab. Kudus	30,92	22,04	47,04	100,00
20	Kab. Jepara	36,50	15,55	47,95	100,00
21	Kab. Demak	36,26	32,30	31,44	100,00
22	Kab. Semarang	35,46	37,09	27,45	100,00
23	Kab. Temanggung	25,62	44,08	30,30	100,00
24	Kab. Kendal	37,38	42,73	19,89	100,00
25	Kab. Batang	39,03	29,42	31,55	100,00
26	Kab. Pekalongan	35,35	21,63	43,02	100,00
27	Kab. Pemasang	49,08	27,19	23,73	100,00
28	Kab. Tegal	41,72	29,74	28,54	100,00
29	Kab. Brebes	36,46	43,21	20,33	100,00
30	Kota Magelang	39,73	1,27	59,00	100,00
31	Kota Surakarta	34,95	0,00	65,05	100,00
32	Kota Salatiga	46,25	6,18	47,57	100,00
33	Kota Semarang	40,13	3,88	55,99	100,00
34	Kota Pekalongan	36,92	0,76	62,32	100,00
35	Kota Tegal	39,77	4,03	56,20	100,00
Provinsi Jawa Tengah		35,15	33,78	31,07	100,00

Catatan : *) Termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja

Tabel 21
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas
menurut Kabupaten/Kota dan Sektor Bekerja, September 2012

No	Kabupaten/Kota	Tidak Bekerja *)	Sektor Bekerja		Total
			Bekerja di Sektor Pertanian	Bekerja Bukan di Sektor Pertanian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	39,57	24,86	35,57	100,00
2	Kab. Banyumas	38,61	23,04	38,35	100,00
3	Kab. Purbalingga	31,91	19,18	48,91	100,00
4	Kab. Banjarnegara	27,88	53,05	19,08	100,00
5	Kab. Kebumen	33,53	25,33	41,14	100,00
6	Kab. Purworejo	31,14	41,53	27,33	100,00
7	Kab. Wonosobo	27,95	48,98	23,07	100,00
8	Kab. Magelang	26,07	39,42	34,51	100,00
9	Kab. Boyolali	20,67	48,66	30,68	100,00
10	Kab. Klaten	29,03	19,30	51,67	100,00
11	Kab. Sukoharjo	43,16	10,43	46,41	100,00
12	Kab. Wonogiri	27,38	46,06	26,55	100,00
13	Kab. Karanganyar	27,97	37,20	34,83	100,00
14	Kab. Sragen	30,85	44,94	24,21	100,00
15	Kab. Grobogan	29,83	47,28	22,88	100,00
16	Kab. Blora	33,86	51,45	14,69	100,00
17	Kab. Rembang	32,38	39,39	28,23	100,00
18	Kab. Pati	36,31	37,99	25,70	100,00
19	Kab. Kudus	30,53	12,53	56,94	100,00
20	Kab. Jepara	33,16	13,15	53,68	100,00
21	Kab. Demak	41,55	31,01	27,45	100,00
22	Kab. Semarang	31,81	36,79	31,40	100,00
23	Kab. Temanggung	27,37	44,99	27,63	100,00
24	Kab. Kendal	34,03	42,07	23,91	100,00
25	Kab. Batang	40,49	26,60	32,91	100,00
26	Kab. Pekalongan	32,07	17,19	50,74	100,00
27	Kab. Pemasang	43,37	34,50	22,13	100,00
28	Kab. Tegal	46,31	20,66	33,04	100,00
29	Kab. Brebes	41,87	30,23	27,90	100,00
30	Kota Magelang	43,79	0,00	56,21	100,00
31	Kota Surakarta	33,81	0,00	66,19	100,00
32	Kota Salatiga	44,40	8,25	47,35	100,00
33	Kota Semarang	28,05	0,00	71,95	100,00
34	Kota Pekalongan	32,88	7,04	60,08	100,00
35	Kota Tegal	37,61	5,98	56,40	100,00
Provinsi Jawa Tengah		34,16	31,92	33,92	100,00

Catatan : *) Termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja

Tabel 22
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas
menurut Kabupaten/Kota dan Sektor Bekerja, September 2013

No	Kabupaten/Kota	Tidak Bekerja *)	Sektor Bekerja		Total
			Bekerja di Sektor Pertanian	Bekerja Bukan di Sektor Pertanian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	43,64	22,78	33,58	100,00
2	Kab. Banyumas	38,40	21,18	40,41	100,00
3	Kab. Purbalingga	33,63	21,56	44,81	100,00
4	Kab. Banjarnegara	21,50	62,81	15,69	100,00
5	Kab. Kebumen	43,62	23,93	32,44	100,00
6	Kab. Purworejo	41,77	31,71	26,52	100,00
7	Kab. Wonosobo	26,09	49,76	24,15	100,00
8	Kab. Magelang	30,30	40,75	28,95	100,00
9	Kab. Boyolali	21,96	55,32	22,73	100,00
10	Kab. Klaten	38,23	19,42	42,34	100,00
11	Kab. Sukoharjo	35,90	18,10	46,00	100,00
12	Kab. Wonogiri	34,10	50,60	15,29	100,00
13	Kab. Karanganyar	31,60	35,10	33,29	100,00
14	Kab. Sragen	34,56	34,88	30,56	100,00
15	Kab. Grobogan	24,44	59,58	15,98	100,00
16	Kab. Blora	29,06	51,39	19,55	100,00
17	Kab. Rembang	33,08	37,18	29,74	100,00
18	Kab. Pati	40,09	31,75	28,15	100,00
19	Kab. Kudus	33,88	13,93	52,19	100,00
20	Kab. Jepara	35,78	20,14	44,08	100,00
21	Kab. Demak	36,84	28,08	35,08	100,00
22	Kab. Semarang	23,32	39,51	37,17	100,00
23	Kab. Temanggung	25,72	47,54	26,73	100,00
24	Kab. Kendal	36,06	37,50	26,44	100,00
25	Kab. Batang	39,27	27,84	32,89	100,00
26	Kab. Pekalongan	37,99	14,20	47,80	100,00
27	Kab. Pemasang	38,48	28,21	33,31	100,00
28	Kab. Tegal	42,82	27,23	29,95	100,00
29	Kab. Brebes	37,82	42,01	20,17	100,00
30	Kota Magelang	38,75	0,61	60,64	100,00
31	Kota Surakarta	37,72	0,00	62,28	100,00
32	Kota Salatiga	51,94	3,01	45,05	100,00
33	Kota Semarang	35,72	2,69	61,59	100,00
34	Kota Pekalongan	45,55	3,39	51,05	100,00
35	Kota Tegal	53,76	8,04	38,19	100,00
Provinsi Jawa Tengah		35,06	33,17	31,76	100,00

Catatan : *) Termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja

Tabel 23
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas
menurut Kabupaten/Kota dan Sektor Bekerja, September 2014

No	Kabupaten/Kota	Tidak Bekerja *)	Sektor Bekerja		Total
			Bekerja di Sektor Pertanian	Bekerja Bukan di Sektor Pertanian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	42,33	27,85	29,82	100,00
2	Kab. Banyumas	40,33	13,92	45,75	100,00
3	Kab. Purbalingga	30,52	22,35	47,13	100,00
4	Kab. Banjarnegara	24,96	47,77	27,28	100,00
5	Kab. Kebumen	35,31	23,39	41,30	100,00
6	Kab. Purworejo	34,25	34,63	31,12	100,00
7	Kab. Wonosobo	29,17	43,39	27,44	100,00
8	Kab. Magelang	23,29	47,24	29,47	100,00
9	Kab. Boyolali	26,88	43,42	29,70	100,00
10	Kab. Klaten	31,43	25,18	43,38	100,00
11	Kab. Sukoharjo	38,14	14,07	47,79	100,00
12	Kab. Wonogiri	28,54	53,63	17,83	100,00
13	Kab. Karanganyar	28,47	38,84	32,69	100,00
14	Kab. Sragen	34,70	31,40	33,91	100,00
15	Kab. Grobogan	28,10	52,42	19,48	100,00
16	Kab. Blora	32,69	50,17	17,14	100,00
17	Kab. Rembang	37,00	34,14	28,85	100,00
18	Kab. Pati	40,04	33,36	26,60	100,00
19	Kab. Kudus	32,17	9,14	58,69	100,00
20	Kab. Jepara	40,10	10,19	49,72	100,00
21	Kab. Demak	43,65	26,83	29,52	100,00
22	Kab. Semarang	28,10	39,23	32,67	100,00
23	Kab. Temanggung	24,85	51,44	23,72	100,00
24	Kab. Kendal	34,44	38,69	26,88	100,00
25	Kab. Batang	35,81	29,13	35,06	100,00
26	Kab. Pekalongan	33,51	19,83	46,66	100,00
27	Kab. Pemasang	46,12	18,42	35,46	100,00
28	Kab. Tegal	46,90	22,22	30,88	100,00
29	Kab. Brebes	34,06	37,09	28,85	100,00
30	Kota Magelang	38,68	2,97	58,35	100,00
31	Kota Surakarta	30,98	0,00	69,02	100,00
32	Kota Salatiga	39,52	9,28	51,19	100,00
33	Kota Semarang	41,01	8,19	50,79	100,00
34	Kota Pekalongan	37,05	12,71	50,24	100,00
35	Kota Tegal	53,08	5,05	41,87	100,00
Provinsi Jawa Tengah		34,73	31,05	34,22	100,00

Catatan : *) Termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja

Tabel 24
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas
menurut Kabupaten/Kota dan Sektor Bekerja, Maret 2015

No	Kabupaten/Kota	Tidak Bekerja *)	Sektor Bekerja		Total
			Bekerja di Sektor Pertanian	Bekerja Bukan di Sektor Pertanian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	42,90	24,69	32,41	100,00
2	Kab. Banyumas	40,78	18,81	40,41	100,00
3	Kab. Purbalingga	34,66	21,80	43,55	100,00
4	Kab. Banjarnegara	27,15	46,16	26,69	100,00
5	Kab. Kebumen	44,66	21,88	33,46	100,00
6	Kab. Purworejo	39,69	29,20	31,10	100,00
7	Kab. Wonosobo	27,35	55,38	17,27	100,00
8	Kab. Magelang	30,22	35,68	34,10	100,00
9	Kab. Boyolali	32,00	43,52	24,48	100,00
10	Kab. Klaten	37,58	25,53	36,89	100,00
11	Kab. Sukoharjo	32,80	10,70	56,50	100,00
12	Kab. Wonogiri	30,22	58,86	10,92	100,00
13	Kab. Karanganyar	34,72	26,44	38,85	100,00
14	Kab. Sragen	37,20	31,58	31,22	100,00
15	Kab. Grobogan	31,79	46,48	21,73	100,00
16	Kab. Blora	33,35	51,79	14,86	100,00
17	Kab. Rembang	36,73	31,57	31,69	100,00
18	Kab. Pati	44,87	25,31	29,82	100,00
19	Kab. Kudus	32,50	7,81	59,70	100,00
20	Kab. Jepara	40,28	13,15	46,56	100,00
21	Kab. Demak	34,01	27,12	38,87	100,00
22	Kab. Semarang	29,01	44,08	26,91	100,00
23	Kab. Temanggung	25,34	52,92	21,75	100,00
24	Kab. Kendal	42,12	24,31	33,56	100,00
25	Kab. Batang	34,85	31,50	33,65	100,00
26	Kab. Pekalongan	37,84	9,82	52,34	100,00
27	Kab. Pemasang	43,54	24,68	31,78	100,00
28	Kab. Tegal	50,09	23,87	26,05	100,00
29	Kab. Brebes	40,86	33,43	25,71	100,00
30	Kota Magelang	38,60	0,00	61,40	100,00
31	Kota Surakarta	29,25	1,09	69,66	100,00
32	Kota Salatiga	39,12	4,13	56,75	100,00
33	Kota Semarang	32,70	3,30	64,01	100,00
34	Kota Pekalongan	38,31	0,00	61,69	100,00
35	Kota Tegal	41,94	6,64	51,42	100,00
Provinsi Jawa Tengah		36,96	29,79	33,25	100,00

Catatan : *) Termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja

Tabel 25
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas
menurut Kabupaten/Kota dan Status Bekerja, September 2011

No	Kabupaten/Kota	Tidak Bekerja *)	Status Bekerja		Total
			Bekerja di Sektor Informal	Bekerja di Sektor Formal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	44,77	47,26	7,97	100,00
2	Kab. Banyumas	43,18	46,86	9,96	100,00
3	Kab. Purbalingga	28,13	51,11	20,76	100,00
4	Kab. Banjarnegara	29,03	61,74	9,23	100,00
5	Kab. Kebumen	32,00	59,88	8,12	100,00
6	Kab. Purworejo	30,24	60,02	9,74	100,00
7	Kab. Wonosobo	31,14	59,07	9,79	100,00
8	Kab. Magelang	26,36	64,77	8,87	100,00
9	Kab. Boyolali	28,69	59,16	12,15	100,00
10	Kab. Klaten	30,66	50,63	18,71	100,00
11	Kab. Sukoharjo	32,76	41,46	25,78	100,00
12	Kab. Wonogiri	30,12	65,07	4,81	100,00
13	Kab. Karanganyar	30,92	57,67	11,41	100,00
14	Kab. Sragen	32,24	47,82	19,94	100,00
15	Kab. Grobogan	29,52	61,13	9,35	100,00
16	Kab. Blora	28,90	65,16	5,94	100,00
17	Kab. Rembang	38,51	49,68	11,81	100,00
18	Kab. Pati	41,14	47,24	11,62	100,00
19	Kab. Kudus	30,92	40,73	28,35	100,00
20	Kab. Jepara	36,50	33,30	30,20	100,00
21	Kab. Demak	36,26	50,18	13,56	100,00
22	Kab. Semarang	35,46	52,94	11,60	100,00
23	Kab. Temanggung	25,62	62,91	11,47	100,00
24	Kab. Kendal	37,38	51,06	11,56	100,00
25	Kab. Batang	39,03	54,19	6,78	100,00
26	Kab. Pekalongan	35,35	34,97	29,68	100,00
27	Kab. Pemasang	49,08	42,70	8,22	100,00
28	Kab. Tegal	41,72	47,36	10,92	100,00
29	Kab. Brebes	36,46	56,85	6,69	100,00
30	Kota Magelang	39,73	33,43	26,84	100,00
31	Kota Surakarta	34,95	26,93	38,12	100,00
32	Kota Salatiga	46,25	30,15	23,60	100,00
33	Kota Semarang	40,12	16,79	43,09	100,00
34	Kota Pekalongan	36,92	15,59	47,49	100,00
35	Kota Tegal	39,77	33,80	26,43	100,00
Provinsi Jawa Tengah		35,15	51,62	13,23	100,00

Catatan : *) Termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja

Tabel 26
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas
menurut Kabupaten/Kota dan Status Bekerja, September 2012

No	Kabupaten/Kota	Tidak Bekerja *)	Status Bekerja		Total
			Bekerja di Sektor Informal	Bekerja di Sektor Formal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	39,57	50,71	9,73	100,00
2	Kab. Banyumas	38,61	50,13	11,27	100,00
3	Kab. Purbalingga	31,91	42,00	26,09	100,00
4	Kab. Banjarnegara	27,88	64,89	7,24	100,00
5	Kab. Kebumen	33,53	59,43	7,04	100,00
6	Kab. Purworejo	31,14	61,77	7,09	100,00
7	Kab. Wonosobo	27,95	62,95	9,09	100,00
8	Kab. Magelang	26,07	65,58	8,35	100,00
9	Kab. Boyolali	20,67	61,81	17,52	100,00
10	Kab. Klaten	29,03	51,60	19,37	100,00
11	Kab. Sukoharjo	43,16	33,40	23,44	100,00
12	Kab. Wonogiri	27,38	62,54	10,08	100,00
13	Kab. Karanganyar	27,97	57,82	14,21	100,00
14	Kab. Sragen	30,85	55,81	13,35	100,00
15	Kab. Grobogan	29,83	65,88	4,28	100,00
16	Kab. Blora	33,86	58,59	7,55	100,00
17	Kab. Rembang	32,38	54,69	12,93	100,00
18	Kab. Pati	36,31	57,09	6,60	100,00
19	Kab. Kudus	30,53	31,91	37,56	100,00
20	Kab. Jepara	33,16	32,42	34,41	100,00
21	Kab. Demak	41,55	49,10	9,35	100,00
22	Kab. Semarang	31,81	54,96	13,23	100,00
23	Kab. Temanggung	27,37	61,37	11,25	100,00
24	Kab. Kendal	34,03	49,54	16,44	100,00
25	Kab. Batang	40,49	45,52	13,99	100,00
26	Kab. Pekalongan	32,07	38,39	29,54	100,00
27	Kab. Pemasang	43,37	51,29	5,35	100,00
28	Kab. Tegal	46,31	42,85	10,84	100,00
29	Kab. Brebes	41,87	47,91	10,21	100,00
30	Kota Magelang	43,79	23,88	32,33	100,00
31	Kota Surakarta	33,81	21,42	44,76	100,00
32	Kota Salatiga	44,40	28,86	26,74	100,00
33	Kota Semarang	28,05	29,61	42,34	100,00
34	Kota Pekalongan	32,88	14,11	53,01	100,00
35	Kota Tegal	37,61	30,44	31,94	100,00
Provinsi Jawa Tengah		34,16	52,00	13,84	100,00

Catatan : *) Termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja

Tabel 27
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas
menurut Kabupaten/Kota dan Status Bekerja, September 2013

No	Kabupaten/Kota	Tidak Bekerja *)	Status Bekerja		Total
			Bekerja di Sektor Informal	Bekerja di Sektor Formal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	43,64	47,88	8,48	100,00
2	Kab. Banyumas	38,40	48,86	12,73	100,00
3	Kab. Purbalingga	33,63	47,41	18,96	100,00
4	Kab. Banjarnegara	21,50	74,44	4,06	100,00
5	Kab. Kebumen	43,62	49,56	6,81	100,00
6	Kab. Purworejo	41,77	47,94	10,28	100,00
7	Kab. Wonosobo	26,09	68,64	5,28	100,00
8	Kab. Magelang	30,30	60,37	9,33	100,00
9	Kab. Boyolali	21,96	64,94	13,11	100,00
10	Kab. Klaten	38,23	39,64	22,12	100,00
11	Kab. Sukoharjo	35,90	33,49	30,61	100,00
12	Kab. Wonogiri	34,10	57,57	8,32	100,00
13	Kab. Karanganyar	31,60	52,50	15,90	100,00
14	Kab. Sragen	34,56	50,73	14,71	100,00
15	Kab. Grobogan	24,44	72,80	2,76	100,00
16	Kab. Blora	29,06	60,58	10,36	100,00
17	Kab. Rembang	33,08	53,02	13,90	100,00
18	Kab. Pati	40,09	47,18	12,73	100,00
19	Kab. Kudus	33,88	31,67	34,44	100,00
20	Kab. Jepara	35,78	33,40	30,82	100,00
21	Kab. Demak	36,84	47,02	16,14	100,00
22	Kab. Semarang	23,32	58,84	17,84	100,00
23	Kab. Temanggung	25,72	67,76	6,52	100,00
24	Kab. Kendal	36,06	50,21	13,72	100,00
25	Kab. Batang	39,27	49,99	10,74	100,00
26	Kab. Pekalongan	37,99	34,27	27,73	100,00
27	Kab. Pemasang	38,48	48,93	12,58	100,00
28	Kab. Tegal	42,82	40,23	16,95	100,00
29	Kab. Brebes	37,82	55,18	7,00	100,00
30	Kota Magelang	38,75	23,40	37,85	100,00
31	Kota Surakarta	37,72	24,64	37,64	100,00
32	Kota Salatiga	51,94	27,20	20,85	100,00
33	Kota Semarang	35,72	39,48	24,80	100,00
34	Kota Pekalongan	45,55	12,58	41,87	100,00
35	Kota Tegal	53,76	24,36	21,87	100,00
Provinsi Jawa Tengah		35,06	51,43	13,51	100,00

Catatan : *) Termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja

Tabel 28
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas
menurut Kabupaten/Kota dan Status Bekerja, September 2014

No	Kabupaten/Kota	Tidak Bekerja *)	Status Bekerja		Total
			Bekerja di Sektor Informal	Bekerja di Sektor Formal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	42,33	52,08	5,60	100,00
2	Kab. Banyumas	40,33	47,14	12,53	100,00
3	Kab. Purbalingga	30,52	47,81	21,67	100,00
4	Kab. Banjarnegara	24,96	65,93	9,11	100,00
5	Kab. Kebumen	35,31	52,62	12,06	100,00
6	Kab. Purworejo	34,25	56,79	8,96	100,00
7	Kab. Wonosobo	29,17	58,68	12,15	100,00
8	Kab. Magelang	23,29	68,42	8,29	100,00
9	Kab. Boyolali	26,88	57,67	15,46	100,00
10	Kab. Klaten	31,43	47,01	21,55	100,00
11	Kab. Sukoharjo	38,14	28,47	33,39	100,00
12	Kab. Wonogiri	28,54	66,41	5,04	100,00
13	Kab. Karanganyar	28,47	49,90	21,63	100,00
14	Kab. Sragen	34,70	51,46	13,84	100,00
15	Kab. Grobogan	28,10	65,01	6,88	100,00
16	Kab. Blora	32,69	63,05	4,26	100,00
17	Kab. Rembang	37,00	46,95	16,04	100,00
18	Kab. Pati	40,04	50,44	9,52	100,00
19	Kab. Kudus	32,17	25,51	42,32	100,00
20	Kab. Jepara	40,10	35,96	23,94	100,00
21	Kab. Demak	43,65	42,21	14,14	100,00
22	Kab. Semarang	28,10	57,68	14,22	100,00
23	Kab. Temanggung	24,85	66,16	9,00	100,00
24	Kab. Kendal	34,44	50,80	14,76	100,00
25	Kab. Batang	35,81	50,38	13,80	100,00
26	Kab. Pekalongan	33,51	39,95	26,53	100,00
27	Kab. Pemaslang	46,12	41,74	12,14	100,00
28	Kab. Tegal	46,90	35,89	17,21	100,00
29	Kab. Brebes	34,06	55,09	10,85	100,00
30	Kota Magelang	38,68	20,62	40,70	100,00
31	Kota Surakarta	30,98	25,33	43,68	100,00
32	Kota Salatiga	39,52	23,62	36,86	100,00
33	Kota Semarang	41,01	36,64	22,35	100,00
34	Kota Pekalongan	37,05	13,75	49,20	100,00
35	Kota Tegal	53,08	23,88	23,04	100,00
Provinsi Jawa Tengah		34,73	50,73	14,54	100,00

Catatan : *) Termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja

Tabel 29
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas
menurut Kabupaten/Kota dan Status Bekerja, Maret 2015

No	Kabupaten/Kota	Tidak Bekerja *)	Status Bekerja		Total
			Bekerja di Sektor Informal	Bekerja di Sektor Formal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	42,90	44,91	12,19	100,00
2	Kab. Banyumas	40,78	48,25	10,98	100,00
3	Kab. Purbalingga	34,66	45,39	19,95	100,00
4	Kab. Banjarnegara	27,15	64,21	8,64	100,00
5	Kab. Kebumen	44,66	39,73	15,61	100,00
6	Kab. Purworejo	39,69	49,53	10,78	100,00
7	Kab. Wonosobo	27,35	65,64	7,01	100,00
8	Kab. Magelang	30,22	58,66	11,12	100,00
9	Kab. Boyolali	32,00	54,09	13,91	100,00
10	Kab. Klaten	37,58	45,12	17,29	100,00
11	Kab. Sukoharjo	32,80	40,47	26,73	100,00
12	Kab. Wonogiri	30,22	63,31	6,46	100,00
13	Kab. Karanganyar	34,72	41,42	23,87	100,00
14	Kab. Sragen	37,20	51,71	11,08	100,00
15	Kab. Grobogan	31,79	62,79	5,42	100,00
16	Kab. Blora	33,35	58,34	8,30	100,00
17	Kab. Rembang	36,73	47,37	15,89	100,00
18	Kab. Pati	44,87	39,96	15,16	100,00
19	Kab. Kudus	32,50	26,18	41,32	100,00
20	Kab. Jepara	40,28	26,71	33,00	100,00
21	Kab. Demak	34,01	43,15	22,84	100,00
22	Kab. Semarang	29,01	60,16	10,83	100,00
23	Kab. Temanggung	25,34	63,91	10,75	100,00
24	Kab. Kendal	42,12	41,08	16,80	100,00
25	Kab. Batang	34,85	47,13	18,02	100,00
26	Kab. Pekalongan	37,84	30,42	31,74	100,00
27	Kab. Pemaslang	43,54	37,19	19,27	100,00
28	Kab. Tegal	50,09	25,76	24,15	100,00
29	Kab. Brebes	40,86	47,74	11,40	100,00
30	Kota Magelang	38,60	23,84	37,56	100,00
31	Kota Surakarta	29,25	31,48	39,26	100,00
32	Kota Salatiga	39,12	18,92	41,95	100,00
33	Kota Semarang	32,70	29,51	37,80	100,00
34	Kota Pekalongan	38,31	13,93	47,75	100,00
35	Kota Tegal	41,94	25,05	33,01	100,00
Provinsi Jawa Tengah		36,96	46,75	16,29	100,00

Catatan : *) Termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja

Tabel 30
Persentase Balita (Bawah Lima Tahun) di Rumah Tangga Miskin yang Telah Diimunisasi
menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Imunisasi, September 2011

No	Kabupaten/Kota	Jenis Imunisasi				
		Bacillus Calmette Guerin (BCG)	Difteri Pertusis Tetanus (DPT)	POLIO	CAMPAK/MORBILI	HEPATITIS B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kab. Cilacap	99,50	94,81	95,22	78,68	89,72
2	Kab. Banyumas	97,40	92,91	92,91	76,72	91,31
3	Kab. Purbalingga	96,27	87,77	90,93	71,03	85,20
4	Kab. Banjarnegara	98,20	96,14	96,14	85,70	91,27
5	Kab. Kebumen	100,00	98,39	98,39	86,49	95,28
6	Kab. Purworejo	100,00	100,00	100,00	86,19	95,94
7	Kab. Wonosobo	100,00	96,63	99,19	91,40	100,00
8	Kab. Magelang	96,37	93,77	93,77	85,48	96,37
9	Kab. Boyolali	95,55	94,83	94,83	90,64	91,69
10	Kab. Klaten	96,69	96,69	96,69	78,24	89,09
11	Kab. Sukoharjo	93,35	87,12	97,65	80,16	87,12
12	Kab. Wonogiri	95,36	95,36	95,36	86,52	92,89
13	Kab. Karanganyar	100,00	97,61	100,00	81,39	95,47
14	Kab. Sragen	96,90	93,50	93,50	75,58	89,78
15	Kab. Grobogan	100,00	97,85	98,45	84,96	87,73
16	Kab. Blora	97,12	97,12	93,09	75,52	89,57
17	Kab. Rembang	100,00	97,25	97,25	81,57	94,01
18	Kab. Pati	91,75	91,75	91,75	74,60	75,56
19	Kab. Kudus	96,81	84,21	84,21	72,96	81,69
20	Kab. Jepara	81,40	88,98	85,90	64,02	64,16
21	Kab. Demak	96,40	92,53	93,19	79,56	89,14
22	Kab. Semarang	100,00	95,97	95,97	84,35	98,00
23	Kab. Temanggung	97,65	100,00	100,00	87,49	94,61
24	Kab. Kendal	90,94	94,08	88,04	69,51	94,08
25	Kab. Batang	100,00	97,47	97,47	90,36	97,47
26	Kab. Pekalongan	100,00	91,86	91,86	71,68	82,85
27	Kab. Pemasang	81,54	78,74	79,78	66,29	78,42
28	Kab. Tegal	92,74	86,84	89,42	74,72	77,99
29	Kab. Brebes	93,41	89,52	85,77	74,14	85,33
30	Kota Magelang	100,00	94,37	94,37	84,47	92,95
31	Kota Surakarta	97,12	97,12	97,12	82,97	89,90
32	Kota Salatiga	100,00	100,00	100,00	85,69	100,00
33	Kota Semarang	100,00	100,00	100,00	94,48	87,15
34	Kota Pekalongan	87,17	86,01	74,76	55,08	62,18
35	Kota Tegal	100,00	94,63	89,27	61,59	72,48
Provinsi Jawa Tengah		96,03	93,28	93,30	79,18	88,60

Tabel 31
Persentase Balita (Bawah Lima Tahun) di Rumah Tangga Miskin yang Telah Diimunisasi
menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Imunisasi, September 2012

No	Kabupaten/Kota	Jenis Imunisasi				
		Bacillus Calmatto Guenin (BCG)	Difteri Pertusis Tetanus (DPT)	POLIO	CAMPAK/MORBILI	HEPATITIS B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kab. Cilacap	98,43	94,68	95,94	81,78	92,50
2	Kab. Banyumas	95,91	96,97	96,97	88,67	96,13
3	Kab. Purbalingga	100,00	98,32	100,00	86,47	98,32
4	Kab. Banjarnegara	100,00	96,13	97,88	84,91	96,13
5	Kab. Kebumen	98,26	94,04	95,61	82,91	90,51
6	Kab. Purworejo	93,38	90,54	93,07	75,37	93,14
7	Kab. Wonosobo	100,00	100,00	100,00	90,45	100,00
8	Kab. Magelang	100,00	96,92	100,00	74,85	87,73
9	Kab. Boyolali	98,04	95,87	93,44	79,14	87,53
10	Kab. Klaten	100,00	98,40	98,40	83,76	100,00
11	Kab. Sukoharjo	100,00	100,00	97,81	93,73	100,00
12	Kab. Wonogiri	97,88	97,88	97,88	94,33	97,88
13	Kab. Karanganyar	100,00	98,47	98,47	81,29	94,30
14	Kab. Sragen	100,00	96,57	96,57	82,61	95,64
15	Kab. Grobogan	96,60	96,60	97,69	81,52	87,96
16	Kab. Blora	100,00	96,30	100,00	77,16	94,14
17	Kab. Rembang	97,55	88,40	88,40	76,23	89,47
18	Kab. Pati	100,00	97,57	95,57	77,85	92,00
19	Kab. Kudus	100,00	93,53	93,53	74,20	94,87
20	Kab. Jepara	94,27	97,28	95,06	70,11	88,39
21	Kab. Demak	100,00	100,00	100,00	82,54	90,89
22	Kab. Semarang	93,18	93,18	93,18	65,51	85,25
23	Kab. Temanggung	96,70	93,63	93,63	71,57	94,82
24	Kab. Kendal	100,00	95,34	91,09	77,79	86,76
25	Kab. Batang	94,55	94,55	92,37	80,60	94,08
26	Kab. Pekalongan	100,00	100,00	98,31	82,88	90,57
27	Kab. Pemasang	83,88	85,37	91,20	73,29	79,02
28	Kab. Tegal	91,79	91,79	91,79	79,50	91,79
29	Kab. Brebes	97,75	90,62	92,06	78,98	85,20
30	Kota Magelang	89,81	89,81	89,81	76,90	89,81
31	Kota Surakarta	100,00	100,00	100,00	88,00	100,00
32	Kota Salatiga	94,82	94,82	94,82	94,82	94,82
33	Kota Semarang	100,00	100,00	100,00	82,48	95,11
34	Kota Pekalongan	92,01	92,01	92,01	70,88	80,81
35	Kota Tegal	100,00	85,98	85,98	67,51	85,98
Provinsi Jawa Tengah		97,32	95,31	95,95	81,06	91,88

Tabel 32
Persentase Balita (Bawah Lima Tahun) di Rumah Tangga Miskin yang Telah Diimunisasi
menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Imunisasi, September 2013

No	Kabupaten/Kota	Jenis Imunisasi				
		Bacillus Calmatto Guenin (BCG)	Difteri Pertusis Tetanus (DPT)	POLIO	CAMPAK/MORBILI	HEPATITIS B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kab. Cilacap	95,81	95,81	95,81	77,33	92,95
2	Kab. Banyumas	98,33	95,50	98,33	84,85	94,22
3	Kab. Purbalingga	95,76	97,99	96,79	83,07	93,28
4	Kab. Banjarnegara	96,89	96,89	100,00	80,52	93,22
5	Kab. Kebumen	98,57	93,89	94,58	83,78	88,23
6	Kab. Purworejo	100,00	100,00	100,00	85,75	100,00
7	Kab. Wonosobo	96,37	95,30	95,46	83,77	92,50
8	Kab. Magelang	100,00	96,33	92,42	78,95	88,11
9	Kab. Boyolali	100,00	100,00	100,00	86,96	93,36
10	Kab. Klaten	95,37	97,74	97,74	75,48	90,11
11	Kab. Sukoharjo	94,67	91,67	91,67	91,67	97,00
12	Kab. Wonogiri	97,06	97,06	97,06	72,00	97,06
13	Kab. Karanganyar	100,00	95,61	95,61	76,84	90,39
14	Kab. Sragen	95,59	95,59	98,25	81,33	95,59
15	Kab. Grobogan	100,00	98,55	100,00	86,37	96,70
16	Kab. Blora	100,00	95,88	98,59	83,90	98,59
17	Kab. Rembang	92,74	88,45	95,62	72,27	95,63
18	Kab. Pati	92,45	90,64	92,45	75,31	87,71
19	Kab. Kudus	93,64	93,64	85,55	78,06	85,00
20	Kab. Jepara	93,61	93,61	85,11	63,74	82,09
21	Kab. Demak	100,00	97,08	97,08	82,94	91,29
22	Kab. Semarang	95,30	100,00	100,00	83,57	90,62
23	Kab. Temanggung	100,00	95,15	96,32	72,74	93,43
24	Kab. Kendal	100,00	98,79	98,79	90,01	98,79
25	Kab. Batang	100,00	98,34	98,34	90,37	98,34
26	Kab. Pekalongan	96,06	87,20	84,01	78,32	86,63
27	Kab. Pemasang	89,74	83,10	80,33	72,12	83,10
28	Kab. Tegal	97,69	97,69	94,52	87,00	89,87
29	Kab. Brebes	92,07	91,08	87,65	71,80	82,13
30	Kota Magelang	95,71	95,71	90,08	77,92	94,59
31	Kota Surakarta	100,00	100,00	100,00	92,84	100,00
32	Kota Salatiga	100,00	100,00	100,00	97,66	100,00
33	Kota Semarang	100,00	100,00	90,48	79,08	100,00
34	Kota Pekalongan	100,00	97,28	97,28	91,10	90,06
35	Kota Tegal	100,00	100,00	100,00	75,97	100,00
Provinsi Jawa Tengah		96,60	94,80	94,36	80,26	91,37

Tabel 33
Persentase Balita (Bawah Lima Tahun) di Rumah Tangga Miskin yang Telah Diimunisasi
menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Imunisasi, September 2014

No	Kabupaten/Kota	Jenis Imunisasi				
		Bacillus Calmatto Guenin (BCG)	Difteri Pertusis Tetanus (DPT)	POLIO	CAMPAK/MORBILI	HEPATITIS B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kab. Cilacap	95,48	93,69	95,48	81,77	92,82
2	Kab. Banyumas	100,00	98,34	98,34	89,95	96,33
3	Kab. Purbalingga	98,55	98,55	98,55	89,39	98,91
4	Kab. Banjarnegara	97,27	93,27	100,00	77,65	79,99
5	Kab. Kebumen	93,48	93,48	91,67	82,21	88,84
6	Kab. Purworejo	97,57	96,15	89,50	85,44	93,71
7	Kab. Wonosobo	95,63	92,52	95,81	86,25	93,69
8	Kab. Magelang	96,14	97,39	97,39	82,71	87,48
9	Kab. Boyolali	100,00	100,00	100,00	76,45	93,21
10	Kab. Klaten	96,90	96,90	96,90	80,37	89,17
11	Kab. Sukoharjo	100,00	100,00	100,00	96,91	96,91
12	Kab. Wonogiri	97,09	97,09	93,40	84,21	93,40
13	Kab. Karanganyar	100,00	100,00	100,00	70,99	100,00
14	Kab. Sragen	93,98	91,58	91,58	74,07	87,32
15	Kab. Grobogan	100,00	98,20	100,00	85,50	95,65
16	Kab. Blora	100,00	92,72	96,90	85,90	90,21
17	Kab. Rembang	100,00	97,84	97,84	88,09	100,00
18	Kab. Pati	97,62	97,62	97,62	85,13	97,62
19	Kab. Kudus	92,35	92,35	92,35	63,22	75,96
20	Kab. Jepara	90,62	85,65	85,65	64,74	78,70
21	Kab. Demak	100,00	97,99	97,99	88,92	97,99
22	Kab. Semarang	94,36	96,68	100,00	80,71	94,36
23	Kab. Temanggung	100,00	94,14	100,00	87,95	97,35
24	Kab. Kendal	95,54	95,54	86,94	86,94	91,39
25	Kab. Batang	100,00	100,00	100,00	93,79	100,00
26	Kab. Pekalongan	100,00	91,32	91,32	82,55	92,26
27	Kab. Pemasang	94,64	94,63	89,20	74,58	88,65
28	Kab. Tegal	97,70	91,11	91,11	81,31	84,45
29	Kab. Brebes	97,22	97,22	93,95	77,79	92,81
30	Kota Magelang	100,00	100,00	100,00	89,17	89,17
31	Kota Surakarta	100,00	100,00	100,00	76,57	91,68
32	Kota Salatiga	100,00	100,00	100,00	71,02	100,00
33	Kota Semarang	93,47	100,00	90,72	90,72	100,00
34	Kota Pekalongan	94,57	88,39	88,39	67,11	55,44
35	Kota Tegal	100,00	96,00	96,00	73,23	100,00
Provinsi Jawa Tengah		97,10	95,66	95,14	81,97	91,95

Tabel 34
Persentase Balita (Bawah Lima Tahun) di Rumah Tangga Miskin yang Telah Diimunisasi
menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Imunisasi, Maret 2015

No	Kabupaten/Kota	Jenis Imunisasi				
		Bacillus Calmatto Guenin (BCG)	Difteri Pertusis Tetanus (DPT)	POLIO	CAMPAK/MORBILI	HEPATITIS B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kab. Cilacap	91,10	82,32	90,53	80,67	84,39
2	Kab. Banyumas	96,32	97,70	94,70	87,10	94,80
3	Kab. Purbalingga	91,94	88,01	87,60	78,31	86,66
4	Kab. Banjarnegara	86,66	78,32	82,17	73,96	86,66
5	Kab. Kebumen	100,00	93,85	100,00	86,76	89,59
6	Kab. Purworejo	97,68	94,07	97,68	78,69	84,36
7	Kab. Wonosobo	97,17	89,50	91,99	76,94	91,17
8	Kab. Magelang	93,08	92,38	95,70	66,52	75,46
9	Kab. Boyolali	91,21	85,30	91,21	78,14	85,30
10	Kab. Klaten	100,00	86,42	100,00	76,80	93,53
11	Kab. Sukoharjo	100,00	100,00	100,00	86,36	94,89
12	Kab. Wonogiri	95,81	90,32	95,81	67,92	84,61
13	Kab. Karanganyar	100,00	91,15	100,00	79,30	100,00
14	Kab. Sragen	89,27	87,82	94,32	84,94	90,82
15	Kab. Grobogan	100,00	97,20	92,77	80,33	92,29
16	Kab. Blora	97,37	91,07	94,25	84,80	87,89
17	Kab. Rembang	100,00	94,63	100,00	89,15	96,41
18	Kab. Pati	88,33	86,61	86,61	67,13	83,31
19	Kab. Kudus	74,40	67,93	70,69	61,44	73,10
20	Kab. Jepara	100,00	89,03	93,98	77,64	93,56
21	Kab. Demak	97,60	83,03	97,60	71,53	97,60
22	Kab. Semarang	95,37	95,37	95,37	76,64	100,00
23	Kab. Temanggung	93,32	89,94	93,32	79,56	93,32
24	Kab. Kendal	90,33	87,38	89,16	74,88	87,38
25	Kab. Batang	94,17	80,83	94,17	76,31	88,64
26	Kab. Pekalongan	95,84	76,94	87,86	66,75	85,79
27	Kab. Pemasang	95,61	90,71	95,46	75,43	89,90
28	Kab. Tegal	84,12	81,10	84,12	72,37	84,12
29	Kab. Brebes	92,96	89,90	88,53	74,60	86,67
30	Kota Magelang	92,72	92,72	92,72	81,10	78,50
31	Kota Surakarta	96,19	96,19	96,19	93,11	84,93
32	Kota Salatiga	86,10	86,10	86,10	86,10	86,10
33	Kota Semarang	89,98	91,48	91,48	75,04	91,48
34	Kota Pekalongan	85,08	85,76	76,84	47,36	73,74
35	Kota Tegal	96,71	80,02	87,29	72,08	83,32
Provinsi Jawa Tengah		94,03	88,78	92,26	77,52	88,66

Tabel 35
Persentase Pengeluaran per Kapita per Bulan untuk Makanan
menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, September 2011

No	Kabupaten/Kota	Miskin	Tidak Miskin	Miskin dan Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	63,84	56,23	57,54
2	Kab. Banyumas	64,61	55,82	57,67
3	Kab. Purbalingga	65,32	57,74	59,49
4	Kab. Banjarnegara	61,89	57,73	58,57
5	Kab. Kebumen	66,81	58,64	60,61
6	Kab. Purworejo	65,56	58,83	60,01
7	Kab. Wonosobo	66,12	57,96	59,94
8	Kab. Magelang	65,11	58,21	59,26
9	Kab. Boyolali	61,88	55,22	56,22
10	Kab. Klaten	62,47	57,10	58,06
11	Kab. Sukoharjo	63,62	51,88	53,19
12	Kab. Wonogiri	64,04	56,84	57,97
13	Kab. Karanganyar	64,80	53,95	55,61
14	Kab. Sragen	62,45	56,17	57,30
15	Kab. Grobogan	68,39	60,81	62,13
16	Kab. Blora	68,98	59,78	61,28
17	Kab. Rembang	64,93	60,01	61,18
18	Kab. Pati	65,15	57,79	58,87
19	Kab. Kudus	63,06	51,47	52,57
20	Kab. Jepara	65,53	56,88	57,78
21	Kab. Demak	66,09	56,65	58,37
22	Kab. Semarang	62,84	54,24	55,13
23	Kab. Temanggung	64,85	56,03	57,21
24	Kab. Kendal	65,40	56,95	58,15
25	Kab. Batang	66,22	60,56	61,32
26	Kab. Pekalongan	66,05	60,16	61,04
27	Kab. Pemasang	67,64	63,09	64,03
28	Kab. Tegal	65,39	61,46	61,91
29	Kab. Brebes	66,06	57,77	59,65
30	Kota Magelang	61,44	52,22	53,24
31	Kota Surakarta	62,20	47,86	49,71
32	Kota Salatiga	61,41	49,55	50,47
33	Kota Semarang	58,70	47,65	48,28
34	Kota Pekalongan	66,99	57,86	58,78
35	Kota Tegal	62,65	51,67	52,85
Provinsi Jawa Tengah		65,02	56,73	58,07

Tabel 36
Persentase Pengeluaran per Kapita per Bulan untuk Makanan
menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, September 2012

No	Kabupaten/Kota	Miskin	Tidak Miskin	Miskin dan Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	64,56	56,47	57,75
2	Kab. Banyumas	64,84	54,89	56,83
3	Kab. Purbalingga	63,74	57,40	58,74
4	Kab. Banjarnegara	62,96	58,73	59,53
5	Kab. Kebumen	67,17	57,52	59,68
6	Kab. Purworejo	65,93	58,08	59,36
7	Kab. Wonosobo	61,99	56,52	57,75
8	Kab. Magelang	63,06	57,95	58,66
9	Kab. Boyolali	62,43	54,48	55,58
10	Kab. Klaten	61,16	55,94	56,81
11	Kab. Sukoharjo	62,33	54,19	55,02
12	Kab. Wonogiri	62,67	56,59	57,48
13	Kab. Karanganyar	61,89	53,03	54,28
14	Kab. Sragen	64,43	55,63	57,10
15	Kab. Grobogan	67,45	60,25	61,41
16	Kab. Blora	67,56	60,73	61,76
17	Kab. Rembang	64,47	57,61	59,11
18	Kab. Pati	64,79	58,72	59,55
19	Kab. Kudus	60,62	54,62	55,14
20	Kab. Jepara	62,40	56,87	57,39
21	Kab. Demak	65,22	58,72	59,80
22	Kab. Semarang	61,55	53,86	54,59
23	Kab. Temanggung	60,44	56,69	57,15
24	Kab. Kendal	62,95	56,00	56,91
25	Kab. Batang	70,67	52,30	63,34
26	Kab. Pekalongan	65,23	60,75	61,37
27	Kab. Pemasang	66,68	62,77	63,52
28	Kab. Tegal	66,07	60,96	61,51
29	Kab. Brebes	64,42	60,70	61,49
30	Kota Magelang	57,75	50,00	50,80
31	Kota Surakarta	52,85	46,16	46,97
32	Kota Salatiga	56,60	51,26	51,64
33	Kota Semarang	59,25	50,50	50,95
34	Kota Pekalongan	66,25	58,11	58,88
35	Kota Tegal	55,29	53,76	53,91
Provinsi Jawa Tengah		64,10	57,00	58,07

Tabel 37
Persentase Pengeluaran per Kapita per Bulan untuk Makanan
menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, September 2013

No	Kabupaten/Kota	Miskin	Tidak Miskin	Miskin dan Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	62,87	55,57	56,68
2	Kab. Banyumas	62,79	54,16	55,75
3	Kab. Purbalingga	66,78	59,30	60,84
4	Kab. Banjarnegara	64,73	58,37	59,56
5	Kab. Kebumen	65,31	59,61	60,82
6	Kab. Purworejo	64,98	58,97	59,90
7	Kab. Wonosobo	64,44	55,78	57,70
8	Kab. Magelang	65,62	59,74	60,56
9	Kab. Boyolali	62,04	55,54	56,40
10	Kab. Klaten	63,40	55,02	56,33
11	Kab. Sukoharjo	63,14	54,20	55,08
12	Kab. Wonogiri	66,25	59,06	60,07
13	Kab. Karanganyar	61,51	55,15	56,01
14	Kab. Sragen	62,95	55,70	56,86
15	Kab. Grobogan	67,30	63,01	63,65
16	Kab. Blora	67,28	60,12	61,17
17	Kab. Rembang	65,44	59,95	61,10
18	Kab. Pati	63,95	57,62	58,44
19	Kab. Kudus	62,48	54,54	55,22
20	Kab. Jepara	62,86	57,39	57,90
21	Kab. Demak	64,60	58,38	59,35
22	Kab. Semarang	64,04	55,54	56,26
23	Kab. Temanggung	63,28	61,24	61,49
24	Kab. Kendal	63,09	56,40	57,25
25	Kab. Batang	67,35	63,32	63,80
26	Kab. Pekalongan	64,59	59,78	60,43
27	Kab. Pemasang	66,87	61,53	62,56
28	Kab. Tegal	66,60	61,52	62,06
29	Kab. Brebes	66,24	62,23	63,06
30	Kota Magelang	57,92	50,70	51,41
31	Kota Surakarta	57,71	46,01	47,38
32	Kota Salatiga	63,88	54,17	54,79
33	Kota Semarang	56,40	46,56	47,07
34	Kota Pekalongan	63,59	58,28	58,72
35	Kota Tegal	56,77	52,06	52,48
Provinsi Jawa Tengah		64,45	57,33	58,35

Tabel 38
Persentase Pengeluaran per Kapita per Bulan untuk Makanan
menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, September 2014

No	Kabupaten/Kota	Miskin	Tidak Miskin	Miskin dan Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	61,92	56,53	57,29
2	Kab. Banyumas	61,89	55,87	56,92
3	Kab. Purbalingga	66,10	60,06	61,25
4	Kab. Banjarnegara	65,30	59,04	60,15
5	Kab. Kebumen	62,67	58,96	59,72
6	Kab. Purworejo	63,47	57,84	58,65
7	Kab. Wonosobo	64,07	56,23	57,91
8	Kab. Magelang	63,77	58,37	59,07
9	Kab. Boyolali	61,47	56,20	56,85
10	Kab. Klaten	63,34	55,51	56,65
11	Kab. Sukoharjo	63,74	52,78	53,79
12	Kab. Wonogiri	64,21	57,85	58,69
13	Kab. Karanganyar	59,94	55,17	55,77
14	Kab. Sragen	60,66	56,98	57,53
15	Kab. Grobogan	68,59	62,62	63,45
16	Kab. Blora	66,83	58,80	59,89
17	Kab. Rembang	62,72	59,69	60,28
18	Kab. Pati	64,65	58,17	58,95
19	Kab. Kudus	57,73	52,11	52,56
20	Kab. Jepara	64,21	58,55	59,03
21	Kab. Demak	63,50	58,28	59,04
22	Kab. Semarang	64,70	56,12	56,82
23	Kab. Temanggung	64,22	57,95	58,67
24	Kab. Kendal	63,59	56,68	57,49
25	Kab. Batang	65,34	61,55	61,97
26	Kab. Pekalongan	64,51	61,45	61,83
27	Kab. Pemasang	65,42	58,46	59,74
28	Kab. Tegal	68,09	61,81	62,43
29	Kab. Brebes	66,34	60,91	62,00
30	Kota Magelang	62,66	51,51	52,53
31	Kota Surakarta	56,97	45,48	46,74
32	Kota Salatiga	61,36	52,14	52,68
33	Kota Semarang	57,98	47,71	48,23
34	Kota Pekalongan	68,40	57,37	58,25
35	Kota Tegal	61,02	50,66	51,55
Provinsi Jawa Tengah		63,89	57,16	58,08

Tabel 39
Persentase Pengeluaran per Kapita per Bulan untuk Makanan
menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, Maret 2015

No	Kabupaten/Kota	Miskin	Tidak Miskin	Miskin dan Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	61,44	55,91	56,70
2	Kab. Banyumas	61,96	55,19	56,38
3	Kab. Purbalingga	62,63	55,22	56,68
4	Kab. Banjarnegara	65,19	57,31	58,76
5	Kab. Kebumen	63,36	57,03	58,32
6	Kab. Purworejo	59,97	56,30	56,82
7	Kab. Wonosobo	58,11	54,30	55,12
8	Kab. Magelang	64,55	57,07	58,05
9	Kab. Boyolali	60,24	53,02	53,92
10	Kab. Klaten	61,06	53,14	54,32
11	Kab. Sukoharjo	56,27	50,70	51,22
12	Kab. Wonogiri	62,09	55,97	56,76
13	Kab. Karanganyar	59,97	52,29	53,25
14	Kab. Sragen	61,88	50,90	52,53
15	Kab. Grobogan	67,47	62,01	62,76
16	Kab. Blora	65,07	58,49	59,38
17	Kab. Rembang	65,46	58,32	59,70
18	Kab. Pati	63,80	54,51	55,62
19	Kab. Kudus	61,07	50,87	51,66
20	Kab. Jepara	63,50	56,04	56,67
21	Kab. Demak	61,21	57,16	57,75
22	Kab. Semarang	61,92	54,67	55,26
23	Kab. Temanggung	58,17	53,81	54,33
24	Kab. Kendal	63,03	54,24	55,26
25	Kab. Batang	64,56	58,46	59,15
26	Kab. Pekalongan	61,06	58,30	58,65
27	Kab. Pemasang	65,95	59,50	60,68
28	Kab. Tegal	66,29	59,88	60,53
29	Kab. Brebes	66,13	62,07	62,88
30	Kota Magelang	59,17	51,64	52,32
31	Kota Surakarta	54,18	44,83	45,85
32	Kota Salatiga	57,55	48,72	49,24
33	Kota Semarang	56,91	44,75	45,35
34	Kota Pekalongan	61,88	55,35	55,87
35	Kota Tegal	54,01	48,90	49,33
Provinsi Jawa Tengah		62,68	55,31	56,31

Tabel 40
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih
menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, September 2011

No	Kabupaten/Kota	Miskin	Tidak Miskin	Miskin dan Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	49,94	66,05	63,83
2	Kab. Banyumas	40,73	61,82	58,31
3	Kab. Purbalingga	37,52	64,28	59,26
4	Kab. Banjarnegara	54,84	66,80	64,84
5	Kab. Kebumen	38,46	56,55	53,26
6	Kab. Purworejo	56,95	68,44	66,84
7	Kab. Wonosobo	66,97	84,04	80,45
8	Kab. Magelang	51,50	63,87	62,33
9	Kab. Boyolali	48,93	65,92	63,79
10	Kab. Klaten	52,50	63,67	61,93
11	Kab. Sukoharjo	57,03	70,85	69,64
12	Kab. Wonogiri	50,80	56,92	56,20
13	Kab. Karanganyar	57,36	78,02	75,49
14	Kab. Sragen	74,30	81,27	80,22
15	Kab. Grobogan	28,89	56,00	51,74
16	Kab. Blora	79,35	78,49	78,62
17	Kab. Rembang	58,04	61,07	60,44
18	Kab. Pati	68,92	74,52	73,78
19	Kab. Kudus	50,04	75,25	73,29
20	Kab. Jepara	48,31	67,31	65,82
21	Kab. Demak	70,23	78,36	77,02
22	Kab. Semarang	64,13	79,43	78,16
23	Kab. Temanggung	51,60	67,57	65,89
24	Kab. Kendal	66,08	77,30	75,98
25	Kab. Batang	52,06	58,22	57,51
26	Kab. Pekalongan	45,17	52,68	51,76
27	Kab. Pemasang	31,41	46,94	44,55
28	Kab. Tegal	40,94	60,46	58,75
29	Kab. Brebes	48,60	61,67	59,22
30	Kota Magelang	84,33	92,41	91,69
31	Kota Surakarta	70,90	83,57	82,35
32	Kota Salatiga	79,74	88,25	87,68
33	Kota Semarang	80,25	89,28	88,86
34	Kota Pekalongan	51,80	66,51	65,62
35	Kota Tegal	90,02	98,02	97,43
Provinsi Jawa Tengah		52,77	68,32	66,26

Tabel 41
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih
menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, September 2012

No	Kabupaten/Kota	Miskin	Tidak Miskin	Miskin dan Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	48,89	68,82	66,29
2	Kab. Banyumas	42,43	62,15	59,01
3	Kab. Purbalingga	54,27	68,27	65,77
4	Kab. Banjarnegara	70,24	73,09	72,61
5	Kab. Kebumen	32,26	51,51	48,12
6	Kab. Purworejo	62,28	67,69	66,99
7	Kab. Wonosobo	66,65	76,15	74,26
8	Kab. Magelang	51,52	66,64	64,87
9	Kab. Boyolali	43,30	62,99	60,67
10	Kab. Klaten	55,20	66,02	64,61
11	Kab. Sukoharjo	57,98	73,57	72,52
12	Kab. Wonogiri	45,14	58,34	56,87
13	Kab. Karanganyar	68,65	73,67	73,11
14	Kab. Sragen	72,36	75,84	75,33
15	Kab. Grobogan	43,28	64,53	61,34
16	Kab. Blora	76,40	75,89	75,96
17	Kab. Rembang	53,03	61,16	59,66
18	Kab. Pati	78,97	76,37	76,65
19	Kab. Kudus	98,17	83,45	84,39
20	Kab. Jepara	44,81	67,09	65,40
21	Kab. Demak	53,63	67,79	65,71
22	Kab. Semarang	73,82	84,37	83,51
23	Kab. Temanggung	59,09	69,58	68,61
24	Kab. Kendal	60,25	76,42	74,68
25	Kab. Batang	39,66	52,92	51,67
26	Kab. Pekalongan	44,60	55,60	54,44
27	Kab. Pemasang	37,96	42,59	41,95
28	Kab. Tegal	37,78	59,94	58,16
29	Kab. Brebes	45,07	56,11	54,26
30	Kota Magelang	81,94	95,72	94,69
31	Kota Surakarta	81,86	80,80	80,89
32	Kota Salatiga	70,69	91,72	90,40
33	Kota Semarang	82,12	90,16	89,79
34	Kota Pekalongan	73,64	68,43	68,79
35	Kota Tegal	97,55	96,43	96,51
Provinsi Jawa Tengah		54,58	68,25	66,58

Tabel 42
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih
menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, September 2013

No	Kabupaten/Kota	Miskin	Tidak Miskin	Miskin dan Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	55,08	69,50	67,71
2	Kab. Banyumas	33,66	67,40	62,56
3	Kab. Purbalingga	56,39	58,39	58,07
4	Kab. Banjarnegara	48,33	69,22	65,98
5	Kab. Kebumen	40,67	54,04	51,80
6	Kab. Purworejo	42,25	67,00	63,96
7	Kab. Wonosobo	78,47	84,78	83,49
8	Kab. Magelang	55,76	64,28	63,29
9	Kab. Boyolali	55,04	65,83	64,63
10	Kab. Klaten	59,79	66,61	65,68
11	Kab. Sukoharjo	73,95	72,93	73,00
12	Kab. Wonogiri	55,78	58,61	58,27
13	Kab. Karanganyar	63,80	71,42	70,62
14	Kab. Sragen	68,98	75,34	74,54
15	Kab. Grobogan	39,95	70,25	65,82
16	Kab. Blora	71,48	78,49	77,60
17	Kab. Rembang	51,38	70,36	66,86
18	Kab. Pati	76,98	75,73	75,87
19	Kab. Kudus	70,86	71,53	71,48
20	Kab. Jepara	59,49	72,93	71,87
21	Kab. Demak	65,81	71,73	70,99
22	Kab. Semarang	69,90	79,53	78,92
23	Kab. Temanggung	53,69	71,73	70,00
24	Kab. Kendal	67,08	77,79	76,59
25	Kab. Batang	60,10	61,59	61,43
26	Kab. Pekalongan	45,15	58,35	57,05
27	Kab. Pemasang	37,86	40,99	40,51
28	Kab. Tegal	40,60	56,46	55,17
29	Kab. Brebes	50,83	55,45	54,68
30	Kota Magelang	74,99	92,75	91,43
31	Kota Surakarta	68,72	83,88	82,66
32	Kota Salatiga	76,45	87,34	86,93
33	Kota Semarang	83,58	93,46	93,08
34	Kota Pekalongan	82,71	73,08	73,56
35	Kota Tegal	81,80	96,08	95,15
Provinsi Jawa Tengah		55,59	69,21	67,60

Tabel 43
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih
menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, September 2014

No	Kabupaten/Kota	Miskin	Tidak Miskin	Miskin dan Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	62,68	75,92	74,34
2	Kab. Banyumas	49,43	59,49	58,06
3	Kab. Purbalingga	40,00	63,60	59,62
4	Kab. Banjarnegara	62,70	62,96	62,92
5	Kab. Kebumen	42,38	55,11	53,11
6	Kab. Purworejo	65,59	71,34	70,63
7	Kab. Wonosobo	67,04	84,41	80,84
8	Kab. Magelang	69,34	72,22	71,94
9	Kab. Boyolali	62,05	64,57	64,29
10	Kab. Klaten	67,60	72,24	71,66
11	Kab. Sukoharjo	65,66	74,50	73,94
12	Kab. Wonogiri	65,00	63,70	63,84
13	Kab. Karanganyar	60,64	67,37	66,70
14	Kab. Sragen	78,31	81,45	81,08
15	Kab. Grobogan	48,54	70,94	68,15
16	Kab. Blora	63,51	79,93	78,03
17	Kab. Rembang	62,13	70,20	68,82
18	Kab. Pati	57,57	74,14	72,35
19	Kab. Kudus	72,95	76,88	76,65
20	Kab. Jepara	59,98	75,11	73,97
21	Kab. Demak	58,79	68,74	67,56
22	Kab. Semarang	75,37	85,72	85,04
23	Kab. Temanggung	68,87	67,57	67,70
24	Kab. Kendal	62,27	76,14	74,70
25	Kab. Batang	44,06	54,71	53,70
26	Kab. Pekalongan	49,41	55,20	54,64
27	Kab. Pemasang	49,22	45,89	46,39
28	Kab. Tegal	42,33	60,22	58,85
29	Kab. Brebes	49,43	63,31	61,05
30	Kota Magelang	60,25	89,12	87,06
31	Kota Surakarta	56,38	85,32	82,96
32	Kota Salatiga	81,55	90,57	90,20
33	Kota Semarang	84,82	91,19	90,93
34	Kota Pekalongan	54,90	74,09	73,09
35	Kota Tegal	100,00	98,33	98,43
Provinsi Jawa Tengah		58,34	70,57	69,19

Tabel 44
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih
menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, Maret 2015

No	Kabupaten/Kota	Miskin	Tidak Miskin	Miskin dan Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	74,21	76,23	75,98
2	Kab. Banyumas	57,41	71,02	69,09
3	Kab. Purbalingga	57,91	73,08	70,48
4	Kab. Banjarnegara	54,53	67,19	65,10
5	Kab. Kebumen	62,70	71,33	69,86
6	Kab. Purworejo	55,32	68,02	66,45
7	Kab. Wonosobo	78,38	90,10	87,53
8	Kab. Magelang	65,50	79,59	78,16
9	Kab. Boyolali	60,07	73,56	72,12
10	Kab. Klaten	61,52	71,91	70,51
11	Kab. Sukoharjo	77,06	82,02	81,65
12	Kab. Wonogiri	57,98	75,46	73,49
13	Kab. Karanganyar	83,19	81,76	81,93
14	Kab. Sragen	75,75	86,01	84,67
15	Kab. Grobogan	68,50	72,92	72,36
16	Kab. Blora	78,40	82,31	81,79
17	Kab. Rembang	97,19	94,00	94,61
18	Kab. Pati	75,20	83,85	82,98
19	Kab. Kudus	64,54	74,52	73,85
20	Kab. Jepara	65,34	72,44	71,82
21	Kab. Demak	90,67	92,54	92,28
22	Kab. Semarang	72,43	89,08	87,79
23	Kab. Temanggung	86,52	87,25	87,18
24	Kab. Kendal	72,98	83,64	82,51
25	Kab. Batang	75,76	72,40	72,73
26	Kab. Pekalongan	71,55	79,03	78,27
27	Kab. Pemasang	63,18	67,83	67,07
28	Kab. Tegal	68,82	74,81	74,31
29	Kab. Brebes	76,76	70,34	71,45
30	Kota Magelang	81,14	95,10	94,04
31	Kota Surakarta	77,35	87,11	86,18
32	Kota Salatiga	72,91	89,05	88,31
33	Kota Semarang	94,16	96,41	96,31
34	Kota Pekalongan	62,47	83,96	82,71
35	Kota Tegal	96,51	98,68	98,53
Provinsi Jawa Tengah		70,63	78,90	77,91

Tabel 45
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama
menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, September 2011

No	Kabupaten/Kota	Miskin	Tidak Miskin	Miskin dan Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	66,95	86,68	83,97
2	Kab. Banyumas	47,39	74,06	69,62
3	Kab. Purbalingga	51,13	74,66	70,25
4	Kab. Banjarnegara	29,89	58,98	54,23
5	Kab. Kebumen	68,35	81,88	79,42
6	Kab. Purworejo	47,09	76,63	72,52
7	Kab. Wonosobo	54,34	75,58	71,11
8	Kab. Magelang	54,99	74,60	72,16
9	Kab. Boyolali	75,44	89,44	87,68
10	Kab. Klaten	63,81	78,65	76,34
11	Kab. Sukoharjo	75,52	90,96	89,61
12	Kab. Wonogiri	93,21	96,19	95,84
13	Kab. Karanganyar	85,73	94,30	93,25
14	Kab. Sragen	84,52	93,70	92,32
15	Kab. Grobogan	64,25	83,57	80,53
16	Kab. Blora	87,31	88,21	88,07
17	Kab. Rembang	58,41	67,37	65,50
18	Kab. Pati	75,07	88,63	86,83
19	Kab. Kudus	77,91	93,03	91,86
20	Kab. Jepara	80,96	88,84	88,22
21	Kab. Demak	58,95	75,81	73,04
22	Kab. Semarang	73,75	90,22	88,86
23	Kab. Temanggung	61,24	80,84	78,78
24	Kab. Kendal	47,79	73,36	70,36
25	Kab. Batang	28,17	64,09	59,98
26	Kab. Pekalongan	38,24	63,10	60,06
27	Kab. Pemasang	55,23	67,90	65,95
28	Kab. Tegal	70,64	70,07	70,12
29	Kab. Brebes	46,23	61,38	58,54
30	Kota Magelang	80,82	95,94	94,60
31	Kota Surakarta	64,99	89,68	87,32
32	Kota Salatiga	79,27	95,94	94,83
33	Kota Semarang	65,08	95,43	94,02
34	Kota Pekalongan	85,18	90,14	89,84
35	Kota Tegal	82,53	94,30	93,44
Provinsi Jawa Tengah		61,83	80,83	78,30

Tabel 46
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama
menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, September 2012

No	Kabupaten/Kota	Miskin	Tidak Miskin	Miskin dan Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	69,58	86,60	84,44
2	Kab. Banyumas	49,32	75,22	71,09
3	Kab. Purbalingga	60,60	75,00	72,43
4	Kab. Banjarnegara	29,08	62,32	56,70
5	Kab. Kebumen	65,15	83,02	79,87
6	Kab. Purworejo	52,68	85,24	81,01
7	Kab. Wonosobo	62,78	76,85	74,06
8	Kab. Magelang	69,15	78,82	77,69
9	Kab. Boyolali	72,83	89,45	87,50
10	Kab. Klaten	70,17	84,37	82,51
11	Kab. Sukoharjo	86,16	92,53	92,10
12	Kab. Wonogiri	91,66	92,68	92,57
13	Kab. Karanganyar	85,95	95,58	94,52
14	Kab. Sragen	87,40	92,11	91,43
15	Kab. Grobogan	67,18	89,04	85,75
16	Kab. Blora	66,47	85,94	83,25
17	Kab. Rembang	62,18	72,21	70,36
18	Kab. Pati	77,06	89,50	88,17
19	Kab. Kudus	81,08	92,31	91,59
20	Kab. Jepara	80,82	89,57	88,91
21	Kab. Demak	57,65	80,30	76,98
22	Kab. Semarang	51,20	90,19	87,01
23	Kab. Temanggung	64,10	78,05	76,77
24	Kab. Kendal	56,28	78,38	76,00
25	Kab. Batang	38,39	68,90	66,02
26	Kab. Pekalongan	44,61	69,97	67,29
27	Kab. Pemasang	55,39	72,28	69,93
28	Kab. Tegal	54,14	71,30	69,92
29	Kab. Brebes	52,91	68,59	65,97
30	Kota Magelang	73,02	95,42	93,76
31	Kota Surakarta	69,20	90,82	88,90
32	Kota Salatiga	90,70	98,51	98,02
33	Kota Semarang	95,71	96,18	96,16
34	Kota Pekalongan	70,11	91,75	90,23
35	Kota Tegal	87,91	91,10	90,87
Provinsi Jawa Tengah		63,93	82,89	80,58

Tabel 47
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama
menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, September 2013

No	Kabupaten/Kota	Miskin	Tidak Miskin	Miskin dan Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	78,04	88,44	87,15
2	Kab. Banyumas	59,59	80,24	77,27
3	Kab. Purbalingga	60,86	75,34	73,00
4	Kab. Banjarnegara	41,56	62,68	59,42
5	Kab. Kebumen	69,06	86,15	83,28
6	Kab. Purworejo	71,65	83,64	82,17
7	Kab. Wonosobo	56,51	82,47	77,17
8	Kab. Magelang	59,79	78,34	76,19
9	Kab. Boyolali	76,97	91,36	89,75
10	Kab. Klaten	76,77	89,41	87,68
11	Kab. Sukoharjo	83,66	94,79	93,96
12	Kab. Wonogiri	89,49	96,50	95,67
13	Kab. Karanganyar	88,32	96,59	95,72
14	Kab. Sragen	88,70	95,40	94,56
15	Kab. Grobogan	79,89	88,58	87,31
16	Kab. Blora	87,69	90,26	89,93
17	Kab. Rembang	60,25	83,58	79,28
18	Kab. Pati	77,75	91,44	89,85
19	Kab. Kudus	85,44	95,23	94,57
20	Kab. Jepara	75,31	94,02	92,53
21	Kab. Demak	66,80	84,59	82,39
22	Kab. Semarang	64,37	91,47	89,76
23	Kab. Temanggung	75,42	81,12	80,57
24	Kab. Kendal	56,27	79,08	76,52
25	Kab. Batang	52,56	70,27	68,44
26	Kab. Pekalongan	45,83	74,63	71,79
27	Kab. Pemasang	65,77	81,26	78,90
28	Kab. Tegal	64,34	77,46	76,39
29	Kab. Brebes	62,04	67,36	66,47
30	Kota Magelang	88,08	94,33	93,86
31	Kota Surakarta	61,34	89,55	87,28
32	Kota Salatiga	100,00	98,13	98,20
33	Kota Semarang	94,99	97,78	97,68
34	Kota Pekalongan	87,12	95,39	94,98
35	Kota Tegal	86,97	92,66	92,29
Provinsi Jawa Tengah		69,61	85,62	83,73

Tabel 48
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama
menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, September 2014

No	Kabupaten/Kota	Miskin	Tidak Miskin	Miskin dan Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	77,19	88,18	86,87
2	Kab. Banyumas	61,51	80,40	77,72
3	Kab. Purbalingga	55,95	76,11	72,71
4	Kab. Banjarnegara	60,19	69,90	68,46
5	Kab. Kebumen	77,57	84,32	83,26
6	Kab. Purworejo	71,83	84,35	82,80
7	Kab. Wonosobo	55,59	82,01	76,57
8	Kab. Magelang	66,26	81,55	80,05
9	Kab. Boyolali	84,85	92,89	92,00
10	Kab. Klaten	81,93	90,34	89,29
11	Kab. Sukoharjo	80,14	95,86	94,86
12	Kab. Wonogiri	94,78	96,98	96,73
13	Kab. Karanganyar	89,05	96,37	95,63
14	Kab. Sragen	87,76	96,18	95,19
15	Kab. Grobogan	78,94	89,88	88,51
16	Kab. Blora	78,20	90,98	89,50
17	Kab. Rembang	68,16	79,38	77,47
18	Kab. Pati	82,71	93,34	92,20
19	Kab. Kudus	85,83	95,10	94,54
20	Kab. Jepara	83,86	93,01	92,32
21	Kab. Demak	62,93	88,19	85,19
22	Kab. Semarang	75,51	93,11	91,96
23	Kab. Temanggung	66,26	85,83	83,89
24	Kab. Kendal	57,49	83,49	80,78
25	Kab. Batang	60,53	80,45	78,55
26	Kab. Pekalongan	53,40	71,54	69,80
27	Kab. Pemasang	65,01	79,00	76,93
28	Kab. Tegal	62,55	77,70	76,54
29	Kab. Brebes	56,54	74,01	71,17
30	Kota Magelang	83,98	96,85	95,93
31	Kota Surakarta	65,92	89,57	87,65
32	Kota Salatiga	85,75	98,22	97,72
33	Kota Semarang	90,55	97,94	97,64
34	Kota Pekalongan	69,29	95,26	93,91
35	Kota Tegal	88,55	90,19	90,10
Provinsi Jawa Tengah		71,06	86,88	85,10

Tabel 49
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama
menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, Maret 2015

No	Kabupaten/Kota	Miskin	Tidak Miskin	Miskin dan Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	79,36	85,76	84,94
2	Kab. Banyumas	56,23	78,16	75,05
3	Kab. Purbalingga	64,96	80,91	78,14
4	Kab. Banjarnegara	45,39	77,56	72,17
5	Kab. Kebumen	81,01	88,60	87,29
6	Kab. Purworejo	76,60	89,07	87,53
7	Kab. Wonosobo	80,85	88,59	87,68
8	Kab. Magelang	70,46	84,43	82,95
9	Kab. Boyolali	80,25	94,10	92,52
10	Kab. Klaten	88,25	93,84	93,06
11	Kab. Sukoharjo	85,82	95,77	95,01
12	Kab. Wonogiri	94,94	98,96	98,50
13	Kab. Karanganyar	93,42	98,00	97,47
14	Kab. Sragen	91,19	97,35	96,54
15	Kab. Grobogan	88,41	93,73	93,06
16	Kab. Blora	80,22	89,82	88,52
17	Kab. Rembang	75,04	89,14	86,49
18	Kab. Pati	88,64	93,91	93,37
19	Kab. Kudus	87,72	96,42	95,83
20	Kab. Jepara	91,44	95,25	94,91
21	Kab. Demak	75,83	93,09	90,61
22	Kab. Semarang	82,63	93,65	92,79
23	Kab. Temanggung	75,80	88,78	87,47
24	Kab. Kendal	55,96	86,76	83,65
25	Kab. Batang	62,90	83,81	81,65
26	Kab. Pekalongan	61,91	81,20	79,27
27	Kab. Pemasang	50,40	78,75	73,95
28	Kab. Tegal	72,63	85,60	84,49
29	Kab. Brebes	55,52	76,64	72,91
30	Kota Magelang	83,04	94,00	93,17
31	Kota Surakarta	71,41	92,29	90,33
32	Kota Salatiga	80,16	98,24	97,40
33	Kota Semarang	92,21	96,67	96,47
34	Kota Pekalongan	64,14	91,36	89,80
35	Kota Tegal	85,93	95,61	94,97
Provinsi Jawa Tengah		74,29	89,25	87,43

Tabel 50
Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Kabupaten/Kota
dan Luas Lantai Perkapita, September 2011

No	Kabupaten/Kota	Luas Lantai Perkapita (m ²)		
		≤ 8	8 < luas ≤ 15	> 15
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	14,30	54,25	31,45
2	Kab. Banyumas	9,34	50,18	40,48
3	Kab. Purbalingga	10,39	52,23	37,38
4	Kab. Banjarnegara	7,29	51,21	41,50
5	Kab. Kebumen	10,47	42,97	46,56
6	Kab. Purworejo	5,96	41,54	52,50
7	Kab. Wonosobo	15,13	45,44	39,43
8	Kab. Magelang	6,01	41,85	52,14
9	Kab. Boyolali	1,76	26,46	71,78
10	Kab. Klaten	4,47	21,49	74,04
11	Kab. Sukoharjo	5,74	43,66	50,60
12	Kab. Wonogiri	3,97	23,06	72,97
13	Kab. Karanganyar	4,05	34,95	61,00
14	Kab. Sragen	3,24	22,92	73,84
15	Kab. Grobogan	1,62	10,43	87,95
16	Kab. Blora	1,86	7,21	90,93
17	Kab. Rembang	5,55	24,40	70,05
18	Kab. Pati	3,71	28,03	68,26
19	Kab. Kudus	23,83	38,58	37,59
20	Kab. Jepara	12,12	47,20	40,68
21	Kab. Demak	7,14	45,09	47,77
22	Kab. Semarang	3,22	37,22	59,56
23	Kab. Temanggung	6,98	42,01	51,01
24	Kab. Kendal	13,74	49,43	36,83
25	Kab. Batang	6,04	39,17	54,79
26	Kab. Pekalongan	18,37	51,96	29,67
27	Kab. Pemasang	19,69	51,74	28,57
28	Kab. Tegal	12,68	49,94	37,38
29	Kab. Brebes	11,91	56,85	31,24
30	Kota Magelang	33,11	42,79	24,10
31	Kota Surakarta	45,78	30,33	23,89
32	Kota Salatiga	17,62	44,71	37,67
33	Kota Semarang	34,25	39,53	26,22
34	Kota Pekalongan	32,41	57,39	10,20
35	Kota Tegal	33,58	49,29	17,13
Provinsi Jawa Tengah		9,80	39,63	50,57

Tabel 51
Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Kabupaten/Kota
dan Luas Lantai Perkapita, September 2012

No	Kabupaten/Kota	Luas Lantai Perkapita (m ²)		
		≤ 8	8 < luas ≤ 15	> 15
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	6,91	55,01	38,08
2	Kab. Banyumas	10,43	50,41	39,16
3	Kab. Purbalingga	12,50	47,80	39,70
4	Kab. Banjarnegara	7,01	41,90	51,09
5	Kab. Kebumen	13,69	39,87	46,44
6	Kab. Purworejo	3,82	41,16	55,02
7	Kab. Wonosobo	10,46	40,10	49,43
8	Kab. Magelang	7,20	31,53	61,27
9	Kab. Boyolali	6,49	15,62	77,90
10	Kab. Klaten	6,09	29,16	64,76
11	Kab. Sukoharjo	12,51	29,81	57,68
12	Kab. Wonogiri	3,67	23,43	72,90
13	Kab. Karanganyar	2,69	25,89	71,42
14	Kab. Sragen	2,36	12,62	85,01
15	Kab. Grobogan	1,67	11,81	86,52
16	Kab. Blora	3,79	12,72	83,50
17	Kab. Rembang	4,59	33,99	61,42
18	Kab. Pati	12,11	32,26	55,63
19	Kab. Kudus	19,43	46,49	34,07
20	Kab. Jepara	11,41	46,98	41,62
21	Kab. Demak	10,74	46,93	42,33
22	Kab. Semarang	6,58	16,79	76,63
23	Kab. Temanggung	10,77	47,74	41,48
24	Kab. Kendal	9,72	40,23	50,05
25	Kab. Batang	14,30	51,53	34,17
26	Kab. Pekalongan	15,36	66,05	18,59
27	Kab. Pemasang	26,68	54,84	18,48
28	Kab. Tegal	9,60	51,00	39,40
29	Kab. Brebes	18,47	51,13	30,39
30	Kota Magelang	39,76	44,93	15,31
31	Kota Surakarta	56,92	18,56	24,52
32	Kota Salatiga	12,10	48,97	38,93
33	Kota Semarang	31,43	40,60	27,97
34	Kota Pekalongan	12,01	48,42	39,57
35	Kota Tegal	33,20	49,84	16,97
Provinsi Jawa Tengah		10,91	38,21	50,88

Tabel 52
Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Kabupaten/Kota
dan Luas Lantai Perkapita, September 2013

No	Kabupaten/Kota	Luas Lantai Perkapita (m ²)		
		≤ 8	8 < luas ≤ 15	> 15
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	10,60	41,84	47,56
2	Kab. Banyumas	8,63	50,76	40,61
3	Kab. Purbalingga	8,30	52,32	39,38
4	Kab. Banjarnegara	4,63	36,37	58,99
5	Kab. Kebumen	12,07	39,58	48,35
6	Kab. Purworejo	8,87	33,10	58,03
7	Kab. Wonosobo	10,38	40,41	49,20
8	Kab. Magelang	9,76	32,80	57,45
9	Kab. Boyolali	3,68	11,86	84,46
10	Kab. Klaten	5,11	30,99	63,90
11	Kab. Sukoharjo	19,22	23,32	57,46
12	Kab. Wonogiri	2,39	10,54	87,08
13	Kab. Karanganyar	9,28	27,72	63,01
14	Kab. Sragen	2,55	16,21	81,24
15	Kab. Grobogan	2,21	4,26	93,54
16	Kab. Blora	0,81	9,88	89,31
17	Kab. Rembang	5,28	27,63	67,09
18	Kab. Pati	4,59	35,65	59,76
19	Kab. Kudus	19,78	42,99	37,23
20	Kab. Jepara	10,82	36,58	52,61
21	Kab. Demak	9,83	46,86	43,31
22	Kab. Semarang	4,80	21,64	73,55
23	Kab. Temanggung	4,69	38,84	56,47
24	Kab. Kendal	3,74	51,61	44,65
25	Kab. Batang	9,17	40,02	50,82
26	Kab. Pekalongan	14,63	62,31	23,05
27	Kab. Pemasang	13,42	63,81	22,78
28	Kab. Tegal	12,19	43,49	44,32
29	Kab. Brebes	10,58	50,82	38,60
30	Kota Magelang	33,98	53,18	12,84
31	Kota Surakarta	54,77	25,58	19,65
32	Kota Salatiga	43,81	35,78	20,41
33	Kota Semarang	58,25	20,27	21,47
34	Kota Pekalongan	25,31	41,16	33,53
35	Kota Tegal	34,63	34,94	30,42
Provinsi Jawa Tengah		9,73	36,02	54,25

Tabel 53
Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Kabupaten/Kota
dan Luas Lantai Perkapita, September 2014

No	Kabupaten/Kota	Luas Lantai Perkapita (m ²)		
		≤ 8	8 < luas ≤ 15	> 15
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	10,86	41,99	47,15
2	Kab. Banyumas	5,95	53,56	40,49
3	Kab. Purbalingga	10,24	46,77	42,99
4	Kab. Banjarnegara	4,96	46,22	48,82
5	Kab. Kebumen	4,02	49,36	46,62
6	Kab. Purworejo	2,90	36,06	61,04
7	Kab. Wonosobo	9,65	40,13	50,22
8	Kab. Magelang	15,40	28,68	55,92
9	Kab. Boyolali	1,26	20,44	78,30
10	Kab. Klaten	4,63	34,85	60,52
11	Kab. Sukoharjo	19,40	32,40	48,20
12	Kab. Wonogiri	1,17	14,24	84,59
13	Kab. Karanganyar	5,89	34,58	59,53
14	Kab. Sragen	1,96	14,23	83,81
15	Kab. Grobogan	1,23	5,43	93,34
16	Kab. Blora		19,74	80,26
17	Kab. Rembang	5,00	24,45	70,55
18	Kab. Pati	5,34	35,83	58,84
19	Kab. Kudus	17,01	52,09	30,90
20	Kab. Jepara	10,25	35,19	54,56
21	Kab. Demak	8,11	46,98	44,90
22	Kab. Semarang	2,17	27,77	70,06
23	Kab. Temanggung	7,38	30,77	61,85
24	Kab. Kendal	3,09	35,54	61,37
25	Kab. Batang	3,97	53,39	42,64
26	Kab. Pekalongan	17,83	57,55	24,61
27	Kab. Pemasang	17,59	58,12	24,29
28	Kab. Tegal	13,27	41,65	45,08
29	Kab. Brebes	17,61	46,30	36,09
30	Kota Magelang	46,39	29,35	24,26
31	Kota Surakarta	44,04	28,23	27,73
32	Kota Salatiga	10,00	52,48	37,52
33	Kota Semarang	41,55	31,32	27,13
34	Kota Pekalongan	31,28	50,43	18,28
35	Kota Tegal	32,90	34,15	32,95
Provinsi Jawa Tengah		9,31	37,48	53,20

Tabel 54
Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Kabupaten/Kota
dan Luas Lantai Perkapita, Maret 2015

No	Kabupaten/Kota	Luas Lantai Perkapita (m ²)		
		≤ 8	8 < luas ≤ 15	> 15
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	8,48	45,94	45,58
2	Kab. Banyumas	3,44	41,85	54,71
3	Kab. Purbalingga	7,82	38,30	53,88
4	Kab. Banjarnegara	6,02	40,98	53,00
5	Kab. Kebumen	6,11	42,91	50,98
6	Kab. Purworejo	8,48	38,02	53,50
7	Kab. Wonosobo	9,78	33,98	56,24
8	Kab. Magelang	24,25	26,77	48,98
9	Kab. Boyolali	1,35	14,73	83,92
10	Kab. Klaten	4,37	26,55	69,08
11	Kab. Sukoharjo	13,13	22,87	64,01
12	Kab. Wonogiri	0,99	12,71	86,30
13	Kab. Karanganyar	3,88	19,31	76,80
14	Kab. Sragen	5,06	16,40	78,54
15	Kab. Grobogan	4,58	8,71	86,71
16	Kab. Blora	1,01	7,62	91,37
17	Kab. Rembang	4,34	22,58	73,08
18	Kab. Pati	2,06	46,39	51,55
19	Kab. Kudus	9,68	47,19	43,13
20	Kab. Jepara	7,09	31,83	61,08
21	Kab. Demak	7,65	43,35	49,00
22	Kab. Semarang	2,79	18,52	78,69
23	Kab. Temanggung	12,66	38,11	49,23
24	Kab. Kendal	4,81	39,37	55,81
25	Kab. Batang	6,81	45,25	47,95
26	Kab. Pekalongan	15,94	44,19	39,88
27	Kab. Pemasang	11,42	46,21	42,37
28	Kab. Tegal	11,87	38,51	49,62
29	Kab. Brebes	7,97	44,60	47,43
30	Kota Magelang	13,86	29,91	56,22
31	Kota Surakarta	36,41	27,88	35,71
32	Kota Salatiga	28,81	41,56	29,63
33	Kota Semarang	22,77	26,48	50,75
34	Kota Pekalongan	33,48	30,79	35,73
35	Kota Tegal	16,42	26,81	56,78
Provinsi Jawa Tengah		7,97	33,39	58,64

Tabel 55
Persentase Rumah Tangga yang Pernah Membeli Beras Raskin, Rata-Rata Jumlah Beras Raskin dan Harga yang Dibeli oleh Rumah Tangga pada *Quantile* 1 menurut Kabupaten/Kota, September 2011

No	Kabupaten/Kota	Rumah Tangga Penerima Raskin (%)	Rata-Rata Raskin (kg)	Rata-Rata Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	90,85	5,84	1 983
2	Kab. Banyumas	98,13	6,72	1 979
3	Kab. Purbalingga	100,00	5,37	1 751
4	Kab. Banjarnegara	99,39	5,55	1 992
5	Kab. Kebumen	94,89	6,89	1 785
6	Kab. Purworejo	93,10	6,89	1 805
7	Kab. Wonosobo	93,69	6,05	1 937
8	Kab. Magelang	97,74	5,50	1 940
9	Kab. Boyolali	69,11	7,68	1 873
10	Kab. Klaten	92,98	7,92	1 760
11	Kab. Sukoharjo	75,80	9,44	1 629
12	Kab. Wonogiri	89,12	5,52	2 077
13	Kab. Karanganyar	86,62	8,32	1 751
14	Kab. Sragen	68,25	8,60	1 842
15	Kab. Grobogan	93,96	6,79	1 770
16	Kab. Blora	87,88	6,87	1 726
17	Kab. Rembang	94,82	5,76	1 677
18	Kab. Pati	95,42	4,18	1 829
19	Kab. Kudus	79,35	3,62	1 862
20	Kab. Jepara	86,87	6,37	1 827
21	Kab. Demak	97,22	4,68	1 941
22	Kab. Semarang	83,06	5,16	1 982
23	Kab. Temanggung	93,36	5,64	1 886
24	Kab. Kendal	95,35	3,90	2 187
25	Kab. Batang	97,75	6,03	1 919
26	Kab. Pekalongan	92,77	6,05	1 800
27	Kab. Pemasang	97,80	5,96	1 996
28	Kab. Tegal	93,17	4,91	2 020
29	Kab. Brebes	97,74	6,25	1 957
30	Kota Magelang	74,56	9,38	1 754
31	Kota Surakarta	60,16	6,20	1 850
32	Kota Salatiga	61,01	7,48	1 838
33	Kota Semarang	69,57	4,45	2 111
34	Kota Pekalongan	86,94	5,16	1 934
35	Kota Tegal	91,32	3,89	2 142
Provinsi Jawa Tengah		89,64	6,03	1 901

Tabel 56
Persentase Rumah Tangga yang Pernah Membeli Beras Raskin, Rata-Rata Jumlah Beras Raskin dan Harga yang Dibeli oleh Rumah Tangga pada *Quantile* 1 menurut Kabupaten/Kota, September 2012

No	Kabupaten/Kota	Rumah Tangga Penerima Raskin (%)	Rata-Rata Raskin (kg)	Rata-Rata Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	95,78	6,02	2 099
2	Kab. Banyumas	96,51	5,74	2 002
3	Kab. Purbalingga	98,01	6,40	1 827
4	Kab. Banjarnegara	97,62	6,36	1 980
5	Kab. Kebumen	90,30	7,06	1 843
6	Kab. Purworejo	88,66	7,21	1 697
7	Kab. Wonosobo	94,47	6,28	1 877
8	Kab. Magelang	94,15	5,92	2 014
9	Kab. Boyolali	83,29	8,59	1 861
10	Kab. Klaten	93,73	8,42	1 807
11	Kab. Sukoharjo	83,93	7,99	1 675
12	Kab. Wonogiri	89,45	5,87	2 126
13	Kab. Karanganyar	83,65	8,34	1 803
14	Kab. Sragen	70,42	8,18	1 793
15	Kab. Grobogan	95,42	5,86	1 853
16	Kab. Blora	94,91	4,97	1 802
17	Kab. Rembang	95,91	6,71	1 622
18	Kab. Pati	95,64	4,14	1 786
19	Kab. Kudus	83,35	3,51	1 874
20	Kab. Jepara	88,02	6,91	1 924
21	Kab. Demak	98,55	4,89	1 961
22	Kab. Semarang	91,75	4,74	2 059
23	Kab. Temanggung	88,59	7,38	1 921
24	Kab. Kendal	84,09	4,42	2 123
25	Kab. Batang	95,75	5,76	1 990
26	Kab. Pekalongan	98,92	5,39	1 845
27	Kab. Pemasang	99,59	5,58	2 105
28	Kab. Tegal	97,51	4,55	2 124
29	Kab. Brebes	98,54	5,56	1 977
30	Kota Magelang	81,21	8,31	1 869
31	Kota Surakarta	66,48	7,79	2 035
32	Kota Salatiga	67,93	7,86	1 956
33	Kota Semarang	60,63	4,36	2 081
34	Kota Pekalongan	88,04	4,87	1 908
35	Kota Tegal	76,86	6,34	2 103
Provinsi Jawa Tengah		90,29	6,03	1 931

Tabel 57
Persentase Rumah Tangga yang Pernah Membeli Beras Raskin, Rata-Rata Jumlah Beras Raskin dan Harga yang Dibeli oleh Rumah Tangga pada *Quantile* 1 menurut Kabupaten/Kota, September 2013

No	Kabupaten/Kota	Rumah Tangga Penerima Raskin (%)	Rata-Rata Raskin (kg)	Rata-Rata Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	88,65	5,46	2 013
2	Kab. Banyumas	95,19	4,88	2 061
3	Kab. Purbalingga	96,37	6,43	1 967
4	Kab. Banjarnegara	94,44	7,90	1 978
5	Kab. Kebumen	94,64	6,02	1 901
6	Kab. Purworejo	77,53	6,49	1 862
7	Kab. Wonosobo	93,88	5,92	2 064
8	Kab. Magelang	95,87	5,95	1 987
9	Kab. Boyolali	73,71	6,75	2 028
10	Kab. Klaten	91,84	5,64	1 892
11	Kab. Sukoharjo	81,72	7,68	1 762
12	Kab. Wonogiri	90,86	5,88	1 954
13	Kab. Karanganyar	71,21	7,93	2 029
14	Kab. Sragen	67,37	7,92	1 928
15	Kab. Grobogan	92,18	5,87	1 881
16	Kab. Blora	98,10	4,44	1 844
17	Kab. Rembang	96,25	7,23	1 737
18	Kab. Pati	92,15	4,28	1 904
19	Kab. Kudus	74,34	4,32	2 094
20	Kab. Jepara	86,14	5,70	1 888
21	Kab. Demak	94,99	5,10	1 974
22	Kab. Semarang	75,90	4,64	1 955
23	Kab. Temanggung	88,85	6,11	2 017
24	Kab. Kendal	86,29	4,72	2 095
25	Kab. Batang	96,46	5,66	2 072
26	Kab. Pekalongan	97,65	4,45	1 929
27	Kab. Pemasang	99,51	5,55	2 112
28	Kab. Tegal	92,48	4,15	2 251
29	Kab. Brebes	92,94	4,56	2 133
30	Kota Magelang	52,07	6,16	1 980
31	Kota Surakarta	65,57	8,84	1 987
32	Kota Salatiga	71,47	7,23	1 923
33	Kota Semarang	67,42	4,35	2 171
34	Kota Pekalongan	46,17	4,50	2 227
35	Kota Tegal	84,71	6,57	1 937
Provinsi Jawa Tengah		87,31	5,62	1 994

Tabel 58
Persentase Rumah Tangga yang Pernah Membeli Beras Raskin, Rata-Rata Jumlah Beras Raskin dan Harga yang Dibeli oleh Rumah Tangga pada *Quantile* 1 menurut Kabupaten/Kota, September 2014

No	Kabupaten/Kota	Rumah Tangga Penerima Raskin (%)	Rata-Rata Raskin (kg)	Rata-Rata Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	88,93	5,05	2 026
2	Kab. Banyumas	89,59	5,06	1 998
3	Kab. Purbalingga	94,05	7,33	1 981
4	Kab. Banjarnegara	96,84	6,16	2 012
5	Kab. Kebumen	96,40	5,53	2 054
6	Kab. Purworejo	77,79	6,35	1 936
7	Kab. Wonosobo	92,98	6,09	2 053
8	Kab. Magelang	90,74	6,14	2 175
9	Kab. Boyolali	72,08	5,90	1 989
10	Kab. Klaten	96,30	5,87	1 932
11	Kab. Sukoharjo	75,61	7,51	1 741
12	Kab. Wonogiri	85,22	6,82	1 874
13	Kab. Karanganyar	67,36	7,66	2 086
14	Kab. Sragen	62,94	9,82	1 809
15	Kab. Grobogan	88,14	5,43	1 940
16	Kab. Blora	96,18	4,86	1 829
17	Kab. Rembang	96,73	6,99	1 741
18	Kab. Pati	93,83	4,74	1 870
19	Kab. Kudus	80,47	3,59	2 162
20	Kab. Jepara	84,59	5,31	1 924
21	Kab. Demak	92,90	4,44	2 005
22	Kab. Semarang	81,87	4,85	2 064
23	Kab. Temanggung	93,92	5,22	2 092
24	Kab. Kendal	86,31	4,65	2 122
25	Kab. Batang	98,45	5,59	2 158
26	Kab. Pekalongan	97,48	5,08	1 972
27	Kab. Pemasang	98,05	4,48	2 187
28	Kab. Tegal	95,21	4,16	3 017
29	Kab. Brebes	98,15	5,07	2 207
30	Kota Magelang	70,95	7,01	2 011
31	Kota Surakarta	68,88	9,57	2 446
32	Kota Salatiga	67,49	8,69	1 905
33	Kota Semarang	60,77	5,24	2 325
34	Kota Pekalongan	58,00	5,05	2 128
35	Kota Tegal	82,81	6,74	1 985
Provinsi Jawa Tengah		86,81	5,60	2 070

Tabel 59
Persentase Rumah Tangga yang Pernah Membeli Beras Raskin, Rata-Rata Jumlah Beras Raskin dan Harga yang Dibeli oleh Rumah Tangga pada *Quantile* 1 menurut Kabupaten/Kota, Maret 2015

No	Kabupaten/Kota	Rumah Tangga Penerima Raskin (%)	Rata-Rata Raskin (kg)	Rata-Rata Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	70,17	5,29	2 207
2	Kab. Banyumas	71,31	4,85	2 229
3	Kab. Purbalingga	81,72	5,85	2 062
4	Kab. Banjarnegara	67,55	5,23	2 238
5	Kab. Kebumen	78,33	5,54	2 093
6	Kab. Purworejo	53,56	5,68	2 039
7	Kab. Wonosobo	80,62	4,83	2 491
8	Kab. Magelang	69,93	4,94	2 207
9	Kab. Boyolali	44,54	6,71	2 090
10	Kab. Klaten	72,56	5,68	1 950
11	Kab. Sukoharjo	39,71	7,21	1 780
12	Kab. Wonogiri	61,83	6,28	2 048
13	Kab. Karanganyar	43,50	6,71	2 012
14	Kab. Sragen	49,86	7,81	1 864
15	Kab. Grobogan	71,02	4,95	2 069
16	Kab. Blora	82,64	4,36	1 866
17	Kab. Rembang	82,48	6,06	1 957
18	Kab. Pati	80,60	4,23	1 965
19	Kab. Kudus	67,77	3,19	2 004
20	Kab. Jepara	77,38	4,67	2 004
21	Kab. Demak	80,11	4,34	2 189
22	Kab. Semarang	47,73	4,54	2 210
23	Kab. Temanggung	52,24	5,69	2 044
24	Kab. Kendal	36,31	8,58	2 179
25	Kab. Batang	73,43	4,50	2 378
26	Kab. Pekalongan	71,25	4,11	2 090
27	Kab. Pemasang	82,89	4,71	2 127
28	Kab. Tegal	68,20	3,93	2 348
29	Kab. Brebes	84,11	4,66	2 113
30	Kota Magelang	32,96	6,05	2 125
31	Kota Surakarta	24,90	8,19	2 287
32	Kota Salatiga	22,52	6,17	2 132
33	Kota Semarang	23,20	4,38	2 842
34	Kota Pekalongan	19,42	4,88	2 407
35	Kota Tegal	34,96	4,41	2 532
Provinsi Jawa Tengah		64,26	5,13	2 126



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Pahlawan No. 6 Semarang 50241

Telp. 024 - 8412802, 8412804, 8412805 Fax. 024 - 8311195

Homepage: <http://jateng.bps.go.id> E-mail : bps3300@bps.go.id

ISSN 2407-3369



9 772407 336006